

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI
KABUPATEN KEPAHANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)*



Oleh

**TERE ADEREMPAS
NIM 23861015**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI
KABUPATEN KEPAHANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)*



Oleh

**TERE ADEREMPAS
NIM 23861015**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025 M/1445 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tere Aderempas
NIM : 23861015

Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Lekat, 26 Agustus 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2025
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'M1 TEDSAI TEMPTI' and 'ZC3A/JX126534R45'.

Tere Aderempas
NIM 23861015



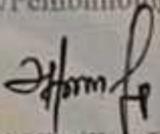
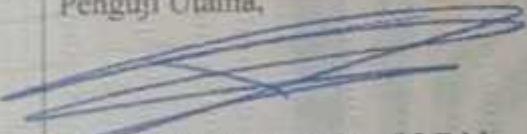
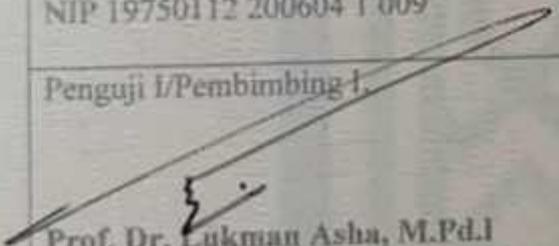
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. AK. Gani No. 01 Kota Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

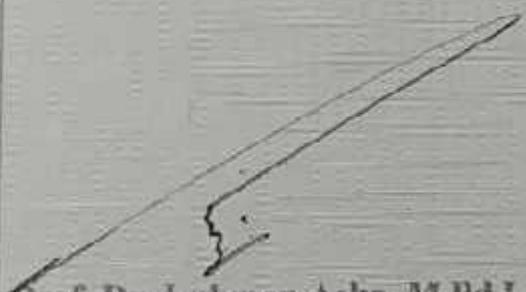
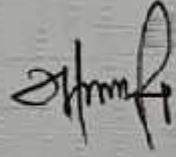
No. : 697 /In.34/PS/PP.00.9/08/2025

Tesis yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang"* yang ditulis oleh Tere Aderempas, NIM. 23861015, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP 19650826 199903 1 001	Sekretaris/Pembimbing II,  Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I NIP 19900603 202012 2 004
Penguji Utama,  Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I NIP 19750112 200604 1 009	Curup, 11 September 2025
Penguji I/Pembimbing I,  Prof. Dr. Lukman Asha, M.Pd.I NIP 19590929 199203 1 001	Curup, 11 September 2025
Mengetahui: Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. H. Idris Warsyah, M.Pd.I NIP 19750415 200501 1 009	Curup, 11 September 2025 Direktur  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP 19650826 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Tere Aderempas
NIM : 23861015
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang.

<p>Pembimbing I,</p>  <p>Prof. Dr. Lukman Asha, M.Pd.I NIP 195909291992031001</p>	<p>Curup, 11 September 2025 Pembimbing II,</p>  <p>Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I NIP 199006032020122004</p>
<p>Mengetahui, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup,</p>   <p>Dr. Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd NIP 197207042000031004</p>	



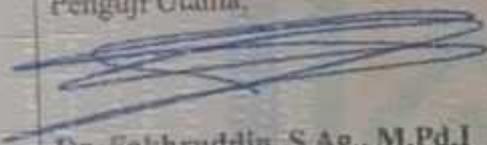
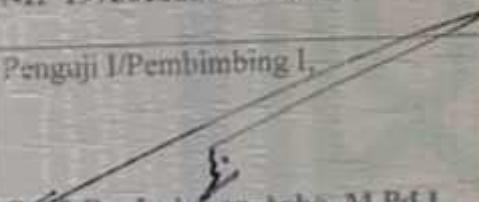
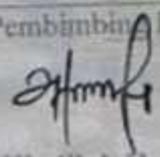
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kota Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang" yang ditulis Tere Aderempas, NIM 23861015, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, 11 September 2025

Ketua,  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd. NIP 196508261999031001	Tanggal, 11 September 2025
Penguji Utama,  Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I. NIP 197501122006041009	Tanggal, 11 September 2025
Penguji I/Pembimbing I,  Prof. Dr. Lukman Asha, M.Pd.I. NIP 195909291992031001	Tanggal, 11 September 2025
Sekretaris/Pembimbing II,  Dr. Emmi Kholilah Harahap, M.Pd.I. NIP 199006032020122004	Tanggal, 11 September 2025

ABSTRAK

Nama Tere Aderempas, NIM 23861015, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), 2025. 136 halaman.

Pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan dan kualitas pendidikan yang setara di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah non-perkotaan seperti Kabupaten Kepahiang. Ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, air bersih, listrik, serta akses internet, masih menjadi tantangan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang serta dampaknya terhadap akses dan kualitas layanan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial dan dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan infrastruktur pendidikan telah mencakup pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan akses internet, serta distribusi bantuan infrastruktur ke berbagai wilayah. Namun, masih ditemukan ketimpangan kualitas antarwilayah, keterbatasan akses di daerah terpencil, dan belum optimalnya partisipasi stakeholder eksternal. Meskipun pemanfaatan sarana prasarana telah berjalan cukup efektif dan berdampak positif terhadap proses pembelajaran, dampaknya terhadap hasil akademik siswa belum merata. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan belum sepenuhnya tercapai dan memerlukan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan lokal, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Infrastruktur pendidikan, pemerataan, kebijakan daerah, akses pendidikan, kualitas pembelajaran.*

ABSTRACT

Name: Tere Aderempas, Student ID: 23861015, *Implementation of Local Government Policies in the Field of Education and Their Implications for the Equitable Distribution of Educational Infrastructure in Kepahiang Regency*, thesis, Postgraduate Program, IAIN Curup, Islamic Education Management (MPI) Study Program, 2025. 136 pages.

The equitable distribution of educational infrastructure is a fundamental prerequisite for realizing justice and equal quality in education across all regions, including non-urban areas such as Kepahiang Regency. Disparities in educational facilities and infrastructure such as classrooms, clean water, electricity, and internet access remain a challenge that significantly affects students' learning processes and outcomes. This study aims to analyze the implementation of local government policies in equalizing educational infrastructure in Kepahiang Regency and their implications for access to and the quality of educational services.

This research employed a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of the implementation of policies related to educational infrastructure equity in Kepahiang Regency. This approach was chosen because it enables a more comprehensive and contextual exploration of social realities and field dynamics. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation.

The findings reveal that the implementation of educational infrastructure policies has encompassed the construction and rehabilitation of classrooms, the provision of basic facilities such as electricity, clean water, and internet access, as well as the distribution of infrastructure support across regions. However, inequalities in quality between regions, limited access in remote areas, and suboptimal participation of external stakeholders are still evident. Although the utilization of facilities has been relatively effective and has positively influenced the learning process, its impact on students' academic achievement has not been evenly distributed. Based on these findings, it can be concluded that equitable distribution of educational infrastructure has not yet been fully achieved and requires strengthened locally-based planning, enhanced cross-sector collaboration, and continuous monitoring and evaluation.

Keywords: *Educational infrastructure, equity, local government policy, access to education, learning quality.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang”** ini dengan baik. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana.

Tesis ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam konteks pembangunan infrastruktur pendidikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong pemerataan layanan pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan berbagai pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, serta sekolah-sekolah negeri sebagai lokasi studi kasus.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Curup beserta jajaran Wakil Rektor IAIN Curup, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lingkungan kampus tercinta ini.
2. Bapak Direktur beserta Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup, yang telah membimbing, memfasilitasi, dan memberikan arahan selama penulis menempuh studi di Program Pascasarjana.
3. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup, atas bimbingan, arahan akademik, serta pelayanan yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi secara sabar dan profesional.
5. Pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang beserta Kepala sekolah dan guru dari SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, dan SMPN 2 Ujan Mas yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi penting dalam penelitian ini.
6. Keluarga tercinta Istri dan kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan dukungan moral dan spiritual tanpa henti beserta rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi teknis maupun substansi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan karya ini ke depan.

Kepahiang, 9 September 2025

Penulis,

Tere Aderempas

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Pertanyaan Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN.....	23
A. Kajian Teori.....	15
1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan koordinasi antar stakeholder yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.....	15
2. Pemerataan infrastruktur pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.....	28
B. Penelitian Relevan.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Metode dan Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Keabsahan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Dan Subjek Penelitian.....	55
B. Hasil Penelitian.....	89
C. Pembahasan.....	98
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	
A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	122
C. Keterbatasan Penelitian.....	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENELITI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Kebijakan Nasional yang Berpengaruh terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Indonesia..... 2
Tabel 1.2	Laporan Data Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah di Kabupaten Kepahiang tahun 2023..... 4
Tabel 1.3	Jumlah Sekolah dan Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Kepahiang 2024..... 5
Tabel 1.4	Perbandingan Fasilitas Sekolah Perkotaan dan Pedesaan tahun 2024..... 6
Tabel 1.5	Laporan Alokasi Anggaran Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Berdasarkan Informasi dari APBD Dan RKPD..... 7
Tabel 1.6	Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024..... 8
Tabel 1.7	Hasil Kebijakan Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang 2019-2023..... 9
Tabel 2.1	Indikator Penelitian..... 28
Tabel 2.2	Indikator Penelitian..... 39
Tabel 3.1	Sebaran SMPN di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025..... 46
Tabel 4.1	Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Kepahiang Tahun 2025..... 59
Tabel 4.2	Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kepahiang Tahun 2025..... 60
Tabel 4.3	Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Tebat Karai Tahun 2025..... 62
Tabel 4.4	Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Tebat Karai Tahun 2025..... 62
Tabel 4.5	Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Ujan Mas Tahun 2025..... 64

Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana SMPN 2 Ujan Mas Tahun 2025.....	65
Tabel 4.7	Subjek Penelitian.....	68
Tabel 4.8	Kebijakan dan Program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Terkait Infrastruktur Pendidikan.....	75
Tabel 4.9	Ringkasan Juknis DAK Fisik Pendidikan Kemdikbudristek.....	77
Tabel 4.10	Perbandingan rencana kebijakan dan hasil implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.....	86
Tabel 4.11	Perbandingan Rencana dan Hasil Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang.....	95
Tabel 4.12	Perbandingan Rencana dan Hasil Implikasi Kebijakan terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan.....	103
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial, mobilitas ekonomi, dan kemajuan peradaban bangsa. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan.¹

Pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam menciptakan keadilan akses pendidikan.² Tanpa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, mustahil bagi satuan pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sesuai dengan amanat

¹ object Object, "Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk) Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur," accessed April 18, 2025, <https://core.ac.uk/reader/287347140>.

² Fadhil Mubarak, "Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog: Meta Analisis Pendekatan Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, Dan Ibnu Khaldun," *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (May 30, 2023): 11–33, <https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.19869>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan wajib bidang pendidikan.

Kesenjangan infrastruktur pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek fisik semata, tetapi turut memengaruhi kualitas proses pembelajaran, semangat belajar peserta didik, serta kinerja tenaga pendidik.³ Ketika satuan pendidikan tidak didukung dengan sarana yang memadai seperti ruang belajar yang layak, akses internet, peralatan laboratorium, serta fasilitas sanitasi maka pembelajaran menjadi tidak efektif, dan secara tidak langsung menciptakan ketimpangan hasil belajar antarwilayah. Hal ini menghambat terwujudnya prinsip *equal opportunity* dalam pendidikan sebagaimana dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tabel 1.1 Kebijakan Nasional yang Berpengaruh terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Indonesia.⁴

No.	Nama Kebijakan	Isi Utama/Lingkup	Sumber
1.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)	Menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, adil dan merata, serta mengatur standar nasional pendidikan.	Kemendikbud.go.id
2.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan wajib bidang pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah.	jdih.kemendagri.go.id
3.	Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	Menyasar pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung karakter peserta didik, terutama melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.	peraturan.bpk.go.id
4.	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024	Menargetkan peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan sekolah baru di daerah 3T.	Bappenas.go.id

³ Chika Maharani et al., “Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif,” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 3 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>.

⁴ Kemendikbud. Kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan indonesia. 2025. <https://www.kemdikbud.go.id/>. (dikases 18 april 2025)

No.	Nama Kebijakan	Isi Utama/Lingkup	Sumber
5.	Permendikbud No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan	Mengatur penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan secara prioritas berdasarkan data kebutuhan.	peraturan.bpk.go.id
6.	Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Menetapkan standar minimal infrastruktur pendidikan yang harus dipenuhi setiap sekolah untuk menjamin mutu dan pemerataan layanan pendidikan.	Kemendikbudristek.go.id
7.	Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat	Memperkuat pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah tertinggal melalui intervensi khusus dan pembangunan berbasis wilayah.	Setkab.go.id
8.	Program Sekolah Penggerak (Kemendikbudristek)	Mendorong transformasi satuan pendidikan dengan dukungan infrastruktur dan teknologi, terutama di daerah yang masih minim fasilitas.	sekolah.penggerak.

Meskipun kebijakan pendidikan nasional telah mencakup berbagai dimensi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan besar. Implementasi kebijakan di daerah seringkali belum mengedepankan prinsip keadilan spasial dan kontekstual.⁵ Artinya, perencanaan pembangunan pendidikan belum sepenuhnya disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan aktual sekolah-sekolah di tiap wilayah kecamatan. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran atau pelosok cenderung tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, sementara sekolah-sekolah di wilayah ibu kota kabupaten lebih diutamakan. Hal ini berpotensi memperbesar kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya.

Realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok dalam pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik geografis yang menantang, seperti Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.⁶ Kabupaten ini memiliki topografi perbukitan dan kondisi aksesibilitas antarwilayah yang tidak merata, yang secara langsung maupun tidak

⁵ Rehabeam Lumban Gaol, "Pendekatan Strategis dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh di Kabupaten Muna," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1194–206, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1317>.

⁶ Gatot Suprasetya, "Optimalisasi Tata Kelola Pembangunan Di Daerah Otonomi Baru (Dob) Papua Guna Menjaga Keutuhan Nkri," n.d.

langsung berdampak pada ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa kecamatan di Kabupaten Kepahiang mengalami kekurangan ruang kelas, fasilitas laboratorium, perpustakaan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan modern.

Tabel 1.2 Laporan Data Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah di Kabupaten Kepahiang tahun 2023.⁷

Jenis Kegiatan Infrastruktur	Jumlah Sekolah Terlibat	Wilayah Sasaran	Anggaran (dalam Rp)	Capaian Fisik (%)	Sumber Data
Pembangunan Sekolah Baru	5 sekolah	Kecamatan Bermani Ilir, Tebat Karai	2,5 Miliar	100%	RLPPD Kabupaten Kepahiang, 2023
Rehabilitasi Bangunan SD	12 sekolah	Kecamatan Kepahiang, Muara Kemumu	1,8 Miliar	90%	BPS Kepahiang, Statistik Kesejahteraan Rakyat
Renovasi Fasilitas Sanitasi Sekolah	8 sekolah	Kecamatan Seberang Musi, Kabawetan	750 Juta	85%	Dinas Pendidikan Kepahiang
Penyediaan Alat Teknologi Pendidikan	15 sekolah	Seluruh Kabupaten	1,2 Miliar	95%	RLPPD Kabupaten Kepahiang
Perbaikan Atap dan Dinding Sekolah Menengah	10 sekolah	Kecamatan Ujan Mas, Merigi	1,5 Miliar	80%	Dinas Pendidikan Kepahiang
Penambahan Ruang Kelas Baru	6 sekolah	Kecamatan Kepahiang, Seberang Musi	2 Miliar	100%	BPS Kepahiang, Statistik Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan observasi awal dan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, masih ditemukan sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas rusak berat, kekurangan sanitasi yang layak, minimnya sarana olahraga, serta belum terintegrasinya pengelolaan data kebutuhan infrastruktur secara terpusat dan responsif. Padahal, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sektor pendidikan telah diidentifikasi sebagai sektor

⁷ BPS Kepahiang. Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2025. <https://kepahiangkab.bps.go.id/id> (diakses 17 Maret 2025).

prioritas untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pemerataan infrastruktur pendidikan.⁹

Ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang juga menjadi perhatian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang mencatat terdapat 103 Sekolah Dasar (SD) dan 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut. Namun, sekitar 20% dari sekolah-sekolah tersebut memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar pelayanan pendidikan yang layak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah ini mencakup keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, serta minimnya tenaga pengajar di daerah terpencil.¹⁰

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah dan Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Kepahiang 2024.¹¹

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Sekolah yang Membutuhkan Perbaikan (%)
SD	103	20%
SMP	30	18%
SMA/SMK	25	15%

⁸ Nina Minawati Muhaemin, “Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?,” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (February 7, 2021): 201–22, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>.

⁹ Ismail Marzuki and Lukmanul Hakim, “Evaluasi Pendidikan Islam,” *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 1, no. 1 (April 5, 2019), <https://doi.org/10.31000/jkip.v1i1.1498>.

¹⁰ Yacob Noho Nani, “Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo),” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 231, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>.

¹¹ Pemkab Kepahiang. Jumlah Sekolah dan Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Kepahiang. 2024. <https://kepahiangkab.go.id/> (diakses 25 Maret 2025).

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan 16 program prioritas untuk periode 2025–2030, salah satunya adalah peningkatan infrastruktur dasar di bidang pendidikan (Pembkab Kepahiang, 2024). Program ini diharapkan dapat mengatasi disparitas infrastruktur pendidikan antarwilayah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepahiang. Meskipun sudah ada upaya peningkatan, tantangan pemerataan infrastruktur pendidikan masih terlihat dari ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi digital.¹²

Tabel 1.4 Perbandingan Fasilitas Sekolah Perkotaan dan Pedesaan tahun 2024.¹³

Jenjang Pendidikan	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
SD dengan Laboratorium	85%	45%
SMP dengan Perpustakaan	90%	50%
SMA dengan Akses Internet	95%	55%

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih berada dalam kondisi yang tidak layak, dengan bangunan yang rusak, kekurangan ruang kelas, serta minimnya fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga pendidikan. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar dan menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Selain itu, akses terhadap teknologi pendidikan, seperti komputer dan internet, sangat terbatas di banyak sekolah, sehingga siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan kesempatan

¹² Ahmad Subair, “Sejarah Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi,” no. 5 (2024).

¹³ Pemkab kepahiang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten kepahiang. 2023. <https://kepahiangkab.go.id/> (diakses 25 Maret 2025).

yang sama untuk belajar menggunakan teknologi modern.¹⁴ Kabupaten Kepahiang, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur pendidikan. Di sisi kebijakan, keterbatasan anggaran dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sering kali menghambat implementasi program-program pendidikan.¹⁵

Tabel 1.5 Laporan Alokasi Anggaran Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Berdasarkan Informasi dari APBD Dan RKPD.¹⁶

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Deskripsi	Sumber Data
Rehabilitasi Bangunan Sekolah Dasar (SD)	1.2 Miliar	Perbaikan gedung dan fasilitas dasar SD untuk meningkatkan kenyamanan belajar	RKPD Kabupaten Kepahiang 2023 kepahiangkab.go
Pembangunan Infrastruktur Sekolah Menengah Pertama (SMP)	800 Juta	Pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas umum lainnya	APBD Kabupaten Kepahiang 2023 bkd.kepahiangkab.go
Program Beasiswa untuk Siswa Kurang Mampu	600 Juta	Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu	RKPD Kabupaten Kepahiang 2023 kepahiangkab.go
Pelatihan Guru dan Tenaga Pengajar	450 Juta	Pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan	APBD Kabupaten Kepahiang 2023 bkd.kepahiangkab.go
Penyediaan Sarana Teknologi Pendidikan	500 Juta	Pengadaan perangkat teknologi, seperti komputer dan internet sekolah	RLPPD Kabupaten Kepahiang kepahiangkab.go
Pengadaan Buku dan Alat Tulis Sekolah	300 Juta	Mendukung siswa dalam mendapatkan akses alat tulis dan buku pelajaran	BPS Kabupaten Kepahiang, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023 bkd.kepahiangkab.go
Program Literasi dan Numerasi	250 Juta	Meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung siswa	RLPPD Kabupaten Kepahiang 2023 kepahiangkab.go
Kegiatan Ekstrakurikuler dan Pengembangan Karakter	200 Juta	Mendukung program pengembangan minat, bakat, dan karakter siswa	RKPD Kabupaten Kepahiang 2023 kepahiangkab.go

¹⁴ Qaulan Raniyah, “Peran Teknologi dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan” 3 (2024).

¹⁵ Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd Edition)*, n.d.

¹⁶ Pemkab Kepahiang. RKPD Kabupaten Kepahiang 2023. 2025. <https://kepahiangkab.go.id/> (diakses 25 Maret 2025).

Meskipun anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru dan staf administratif, sehingga dana yang tersisa untuk program pemerataan infrastruktur pendidikan sangat terbatas. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah menyebabkan program-program yang dirancang untuk mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan sering kali tidak berjalan efektif atau tidak tepat sasaran.¹⁷

Tabel 1.6 Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024.¹⁸

Jenjang Pendidikan Alokasi Anggaran (Rp)	
PAUD	1.200.000.000
SD	5.500.000.000
SMP	3.800.000.000
SMA	2.000.000.000
SMK	1.500.000.000
Perpustakaan	500.000.000
Total	14.500.000.000

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pengalokasian anggaran pendidikan harus diperhatikan.¹⁹ Berdasarkan data APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2024, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 18% dari total APBD, yang masih berada di bawah standar nasional sebesar 20%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan penganggaran agar sektor pendidikan mendapatkan prioritas yang lebih optimal.

¹⁷ Linda Darling-Hammond, *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*, n.d.

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2024. (diakses 18 april 2025)

¹⁹ Nani, "Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)."

Tabel 1.7 Hasil Kebijakan Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang 2019-2023.²⁰

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Sumber Data
Angka Partisipasi Kasar SD (%)	98.5	99.2	99.3	99.5	99.7	Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 BPS Kepahiang
Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	85.4	86.0	87.2	88.5	89.7	Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023 BPS Kepahiang
Rasio Guru-Siswa SD	1:25	1:24	1:24	1:23	1:23	Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 BPS Kepahiang
Jumlah Sekolah SD yang Direhabilitasi	5	7	10	12	15	Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023 BPS Kepahiang
Angka Putus Sekolah SD (%)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 BPS Kepahiang
Anggaran Pendidikan (Miliar Rp)	50	52	55	58	60	Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023 BPS Kepahiang
Program Pelatihan Guru	200 peserta	250 peserta	300 peserta	320 peserta	350 peserta	Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 BPS Kepahiang
Penyediaan Teknologi Pendidikan (unit komputer)	50	75	100	125	150	Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2023 BPS Kepahiang
Angka Partisipasi Kasar SMA (%)	78.2	79.1	80.5	81.9	83.0	Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 BPS Kepahiang

Hasil dari implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA meningkat dari 65% pada tahun 2022 menjadi 72% pada tahun 2024. Selain itu, jumlah sekolah yang telah direnovasi meningkat dalam tiga tahun terakhir. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan strategis. Selain itu, kolaborasi

²⁰ BPS Kepahiang. Hasil Kebijakan Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang 2019-2023. 2025. <https://kepahiangkab.bps.go.id/id> (diakses 17 Maret 2025).

yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara holistik.²¹

Kondisi ini menegaskan pentingnya reformulasi pendekatan implementasi kebijakan pendidikan yang lebih berbasis data, kebutuhan lokal, serta mengedepankan prinsip keadilan antarwilayah (equity).²² Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bertindak sebagai eksekutor program-program pusat, tetapi juga memiliki inisiatif dan inovasi kebijakan berdasarkan pemahaman lokalitas daerahnya. Dalam konteks Kabupaten Kepahiang, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan, serta lembaga pengawas internal daerah menjadi sangat strategis untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya tersusun baik secara dokumen, namun juga efektif dalam pelaksanaan dan terukur dalam pencapaiannya.

Lebih lanjut, dalam kerangka desentralisasi, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya, baik anggaran, tenaga, maupun kolaborasi lintas sektor.²³ Oleh karena itu, perlu ditinjau sejauh mana kapasitas kelembagaan di Kabupaten Kepahiang mampu mengelola program pembangunan infrastruktur pendidikan secara merata dan berkelanjutan. Di tengah gencarnya program pembangunan nasional seperti revitalisasi sekolah, penguatan pendidikan karakter, dan digitalisasi pendidikan, Kabupaten Kepahiang sebagai bagian dari daerah non-

²¹ Steven J. Klees et al., *The World Bank and Education: Critiques and Alternatives*, Comparative and International Education, A Diversity of Voices 14 (SensePublishers, 2012), <https://doi.org/10.1007/978-94-6091-903-9>.

²² Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," n.d.

²³ Bagja Waluya, "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Masyarakat Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran," *Jurnal Geografi Gea* 9, no. 1 (March 14, 2016), <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1683>.

metropolitan memerlukan pendekatan yang khas. Pendekatan ini harus mempertimbangkan konteks geografi, demografi, ekonomi, dan sosial budaya setempat agar implementasi kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil satuan pendidikan.²⁴

Kebijakan yang telah digariskan dalam berbagai regulasi daerah sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-instansi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, hingga minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi kebijakan tersebut.²⁵ Di sisi lain, beberapa sekolah justru mampu menunjukkan kemajuan dalam pengembangan infrastruktur berkat dukungan komunitas lokal dan sinergi antara kepala sekolah, komite, dan pemerintah desa, yang menjadi indikasi penting bahwa konteks lokal sangat berperan dalam keberhasilan kebijakan daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap bagaimana kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan diimplementasikan di Kabupaten Kepahiang dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika kebijakan publik di level daerah, mengevaluasi praktik pelaksanaannya, serta memberikan masukan konstruktif guna penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

²⁴ Amin Abdullah, *Implementasi pendekatan integratif-interkonektif dalam kajian pendidikan Islam*, ed. H. Maragustam (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

²⁵ Djufri Rays Pattilouw, "Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan," *Jurnal Cita Ekonomika* 12, no. 1 (May 1, 2018): 13–26, <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v12i1.2224>.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang, dengan harapan dapat menghasilkan temuan-temuan empirik yang bermanfaat sebagai rekomendasi kebijakan dan kontribusi keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan dan kebijakan publik.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam bidang pendidikan serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi pemerataan infrastruktur pendidikan. Fokus juga diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan antarwilayah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian ini, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang?
3. Bagaimana implikasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan terkait infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.
- b. Mendeskripsikan kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.
- c. Menjelaskan implikasi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait dengan kebijakan pendidikan dan pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah.
- 2) Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi studi-studi lebih lanjut yang membahas kebijakan publik dan implementasinya di sektor pendidikan, terutama di wilayah yang memiliki kesenjangan infrastruktur pendidikan yang tinggi.

b. Manfaat Praktis

- 1) **Bagi Pemerintah Daerah:** Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pendidikan untuk mencapai pemerataan infrastruktur yang lebih baik. Temuan penelitian dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.
- 2) **Bagi Masyarakat:** Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran kebijakan pendidikan dalam mempengaruhi pemerataan infrastruktur pendidikan dan bagaimana mereka bisa terlibat aktif dalam mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan.
- 3) **Bagi Sektor Swasta dan Pemangku Kepentingan:** Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sektor swasta dan pemangku kepentingan lain untuk memahami area di mana mereka dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung peningkatan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

a. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu di masyarakat. Menurut Thomas Dye dalam Agil Nanggala (1972), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Definisi ini menekankan bahwa kebijakan melibatkan keputusan yang terarah dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Dunn dalam Agil Nanggala (2018) memperluas pengertian ini dengan menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan konkret, tetapi juga prinsip-prinsip yang mendasari keputusan pemerintah. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik diarahkan untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang kompeten.²⁶

Proses formulasi kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan yang sistematis. Menurut Anderson dalam Anisa Amalia Maisaroh and Sri Untari (1975), proses ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, perumusan alternatif solusi, dan pengambilan keputusan. Tahap awal berfokus pada

²⁶ Agil Nanggala, "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia" 8, no. 2 (2020).

pengenalan isu strategis yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Selanjutnya, data dan informasi dikumpulkan untuk memahami akar permasalahan dan menciptakan berbagai opsi kebijakan. Langkah terakhir adalah pemilihan alternatif terbaik melalui proses politik, konsultasi publik, atau keputusan administratif. Dalam konteks kebijakan pendidikan, proses formulasi sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

Pendekatan kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai model. Salah satu model yang sering digunakan adalah model top-down dan bottom-up. Model top-down, seperti yang dijelaskan oleh Sabatier dalam Sarnita Sarnita and Eka Titi Andaryani (1986), melihat implementasi kebijakan sebagai proses linear yang dimulai dari kebijakan pusat dan diterapkan hingga level lokal. Sebaliknya, model bottom-up menekankan pentingnya masukan dari pelaksana kebijakan di tingkat bawah, seperti guru dan kepala sekolah, untuk menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan. Selain itu, pendekatan analitis dan partisipatif juga digunakan. Pendekatan analitis berfokus pada data dan bukti ilmiah, sedangkan pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses kebijakan, terutama dalam isu sensitif seperti pendidikan.²⁸

²⁷ Anisa Amalia Maisaroh and Sri Untari, "Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, June 30, 2024, 18–30, <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4347>.

²⁸ Sarnita Sarnita and Eka Titi Andaryani, "Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 11 (2023): 1183–93, <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i11.2233>.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses dinamis yang mencakup pelaksanaan keputusan politik dan administrasi dalam bentuk program-program pemerintah.²⁹ Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Safrida, Nila Safrida, and Muhammad Muhammad (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan kelompok lain untuk mencapai tujuan kebijakan. Mereka mengembangkan model implementasi yang terdiri dari enam variabel penting:

- 1) Tujuan dan standar kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik badan pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi
- 5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
- 6) Disposisi atau sikap pelaksana

Implementasi kebijakan pendidikan sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah masalah anggaran, di mana alokasi dana untuk sektor pendidikan sering kali tidak memadai atau tidak merata, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur yang terbatas juga menjadi kendala besar, seperti kekurangan sekolah, sarana teknologi, dan transportasi, yang menghambat akses siswa ke fasilitas pendidikan. Selain itu, kekurangan tenaga pendidik berkualitas dan distribusi guru

²⁹ Safrida - et al., "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat," *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 2 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6027>.

yang tidak merata memperburuk kesenjangan pendidikan antarwilayah.³⁰ Kendala lainnya adalah hambatan sosial dan budaya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau praktik diskriminasi yang membatasi akses kelompok tertentu. Menurut Grindle dalam Delipiter Lase et al (1980), implementasi kebijakan juga dapat terganggu oleh resistensi dari para pelaksana yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi lokal.³¹ Model ini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya persoalan menjalankan perintah, tetapi juga sangat tergantung pada sumber daya, komunikasi, dan koordinasi lintas lembaga.

b. Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier merupakan salah satu kerangka teori yang paling banyak digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik diimplementasikan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah yang ditangani, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan pelaksanaan, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi proses implementasi.³²

³⁰ Delipiter Lase et al., "Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045," *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 114–29, <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i2.18>.

³¹ Rizki Erdayani et al., "Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia," *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 3 (2023): 55–68, <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>.

³² Syahrul Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>.

Kelompok variabel pertama adalah karakteristik masalah yang ditangani atau tractability of the problem. Variabel ini mencakup sejauh mana suatu masalah dapat diselesaikan melalui kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini ditentukan oleh tingkat kesepakatan terhadap tujuan kebijakan, kompleksitas teknis dari permasalahan, jumlah aktor yang terlibat, serta seberapa mudah perilaku dari kelompok sasaran dapat diubah. Dalam konteks pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, masalah ini dapat dikategorikan sebagai kompleks karena melibatkan banyak pihak, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kondisi geografis antar wilayah.³³

Variabel kedua adalah kemampuan kebijakan atau peraturan untuk mengarahkan pelaksanaan atau ability of the statute to structure implementation. Ini berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang dirancang mampu memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Beberapa unsur yang dinilai di dalamnya adalah kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, legitimasi lembaga pelaksana, ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan tenaga, serta adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan yang memadai. Dalam penelitian ini, perlu dianalisis apakah kebijakan pendidikan daerah Kabupaten Kepahiang telah memiliki struktur dan mekanisme pelaksanaan yang kuat dan efektif untuk mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan.³⁴

³³ Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>"

³⁴ Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>"

Kelompok variabel ketiga adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi atau non-statutory variables affecting implementation. Kelompok ini mencakup faktor-faktor eksternal yang berada di luar substansi kebijakan namun sangat memengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut meliputi dukungan dari elit politik dan pejabat publik, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, stabilitas sosial-politik daerah, serta kompetensi dan komitmen dari birokrasi pelaksana. Dalam konteks pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, dukungan dari kepala daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi.³⁵

Teori Mazmanian dan Sabatier memberikan kerangka konseptual yang sistematis dan mendalam untuk memahami proses implementasi kebijakan secara menyeluruh. Ketiga kelompok variabel tersebut dapat dijadikan acuan untuk merumuskan indikator-indikator penelitian, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek mana yang mendukung dan menghambat proses pemerataan infrastruktur pendidikan. Misalnya, indikator tractability of the problem dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kompleksitas geografis dan distribusi kebutuhan infrastruktur memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kemudian, ability of the statute dapat dianalisis melalui kejelasan regulasi, alokasi anggaran,

³⁵ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>"

dan koordinasi antar instansi. Sedangkan variabel kondisi sosial-politik dapat dinilai dari partisipasi pemangku kepentingan dan dukungan pemerintah daerah.³⁶

Penerapan teori Mazmanian dan Sabatier dalam penelitian ini sangat relevan karena memberikan panduan analitis yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan daerah. Dengan memetakan variabel-variabel yang memengaruhi implementasi, peneliti dapat menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang lebih terarah. Teori ini juga membantu dalam menilai seberapa besar implikasi dari kebijakan tersebut terhadap upaya pemerataan infrastruktur pendidikan, baik dari sisi fisik seperti bangunan sekolah, sarana pembelajaran, dan akses teknologi, maupun dari sisi non-fisik seperti peran serta masyarakat dan dukungan birokrasi.³⁷

Dalam konteks kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah mengimplementasikan kebijakan secara tepat dalam menjawab ketimpangan infrastruktur antar wilayah. Apakah ada kejelasan tujuan kebijakan, koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, teori Mazmanian dan Sabatier dapat dijadikan landasan konseptual yang kuat dalam membedah permasalahan dan memberikan solusi terhadap isu pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah.

³⁶ Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis" "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>."

³⁷ Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis" "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>."

c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan publik. Menurut Rondinelli dalam Sarnita and Titi Andaryani (1981), desentralisasi melibatkan transfer fungsi administratif, politik, dan fiskal kepada unit pemerintahan lokal atau masyarakat. Tujuan utama desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dalam konteks pendidikan, desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada komunitas lokal sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah.³⁸

Pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah merupakan bagian dari implementasi desentralisasi pemerintahan.³⁹ Cheema dan Rondinelli dalam H.Sulaiman L. Azis (1983) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintahan yang lebih rendah, baik secara administratif maupun politik. Dalam konteks Indonesia, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini memberikan ruang bagi daerah untuk:

- 1) Menentukan prioritas pembangunan pendidikan sesuai kondisi lokal.

³⁸ Sarnita and Titi Andaryani, "Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa." "Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 11 (November 25, 2023): 1183–93, <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i11.2233>

³⁹ H.Sulaiman L. Azis, "Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, Dan Kendalanya," *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 10, no. 2 (October 29, 2019): 167, <https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v10i2.121>.

- 2) Mengalokasikan anggaran secara mandiri.
- 3) Menyusun program perbaikan mutu pendidikan dan infrastruktur.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merencanakan, mendanai, dan mengelola pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan, memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, dan mengembangkan kurikulum lokal sesuai kebutuhan komunitas.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator untuk mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga swasta dan masyarakat, guna memperluas akses pendidikan yang berkualitas.⁴¹ Namun, keberhasilan otonomi daerah dalam pendidikan juga sangat bergantung pada kapasitas teknis dan manajerial daerah itu sendiri.

d. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah

Kebijakan pendidikan nasional mengarahkan tujuan besar sistem pendidikan nasional, seperti tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak warga negara atas pendidikan bermutu dan merata. Namun, agar kebijakan nasional tersebut dapat dijalankan di tingkat lokal, dibutuhkan kebijakan turunan daerah yang sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi teknis

⁴⁰ emmi Kholilah Harahap, "Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 1, no. 02 (December 2, 2016): 137, <https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.104>.

⁴¹ Dewi Sinta and Fadillah Zulfa Naftali, "Optimalisasi Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Program 4 P Guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang," no. 2 (2024).

melalui peraturan daerah, peraturan bupati, hingga kebijakan operasional di Dinas Pendidikan. Koherensi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur pendidikan.⁴²

Di tingkat implementasi daerah, kebijakan pendidikan nasional harus dielaborasi menjadi kebijakan operasional melalui perencanaan pembangunan daerah, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dan penganggaran melalui APBD. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal, namun tetap mengacu pada regulasi nasional. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama karena setiap daerah memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan nasional sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan mekanisme koordinasi lintas sektor.⁴³

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat dalam rangka mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan. Dalam beberapa kebijakan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan, peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam pengusulan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pemerintah pusat memberikan kerangka, pedoman, dan dana

⁴² Naila Najma Alifa, "Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 38, no. 1 (2024).

⁴³ Erdayani et al., "Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia."

stimulan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas identifikasi kebutuhan sekolah, penentuan prioritas, serta pengawasan pelaksanaan proyek. Ketimpangan dalam kapasitas daerah dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak merata atau tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada keberhasilan program pemerataan pendidikan secara nasional yang ditujukan untuk daerah yang mempunyai otonomi khusus dalam membuat kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.⁴⁴

e. Anggaran dan Manajemen Keuangan Daerah

Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecukupan dan efektivitas penggunaan anggaran.⁴⁵ Dalam teori keuangan publik, Musgrave dalam Ahmad Mustanir menyatakan bahwa fungsi alokasi pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa publik secara efisien, termasuk layanan pendidikan. Di Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Namun, besarnya anggaran bukan satu-satunya indikator keberhasilan implementasi. Manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan riil (*evidence-based budgeting*) merupakan kunci penting dalam mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁴ Alfariq Ramadani and Roha Purnama Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 10, no. 1 (2024): 40–49, <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.13523>.

⁴⁵ Ahmad Mustanir, "Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang," n.d.

dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran daerah secara mandiri namun tetap selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam konteks pemerataan infrastruktur pendidikan, kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan dilakukan secara merata dan antarwilayah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan atau satuan pendidikan.⁴⁶

Manajemen keuangan daerah juga mencakup prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang harus diwujudkan dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Instrumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pilar utama dalam menyelaraskan tujuan pembangunan pendidikan dengan ketersediaan sumber daya fiskal daerah. Kegagalan dalam menyusun prioritas atau rendahnya kapasitas kelembagaan daerah sering kali menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi program pembangunan infrastruktur pendidikan, yang pada akhirnya menghambat upaya pemerataan akses pendidikan.⁴⁷

Dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) menjadi bagian penting dalam mendukung

⁴⁶ Intan Sengaji and Nur Fadjrih Asyik, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa" 7 (2018).

⁴⁷ suprasetya, "Optimalisasi Tata Kelola Pembangunan Di Daerah Otonomi Baru (Dob) Papua Guna Menjaga Keutuhan Nkri."

anggaran pendidikan di daerah, terutama untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan, misalnya, secara khusus ditujukan untuk mendukung penyediaan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat tergantung pada perencanaan berbasis data, pengawasan lapangan, serta kemampuan daerah dalam menyerap anggaran secara tepat waktu dan sesuai sasaran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori anggaran dan manajemen keuangan daerah menjadi penting dalam menilai seberapa jauh kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan di daerah seperti Kabupaten Kepahiang.⁴⁸

f. Kolaborasi dan Peran Stakeholder

Kebijakan publik yang bersifat kompleks menuntut adanya kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*). Menurut Bryson dan Crosby dalam Tince Ajeng Yurika et al, keterlibatan berbagai aktor dalam proses kebijakan (seperti pemerintah, masyarakat, sekolah, dan dunia usaha) akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Dalam konteks pendidikan daerah, pelibatan masyarakat melalui komite sekolah, forum musrenbang, serta kerja sama dengan sektor swasta (CSR) sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah tertinggal atau terpencil.⁴⁹

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengacu pada keterlibatan aktif individu, kelompok, atau komunitas dalam mendukung proses pendidikan, baik

⁴⁸ Intan Sengaji and Nur Fadjrih Asyik, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa" 7 (2018).

⁴⁹ Tince Ajeng Yurika et al., "Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang," . . . *September*, no. 1 (n.d.).

secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁰ Partisipasi masyarakat meliputi kontribusi berupa waktu, tenaga, materi, atau ide yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pengelolaan sekolah, pemberian bantuan dana, penyediaan fasilitas pendidikan, atau pelibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Dengan keterlibatan masyarakat, pendidikan menjadi lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga membantu menciptakan solusi yang sesuai dengan tantangan daerah masing-masing.⁵¹

Pemberdayaan komunitas dalam pendidikan menekankan pada peran tokoh masyarakat, orang tua, dan organisasi lokal dalam mendukung pemerataan pendidikan. Freire dalam Saiful Hudodo and Fory Armin Naway mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tidak hanya membantu mengatasi hambatan struktural, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan. Dalam konteks ini, program seperti sekolah berbasis masyarakat, pelatihan orang tua, dan pembentukan kelompok belajar lokal sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.⁵² Pendekatan ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memberikan solusi yang berkelanjutan untuk masalah pendidikan di daerah mereka.

⁵⁰ Sumarto Sumarto and Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 4, no. 01 (2019): 21, <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1488>.

⁵¹ Fatimatuzzahrah Fatimatuzzahrah et al., "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2, no. 1 (2023): 43–53, <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2339>.

⁵² Saiful Hudodo and Fory Armin Naway, "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato," 2022.

Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pendidikan, atau public-private partnership (PPP), adalah strategi yang melibatkan sektor swasta dalam mendukung kebijakan dan program pendidikan.⁵³ Menurut LaRocque dalam Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, Evis Satispi, and Azhari Aziz Samudra, PPP dapat mencakup pendanaan, penyediaan fasilitas, dan pengelolaan sekolah melalui model kerjasama yang saling menguntungkan. Sektor swasta, melalui inisiatif seperti tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dengan menyediakan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan program beasiswa. Kemitraan ini mempercepat pemerataan pendidikan, khususnya di daerah terpencil, dengan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara optimal.⁵⁴

g. Infrastruktur Pendidikan dan Pemerataannya

Pemerataan infrastruktur pendidikan mengacu pada upaya untuk memastikan semua peserta didik, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan yang layak.⁵⁵ Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Tilaar). Menurut Bappenas dalam Arif Ridha (2021), pemerataan infrastruktur adalah bagian dari strategi pembangunan inklusif, yang mencakup distribusi sarana pendidikan secara adil dan proporsional.

⁵³ Deddi Fasmadhy Satiadharmanto et al., *Public Private Partnership dalam Pendidikan Vokasi: Peran Ketua Rukun Tetangga pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili di Perumnas Klender*, 1, no. 3 (2023).

⁵⁴ Yurika et al., "Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang."

⁵⁵ Arif Ridha, "Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)," n.d.

Ketimpangan infrastruktur dapat memperparah kesenjangan kualitas pendidikan dan berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial.

Infrastruktur pendidikan merupakan sarana dan prasarana fisik yang menunjang proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, hingga akses internet.⁵⁶ Menurut *UNESCO* dalam Wildan Nuril Ahmad Fauzi and Yuli Setiawati, infrastruktur pendidikan yang layak secara langsung memengaruhi mutu proses belajar-mengajar. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah dapat menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan. Oleh karena itu, prinsip pemerataan infrastruktur pendidikan harus menjadi bagian integral dari kebijakan daerah, melalui intervensi anggaran, distribusi proyek pembangunan, dan prioritas daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Teori pemerataan (*Equity Theory*) oleh Adams dalam Toto Purwanto, Utang Suwaryo, and Rahman Mulyawan (1963) menyatakan bahwa keadilan terjadi ketika distribusi sumber daya didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks pendidikan, teori ini mengarahkan agar kebijakan infrastruktur tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah. Keadilan distributif dalam pembangunan pendidikan berarti daerah terpencil atau tertinggal yang sebelumnya kurang mendapat perhatian harus mendapatkan prioritas dalam distribusi infrastruktur dan sumber daya pendidikan.⁵⁷

⁵⁶ Wildan Nuril Ahmad Fauzi and Yuli Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*, 2024.

⁵⁷ Toto Purwanto, Utang Suwaryo, and Rahman Mulyawan, "Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3, no. 1 (May 14, 2020): 58, <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.26379>.

h. Kesimpulan Kajian Teori

Berdasarkan kajian teori yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, yang sangat dipengaruhi oleh regulasi, anggaran, kelembagaan, serta keterlibatan berbagai stakeholder. Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, kejelasan peraturan teknis, serta keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam merencanakan dan mengelola kebijakan pendidikan, termasuk dalam upaya pemerataan infrastruktur pendidikan yang adil dan merata.

Tiga aspek utama yang menjadi kunci efektivitas pelaksanaan kebijakan ini adalah regulasi yang sinkron dan jelas, kecukupan serta efisiensi alokasi anggaran pendidikan, dan koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, sekolah, masyarakat, serta sektor swasta. Pemerataan infrastruktur pendidikan pada akhirnya menjadi indikator nyata keberhasilan kebijakan tersebut, karena berimplikasi langsung terhadap keadilan akses dan mutu pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh peserta didik, tanpa memandang kondisi geografis maupun sosial.

Implementasi kebijakan pendidikan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, merupakan proses yang kompleks yang menuntut keselarasan regulasi, kecukupan anggaran, dan koordinasi antar pemangku kepentingan demi mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial memiliki landasan kuat

dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan merata.

1) Prinsip Keadilan dalam Pemerataan Pendidikan

Allah Swt. berfirman:

﴿يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).⁵⁸

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, harus berlandaskan prinsip keadilan. Pemerataan infrastruktur pendidikan adalah bentuk konkret dari pelaksanaan keadilan dalam akses terhadap layanan pendidikan, agar seluruh peserta didik di berbagai daerah memperoleh hak yang setara tanpa diskriminasi sosial ataupun geografis.

2) Amanah dan Tanggung Jawab Pemimpin

Allah Swt. Berfirman:

﴿يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا عَدْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

ظَلَمَ بِنَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

⁵⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nahl [16]: 90. *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”*

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).⁵⁹

Kebijakan pendidikan merupakan amanah besar yang diemban oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Amanah ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal pengalokasian anggaran yang efisien dan regulasi yang jelas. Ketika amanah ini dilaksanakan dengan baik, akan terwujud tata kelola pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas.

Rasulullah bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba (pekerja) adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai

⁵⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

pertanggungjawaban atasnya.”(HR. Bukhari No.893 dan Muslim No.1829).⁶⁰

Hadis ini mempertegas pentingnya tanggung jawab moral dan sosial bagi para pemangku kebijakan dalam mengelola sistem pendidikan secara adil dan merata.

3) Musyawarah dan Kolaborasi Antar Stakeholder

Allah Swt. Berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka..."(QS. Asy-Syura: 38).⁶¹

Pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara dinas pendidikan, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Musyawarah menjadi salah satu mekanisme penting dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan demokratis.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan daerah yang berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan kolaborasi bukan hanya mencerminkan prinsip-prinsip manajerial modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang luhur sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis.

⁶⁰ HR. Bukhari, no. 893 dan Muslim, no. 1829. "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..."

⁶¹ Al-Qur'an, Surah Asy-Syura [42]: 38. "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..."

Prinsip-prinsip tersebut memberikan pijakan spiritual dan etis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengupayakan sistem pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

h. Indikator Penelitian Berdasarkan Landasan Teori

Berikut adalah indikator-indikator utama yang dapat digunakan dalam penelitian, disusun berdasarkan dimensi teori yang telah dibahas:

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

Aspek Teoritis	Indikator Penelitian
1. Regulasi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional - Kejelasan aturan teknis pelaksanaan kebijakan - Konsistensi dan keberlanjutan regulasi daerah
2. Anggaran Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi APBD untuk pendidikan (minimal 20%) - Serapan anggaran pendidikan secara efisien dan tepat waktu - Fokus anggaran pada pembangunan infrastruktur pendidikan
3. Koordinasi Antar-Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi komite sekolah, masyarakat, dan sektor swasta - Frekuensi dan efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah daerah - Keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
4. Implementasi Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan distribusi pembangunan/rehabilitasi ruang kelas - Ketersediaan fasilitas dasar pendidikan (air bersih, sanitasi, listrik, internet) - Sebaran geografis bantuan infrastruktur ke wilayah tertinggal/perbatasan
5. Pemerataan Infrastruktur Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio fasilitas pendidikan per wilayah kecamatan - Perbandingan mutu infrastruktur antar sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan - Kepuasan sekolah dan masyarakat terhadap kondisi sarana prasarana pendidikan

2. Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

a. Pengertian Pemerataan Pendidikan

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam ridha (Kemendikbud, 2020), indikator pemerataan infrastruktur pendidikan meliputi: Rasio ruang kelas terhadap jumlah siswaⁱ, Rasio guru terhadap siswaⁱ,

Ketersediaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas TIK, Kondisi bangunan sekolah (baik, rusak ringan, rusak berat), Jarak tempuh siswa ke sekolah dan Aksesibilitas wilayah terhadap fasilitas pendidikan.⁶² Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan intervensi kebijakan dan mengukur keberhasilan program-program pembangunan infrastruktur.

Pemerataan pendidikan merujuk pada upaya sistematis untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya.⁶³ Menurut Tilaar dalam Mubarak, pemerataan pendidikan adalah aspek keadilan dalam pendidikan yang menekankan distribusi sumber daya dan layanan pendidikan secara merata agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Pemerataan pendidikan mengacu pada upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu dalam mengakses pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau gender.⁶⁴ Menurut Tilak dalam Lukman Hakim, pemerataan pendidikan melibatkan dua dimensi utama: akses dan hasil. Akses mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan, sementara hasil mencakup pencapaian yang merata dalam pendidikan, seperti partisipasi siswa dan prestasi akademik. Dalam konteks kebijakan pendidikan, pemerataan tidak hanya sekadar membuka peluang, tetapi

⁶² ridha, "Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)."

⁶³ Mubarak, "Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog."

⁶⁴ Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" 2, No. 1 (2016).

juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan manfaat yang sama dari pendidikan.⁶⁵

Pemerataan pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, akses pendidikan, yang mencakup ketersediaan infrastruktur, transportasi, dan teknologi pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kedua, kualitas pendidikan, yang meliputi distribusi tenaga pendidik berkualitas, fasilitas yang memadai, dan kurikulum yang relevan. Ketiga, hasil pendidikan, yang berfokus pada pengurangan kesenjangan dalam prestasi akademik, angka partisipasi sekolah, dan tingkat kelulusan di berbagai kelompok sosial. Menurut laporan UNESCO dalam Lase et al 2019, negara-negara yang berinvestasi pada ketiga aspek ini lebih cenderung berhasil dalam mencapai pendidikan inklusif dan berkualitas.⁶⁶

Teori pemerataan (*Equity Theory*) oleh Adams dalam Purwanto, Suwaryo, and Mulyawan menyatakan bahwa keadilan terjadi ketika distribusi sumber daya didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks pendidikan, teori ini mengarahkan agar kebijakan infrastruktur tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah. Keadilan distributif dalam pembangunan pendidikan berarti daerah terpencil atau tertinggal yang sebelumnya kurang mendapat perhatian harus mendapatkan prioritas dalam distribusi infrastruktur dan sumber daya pendidikan agar tujuan pemerataan bisa terwujud.⁶⁷

⁶⁵ risqiatul Hasanah, Muhammad Iqbal, And Irfan Noor, "Komersialisasi Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Dakwah Di Era Teknologi" 8, no. 2 (2024).

⁶⁶ Lase et al., "Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045."

⁶⁷ Purwanto, Suwaryo, and Mulyawan, "Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)."

b. Infrastruktur Pendidikan sebagai Komponen Pemerataan

Infrastruktur pendidikan mencakup seluruh fasilitas fisik yang digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, akses air bersih, listrik, dan jaringan internet.⁶⁸ *UNESCO* dalam Fauzi and Setiawat menyatakan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan merupakan faktor penentu utama dalam memastikan lingkungan belajar yang layak dan mendukung capaian pembelajaran peserta didik. Dalam konteks pemerataan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Ketimpangan dalam infrastruktur akan memperlebar kesenjangan hasil pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pemerataan infrastruktur pendidikan mengacu pada upaya untuk memastikan semua peserta didik, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan yang layak.⁶⁹ Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Tilaar). Menurut Bappenas dalam M. Ferry Irawan, Sinta Bella, and Alia Latifah, pemerataan infrastruktur adalah bagian dari strategi pembangunan inklusif, yang mencakup distribusi sarana pendidikan secara adil dan proporsional. Ketimpangan infrastruktur dapat memperparah kesenjangan kualitas pendidikan dan berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial.

⁶⁸ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

⁶⁹ M. Ferry Irawan et al., "Teachers and Parents Perceptions of the 9-Year Compulsory Education Policy in Indonesia," *Journal of Insan Mulia Education* 2, no. 2 (2024): 81–87, <https://doi.org/10.59923/joinme.v2i2.207>.

c. Keadilan Sosial dalam Pendidikan

Teori keadilan sosial oleh John Rawls dalam Alfariq Ramadani and Putri menjadi landasan penting dalam memahami pemerataan infrastruktur pendidikan. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa distribusi sumber daya publik, termasuk pendidikan, harus dilakukan sedemikian rupa agar menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam penerapannya, prinsip ini berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk mendahulukan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah yang tertinggal atau belum tersentuh layanan dasar pendidikan, demi menciptakan keadilan struktural dan peluang belajar yang setara.⁷⁰

Keadilan sosial dalam pendidikan merupakan prinsip dasar yang menuntut agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.⁷¹ Konsep ini berakar pada pandangan bahwa pendidikan bukan hanya hak individual, tetapi juga sarana strategis untuk memperbaiki kondisi sosial secara kolektif. Teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh tokoh seperti John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa alokasi sumber daya dan kebijakan harus memprioritaskan kelompok atau wilayah yang tertinggal agar dapat mengejar ketertinggalannya.

⁷⁰ Alfariq Ramadani and Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam."

⁷¹ Annisa Darma Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.

Dalam implementasinya di Indonesia, keadilan sosial dalam pendidikan dijabarkan dalam berbagai kebijakan afirmatif seperti penyediaan Dana BOS, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, dan program Indonesia Pintar. Namun, aspek infrastruktur pendidikan sering kali masih menunjukkan ketimpangan, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar. Ketimpangan ini bisa berbentuk kurangnya ruang kelas, fasilitas belajar yang tidak memadai, hingga ketiadaan sarana penunjang seperti laboratorium atau perpustakaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan juga harus diwujudkan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata dan berbasis kebutuhan riil.⁷²

Lebih jauh, keadilan sosial juga menyangkut bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin bahwa setiap anak bangsa memiliki peluang yang setara untuk berkembang. Pemerataan infrastruktur pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai jembatan akses, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermartabat. Jika ketimpangan infrastruktur terus dibiarkan, maka akan terbentuk jurang mutu antara sekolah-sekolah di wilayah maju dan tertinggal, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial dalam jangka panjang.

d. Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam dokumen-dokumen perencanaan strategis seperti

⁷² Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan, yang bertujuan untuk membantu daerah membiayai kegiatan fisik sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah pusat memberikan pedoman umum dan teknis mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana tersebut, sementara pemerintah daerah berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pendidikan dan menyusun usulan yang sesuai.⁷³

Namun, pemerataan infrastruktur pendidikan tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.⁷⁴ Banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya data yang valid tentang kebutuhan sarana-prasarana, keterbatasan sumber daya manusia di daerah dalam mengelola program infrastruktur, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, pendekatan yang masih bersifat *top-down* kadang kurang memperhatikan konteks lokal, sehingga program pembangunan fisik tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil sekolah-sekolah, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal (*bottom-up planning*) dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan.

Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mendorong pemerataan infrastruktur pendidikan melalui digitalisasi data, seperti

⁷³ - et al., "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat."

⁷⁴ Meysi Christi Rolos, Johny H Posumah, and Very Y Londa, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara.," no. 113 (n.d.).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Melalui sistem ini, pemerintah berusaha mendeteksi ketimpangan dan kekurangan fasilitas secara lebih akurat. Di samping itu, kebijakan afirmatif seperti Program Sekolah Penggerak, Zonasi Pendidikan, dan penguatan peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat daerah turut berkontribusi dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur secara lebih merata dan berkeadilan. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan infrastruktur pendidikan.⁷⁵ Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi telah menunjukkan komitmennya dalam pemerataan infrastruktur pendidikan antara lain:⁷⁶

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan secara adil.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang secara berkala menargetkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, sebagai instrumen fiskal untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

Namun, realisasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran yang menghambat penyediaan sarana dan prasarana secara optimal, hambatan geografis yang menyulitkan distribusi pembangunan ke daerah terpencil, serta

⁷⁵ Emmi Kholilah Harahap and Sumarto Sumarto, "Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Upaya Benchmarking," *Jurnal Literasiologi* 3, no. 3 (June 16, 2020), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i3.108>.

⁷⁶ Ji H Soedarto and Kode Pos, *Tiara Hasna Raharja**, *Puji Astuti***, *Lusia Astrika***) Email: tiarahasna12@gmail.com, n.d.

lemahnya tata kelola pemerintahan daerah yang berdampak pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur pendidikan yang kurang efektif dan tidak merata.

e. Dampak Ketimpangan Infrastruktur Terhadap Akses dan Mutu Pendidikan

Ketimpangan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi disparitas akses dan mutu pendidikan antarwilayah. Sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau tertinggal sering kali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana seperti gedung yang tidak layak, kurangnya ruang kelas, fasilitas sanitasi yang buruk, serta minimnya sarana penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan. Keterbatasan ini secara langsung berdampak pada akses peserta didik terhadap layanan pendidikan yang memadai, karena mereka harus menempuh jarak jauh, belajar dalam kondisi lingkungan yang tidak kondusif, atau bahkan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini memperkuat siklus kemiskinan dan ketertinggalan antarwilayah.⁷⁷

Mutu pendidikan juga sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Fasilitas belajar yang baik tidak hanya mendukung proses pembelajaran yang efektif, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan semangat mengajar guru.⁷⁸ Ketika infrastruktur sekolah tidak memadai, proses pembelajaran menjadi kurang optimal guru kesulitan menyampaikan materi secara

⁷⁷ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

⁷⁸ Sumarto Sumarto et al., "Manajemen Mutu Sekolah Melalui Pelaksanaan dan Pengawasan Program Kerja," *Jurnal Literasiologi* 2, no. 2 (2019): 13, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v2i2.48>.

efektif, dan siswa tidak dapat belajar secara nyaman. Dalam teori input-output pendidikan, infrastruktur merupakan salah satu input penting yang memengaruhi kualitas hasil belajar (output). Maka dari itu, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.⁷⁹

Selain itu, ketimpangan infrastruktur berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan pendidikan antarwilayah. Siswa dari daerah dengan infrastruktur pendidikan yang memadai memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan lanjut dan meraih prestasi akademik tinggi, sementara siswa dari daerah dengan infrastruktur yang minim sering kali tertinggal. Ketimpangan ini juga berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka partisipasi sekolah, serta memperlemah upaya nasional dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan transformasi sistem pendidikan nasional yang berdaya saing dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam:⁸⁰

- 1) Akses pendidikan: Anak-anak di daerah terpencil harus menempuh jarak jauh atau belajar di fasilitas yang tidak layak.
- 2) Kualitas pembelajaran: Kurangnya fasilitas pendukung seperti laboratorium atau internet berdampak pada proses pembelajaran yang tidak optimal.

⁷⁹ Alfariq Ramadani and Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam."

⁸⁰ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

- 3) Motivasi dan kehadiran siswa: Lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak nyaman menurunkan minat belajar dan kehadiran siswa secara konsisten.

Pemerataan infrastruktur pendidikan bukan hanya menyangkut pembangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu, merupakan upaya untuk menjamin bahwa setiap peserta didik, di mana pun mereka berada baik di perkotaan maupun di pelosok desa memperoleh pengalaman belajar yang setara dan berkualitas.⁸¹ Hal ini mencakup tersedianya ruang belajar yang layak, fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai, serta lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung proses tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

f. Kesimpulan Kajian Teori

Kesimpulan dari landasan teori tentang pemerataan infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa pemerataan tersebut merupakan fondasi utama dalam menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang layak termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, serta akses terhadap air bersih, listrik, dan internet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas lingkungan belajar dan capaian hasil belajar siswa. Ketimpangan infrastruktur bukan hanya menciptakan perbedaan mutu pendidikan antarwilayah, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Rawls (1971), alokasi sumber daya publik, termasuk infrastruktur pendidikan, harus memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling tertinggal sebagai bentuk

⁸¹ Elfira Zafitri, Wahida Asni, and Rizki Ananda, "Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan" 09 (2024).

keadilan distributif. Pemerintah sebenarnya telah merespons hal ini dengan berbagai kebijakan dan alokasi fiskal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan dan pengarusutamaan pemerataan dalam RPJMN. Namun, realisasi kebijakan tersebut masih terkendala oleh lemahnya koordinasi, kapasitas teknis di tingkat daerah, dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.

Pemerataan infrastruktur pendidikan adalah fondasi penting dalam menciptakan keadilan akses pendidikan yang menyeluruh, terutama bagi wilayah-wilayah terpencil, perbatasan, dan tertinggal. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan sosial, pengutamaan kaum lemah (mustadh'afin), serta pengelolaan amanah publik telah ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan sabda Rasulullah . Konsep keadilan distributif yang dipahami dalam teori modern sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pemerataan hak dan fasilitas dasar bagi semua lapisan masyarakat.

1) Keadilan Sosial sebagai Prinsip Pokok

Allah Swt. berfirman:

لِلّٰهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl: 90).⁸²

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2005), Surah An-Nahl [16]: 90. *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”*

Ayat ini menjadi landasan utama dalam setiap bentuk kebijakan publik, termasuk pemerataan infrastruktur pendidikan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga sebagai bentuk distribusi yang adil sesuai kebutuhan, termasuk memberikan prioritas pada daerah dan kelompok yang paling membutuhkan.

2) Pembelaan terhadap Kaum yang Tertinggal

Allah Swt. juga berfirman:

تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang mereka berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.’”(QS. An-Nisa: 75).⁸³

Ayat ini menunjukkan keutamaan dalam membela dan memperjuangkan hak kelompok tertinggal atau mustadh’afin. Dalam konteks pendidikan, kelompok tertinggal ini bisa dimaknai sebagai peserta didik di daerah-daerah yang belum mendapat akses infrastruktur pendidikan yang layak.

3) Amanah dalam Mengelola Sumber Daya Publik

Allah Swt. Berfirman:

اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

مَنْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

عِظْكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁸³ Ibid., Surah An-Nisa [4]: 75. *“Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak...”*

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(QS. An-Nisa: 58).*⁸⁴

Setiap pejabat atau pemangku kepentingan yang diberi wewenang mengelola sumber daya publik, termasuk DAK Fisik Pendidikan, berkewajiban untuk menyalurkannya secara amanah kepada yang berhak—yakni masyarakat yang membutuhkan, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.

4) Hadis tentang Kepemimpinan dan Tanggung Jawab

Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Dari Ibnu Umar raḍiyallāhu ‘anhumā, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai

⁸⁴ Ibid., Surah An-Nisa [4]: 58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba (pekerja) adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.” (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829).⁸⁵

Hadis ini menjadi pengingat bagi para pemegang amanah kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan mutu antarwilayah.

Dengan demikian, pemerataan infrastruktur pendidikan bukan hanya kewajiban administratif atau kebijakan negara, tetapi juga merupakan amanah keagamaan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Implementasi kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat tertinggal sejalan dengan prinsip-prinsip Qurani dan Sunnah yang menekankan keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan pembelaan terhadap kaum lemah.

g. Indikator Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Berikut adalah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur implementasi dan capaian pemerataan infrastruktur pendidikan berdasarkan teori:

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Dimensi	Indikator Pemerataan
1. Aksesibilitas Fasilitas	- Jumlah sekolah per kecamatan - Jarak sekolah terdekat dari pemukiman - Akses transportasi ke sekolah
2. Ketersediaan Sarana Dasar	- Jumlah dan kondisi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan toilet
3. Infrastruktur Pendukung	- Akses terhadap air bersih, listrik, dan internet di sekolah
4. Prioritas Wilayah Tertinggal	- Proporsi anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk daerah 3T

⁸⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Hadis no. 893; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis no. 1829. “*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya...*”

Dimensi	Indikator Pemerataan
5. Keadilan Alokasi Anggaran	- Rasio alokasi DAK Fisik Pendidikan antar kecamatan
6. Keterlibatan Stakeholder	- Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam pembangunan sekolah
7. Efektivitas Penggunaan	- Tingkat pemanfaatan fasilitas oleh siswa dan guru sesuai fungsi
8. Dampak terhadap Proses Belajar	- Perubahan tingkat kehadiran siswa - Kualitas pembelajaran pasca perbaikan infrastruktur

B. Penelitian Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis tentang kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan, beserta kesimpulan dari masing-masing penelitian

Tesis:

1. Tesis: Implementasi Kebijakan Program Gerakan 'Mappadeceng' dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba" (2021). Kesimpulan: Penelitian ini menemukan bahwa implementasi program "Mappadeceng" di Kabupaten Bulukumba telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pemerataan infrastruktur pendidikan.⁸⁶
2. Tesis: "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara" (2022). Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilaksanakan sesuai dengan aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

⁸⁶ Tri Cahyo Nugroho, "Implementasi Kebijakan Program Gerakan 'Mappadeceng' Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Soppeng," 2021.

Namun, diperlukan perbaikan dalam hal pengusulan formasi penerimaan guru dan pengawasan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan pemerataan infrastruktur pendidikan.⁸⁷

3. Disertasi: Transformasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Indonesia. (2023). Penelitian ini menemukan bahwa transformasi manajemen infrastruktur pendidikan menjadi kebutuhan strategis nasional dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.⁸⁸

Jurnal Bereputasi:

1. "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan di Daerah 3T" (2024). Kesimpulan: Artikel ini menemukan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa program untuk menjawab permasalahan peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pasokan listrik yang memadai.⁸⁹
2. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia" (2021). Kesimpulan: Penelitian ini mengidentifikasi bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, terutama selama pandemi COVID-19.

⁸⁷ Meysi Christi Rolos, Johny H Posumah, and Very Y Londa, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara.," no. 113 (n.d.).

⁸⁸ Kusuwa Wijayanto. 2023. Transformasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Disertasi. IAIN Surakarta (<https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4379/1/Kusuwa%20Wijayanto.pdf>)

⁸⁹ Alfariq Ramadani and Roha Purnama Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 10, no. 1 (August 30, 2024): 40–49.

Implementasi kebijakan pendidikan memerlukan adaptasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai pemerataan infrastruktur.⁹⁰

3. "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan" (2020). Kesimpulan: Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, dengan lebih banyak dampak negatif dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dibandingkan manfaat yang diharapkan.⁹¹

⁹⁰ Safrida -, Nila Safrida, and Muhammad Muhammad, "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat," *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 2 (December 29, 2021): 71–80.

⁹¹ Syamsul Edi, "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan," n.d.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail dari berbagai sumber yang relevan, termasuk dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta observasi kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai sekolah.⁹²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Lokasi penelitian mencakup beberapa SMP Negeri yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah, yaitu SMP Negeri di wilayah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Tebat Karai. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan diterapkan di daerah

⁹² kinanti Indah Safitri Et Al., “Formulasi Kebijakan Lingkungan Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Program Riau Hijau,” *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 8, no. 01 (January 20, 2025): 238–63, <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i01.5598>.

dengan karakteristik yang berbeda. Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3-6 bulan, April hingga September 2025 yang mencakup tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data:

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan infrastruktur pendidikan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen di lokasi penelitian.⁹³

2. Sumber Data

- a. Data Primer: Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan, seperti pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta tokoh masyarakat yang memahami kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang.
- b. Data Sekunder: Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan, rencana strategis pendidikan, dan statistik pendidikan yang relevan dari instansi terkait. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur akademik, laporan dari organisasi pendidikan, serta berita yang membahas pendidikan di Kabupaten Kepahiang.

⁹³ Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–31, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>.

Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling atau pengambilan sampel non-acak. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kasus tertentu.⁹⁴ Teknik non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Purposive Sampling (Sampel Bertujuan)

- a. Sampel sekolah dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain tingkat pemerataan infrastruktur pendidikan, kemudahan aksesibilitas, status akreditasi sekolah, serta kondisi geografis wilayah tempat sekolah berada. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai variasi kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai lokasi, sehingga dapat dianalisis secara mendalam bagaimana kebijakan pemerintah daerah berimplikasi terhadap pemerataan tersebut.⁹⁵
- b. Pemilihan sampel dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan variasi kondisi sekolah dalam penerapan kebijakan infrastruktur pendidikan, sehingga hasil yang diperoleh mampu mencerminkan realitas yang beragam di lapangan, baik dari segi tingkat kelengkapan sarana prasarana, perbedaan geografis, maupun efektivitas implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah.⁹⁶

⁹⁴ Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel." "Menentukan Populasi dan Sampel."

⁹⁵ Oleh Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, n.d.

⁹⁶ Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel."

2. Kriteria Pemilihan Sekolah

- a. Sekolah dengan akreditasi A dipilih sebagai sampel penelitian karena dianggap representatif dalam menggambarkan keterwakilan daerah kecamatan, dengan memperhatikan kualitas pendidikan yang tercermin dari status akreditasi tersebut. Pemilihan sekolah dengan akreditasi A juga memberikan gambaran mengenai sekolah-sekolah yang berada pada kategori sangat baik dalam aspek pengelolaan pendidikan, namun masih memiliki tantangan dalam pengembangan dan pemenuhan infrastruktur pendidikan yang optimal, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks pemerataan infrastruktur (representasi keterwakilan daerah kecamatan).

Di bawah ini disajikan data sebaran SMP Negeri (SMPN) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang. Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi sekolah menengah pertama di daerah tersebut, yang akan digunakan untuk menganalisis ketersebaran infrastruktur pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang.

Tabel 3.1 Sebaran SMPN di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025.⁹⁷

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			ISO		Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	9001:2000	9001:2008	
1	Kec. Kepahiang	5	2	5	1	1	0	0	7

⁹⁷ Daftas Sekolah.Net. Daftar Sekolah SMP di KabupatenKepahiang Bengkulu Tahun 2025, 2025 <https://daftarsekolah.net/> (diakses tanggal 17 Maret 2025)

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			ISO		Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	9001: 2000	9001: 2008	
2	Kec. Bermani Ilir	7	0	1	1	4	0	0	7
3	Kec. Kaba Wetan	3	0	0	2	1	0	0	3
4	Kec. Muara Kemumu	3	0	0	0	3	0	0	3
5	Kec. Tebat Karai	3	0	1	2	0	0	0	3
6	Kec. Ujan Mas	3	0	2	0	1	0	0	3
7	Kec. Seberang Musi	2	0	0	0	2	0	0	2
8	Kec. Merigi	1	0	0	1	0	0	0	1
Total		27	2	9	7	12	0	0	29

Adapun keterwakilan kecamatan yang di ambil berdasarkan kriteria pemilihan sekolah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Tebat Karai. Lima kecamatan yang tidak dipilih sebagai sampel karena tidak sesuai dengan kriteria dan keterwakilan daerah adalah Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Muara kemumu, Kecamatan Merigi, Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Seberang Musi. Dengan pemilihan ini, penelitian dapat menggali bagaimana kebijakan pemerataan infrastruktur berdampak pada sekolah dengan kondisi yang berbeda.

3. Quota Sampling (Sampel Kuota)

- a. Untuk memastikan keterwakilan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kepahiang, setiap kecamatan dipilih minimal satu sekolah yang memenuhi kriteria purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kondisi infrastruktur, status akreditasi, aksesibilitas, dan relevansi dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

memperoleh data yang mendalam dan kontekstual dari masing-masing wilayah, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di tingkat lokal.⁹⁸

- b. Terdapat 8 kecamatan di Kabupaten Kepahiang, jumlah sampel sekolah yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 kecamatan, masing-masing kecamatan mewakili 1 sekolah terdiri dari Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Ujan Mas. Pemilihan ini berdasarkan pada variasi kondisi infrastruktur pendidikan yang ada serta ketercapaian data yang dibutuhkan. Rentang jumlah ini ditetapkan untuk menjamin keberagaman informasi yang diperoleh, sekaligus mempertimbangkan efisiensi pengumpulan data lapangan tanpa mengurangi kedalaman analisis dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan oleh pemerintah daerah.⁹⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan informan kunci yang memiliki relevansi langsung terhadap isu yang diteliti, yaitu pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru di sekolah-sekolah terpilih. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, termasuk bagaimana kebijakan

⁹⁸ Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*.

⁹⁹ Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif."

tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya di tingkat sekolah maupun dinas. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika pelaksanaan kebijakan dan realitas di lapangan.¹⁰⁰

2. Observasi Lapangan: Observasi langsung dilakukan di sekolah-sekolah, khususnya di beberapa SMP Negeri yang telah dipilih sebagai sampel, guna melihat secara nyata kondisi infrastruktur pendidikan yang tersedia. Observasi ini mencakup berbagai aspek fisik seperti kondisi bangunan, ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, serta sarana penunjang lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh data empiris yang objektif dan akurat mengenai tingkat kelayakan infrastruktur serta kesesuaiannya dengan standar pendidikan yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pemerataan dan kualitas sarana pendidikan di Kabupaten Kepahiang.¹⁰¹ Observasi ini mencakup:
 - a. Kualitas bangunan sekolah (kelas, laboratorium, perpustakaan)
 - b. Ketersediaan fasilitas pendukung (listrik, internet, air bersih)
 - c. Pemanfaatan dan perawatan infrastruktur yang telah dibangun
3. Studi Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait yang mendukung proses penelitian, seperti

¹⁰⁰ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit" 4 (2013).

¹⁰¹ Augusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*.

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), data profil sekolah, laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta hasil rapat atau kebijakan dinas pendidikan yang berhubungan dengan infrastruktur pendidikan. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber data sekunder yang penting untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi, serta memberikan informasi administratif dan kebijakan yang memperkuat analisis terhadap implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang seperti:¹⁰²

- a. Dokumen kebijakan pendidikan daerah
- b. Laporan pembangunan infrastruktur pendidikan
- c. Data anggaran pendidikan dan realisasi pembangunan

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi dan tingkat keterlibatan mereka dalam kebijakan pendidikan serta kondisi infrastruktur sekolah. Pemilihan ini mencakup pejabat Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur, kepala sekolah yang memahami implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan, serta guru yang mengalami langsung dampak dari kondisi fisik sekolah terhadap proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan mencerminkan realitas pelaksanaan kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

¹⁰² Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif.”

1. Pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan staf bidang sarana prasarana.
2. Kepala sekolah SMP Negeri yang mewakili wilayah perkotaan, pedesaan, dan terpencil.
3. Guru dan tenaga kependidikan untuk memahami dampak infrastruktur terhadap proses pembelajaran.
4. Komite sekolah atau tokoh masyarakat, yang berperan dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sekolah.

Jumlah sekolah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berkisar antara 3 hingga 15 sekolah, dengan penentuan akhir jumlah tersebut bergantung pada tercapainya *saturation point*, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh dari lapangan sudah tidak lagi memberikan informasi baru atau signifikan untuk analisis. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan cukup dalam dan representatif terhadap permasalahan yang diteliti, tanpa harus menambah jumlah responden secara berlebihan yang tidak lagi memberikan kontribusi berarti terhadap hasil penelitian.¹⁰³

E. Keabsahan Data (Validitas dan Reliabilitas Data)

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan kesesuaian dan konsistensi informasi. Selain

¹⁰³ Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel."

itu, dilakukan pengecekan ulang kepada informan melalui teknik *member checking* guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman informan. Peneliti juga menjaga ketekunan dalam pengamatan serta mencatat secara rinci seluruh proses pengumpulan data, sehingga diperoleh data yang valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah:¹⁰⁴

1. Triangulasi Sumber: Data diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk membandingkan informasi yang diperoleh dan memastikan konsistensinya.
2. Triangulasi Teknik: Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memastikan bahwa data yang diperoleh saling menguatkan dan valid.
3. Perpanjangan Pengamatan: Peneliti akan memperpanjang durasi pengamatan di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat mengenai kondisi nyata implementasi kebijakan pendidikan pada subjek dan objek penelitian.
4. Peer Debriefing: Melibatkan rekan sejawat atau ahli pendidikan untuk mendiskusikan hasil penelitian dan memastikan tidak ada bias dalam interpretasi data.
5. Member Checking: Hasil wawancara atau observasi akan dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan keakuratan dan interpretasi yang benar.

¹⁰⁴ Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*.

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan beberapa tahapan sistematis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh diseleksi dan disederhanakan untuk difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel agar memudahkan pemahaman dan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan verifikasi terhadap temuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang:¹⁰⁵

1. Reduksi Data: Data yang diperoleh akan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data yang penting akan diringkas dan dikelompokkan sesuai kategori.
2. Penyajian Data: Data yang sudah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman tentang arah kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap pemerataan pendidikan. Penyajian data ini akan membantu peneliti dalam menemukan pola atau hubungan antar variabel.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Setelah data dianalisis dan disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis.

¹⁰⁵ Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif."

Kesimpulan yang dibuat akan diverifikasi ulang untuk memastikan kebenaran dan keandalannya.

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang, khususnya terkait pemerataan infrastruktur pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap kesetaraan akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah kecamatan. Selain itu, hasil analisis ini akan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya di masa mendatang, guna mendorong tercapainya keadilan dan kualitas pendidikan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Kepahiang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan objek utama kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan infrastruktur pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Objek penelitian mencakup institusi pemerintah dan satuan pendidikan, yang dipilih secara purposive untuk merepresentasikan variasi geografis dan kondisi infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut.

Adapun lokasi penelitian terdiri dari satu instansi pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, serta tiga satuan pendidikan negeri, yakni SMP Negeri 3 Kepahiang, SMP Negeri 2 Tebat Karai, dan SMP Negeri 2 Ujan Mas. Pemilihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang strategis dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan pendidikan daerah, termasuk dalam hal perencanaan dan pemerataan infrastruktur pendidikan. Wawancara dilakukan dengan pejabat kunci di instansi ini, seperti Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan BMD, Kasi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana, serta Kepala Bidang DikDas sebagai kordinator dalam pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepahiang.

Sementara itu, ketiga sekolah menengah pertama dipilih karena mewakili karakteristik wilayah yang berbeda di Kabupaten Kepahiang baik dari aspek kondisi geografis, aksesibilitas, maupun mutu infrastruktur yang dimiliki dengan akreditasi sekolah A. SMP Negeri 3 Kepahiang berlokasi di ibu kota

kabupaten dan merepresentasikan sekolah di wilayah perkotaan. SMP Negeri 2 Tebat Karai dan SMP Negeri 2 Ujan Mas dipilih sebagai representasi wilayah semi perdesaan yang letaknya berbatasan langsung dengan Kecamatan Kepahiang, dengan asumsi bahwa pemerataan infrastruktur di wilayah tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan serta keduanya masih berada dalam tahap pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang setara dengan kecamatan induk.

1. Objek Penelitian

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepahiang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pelestarian kebudayaan di wilayah Kabupaten Kepahiang. Dipimpin oleh Dr. Nining Fawely Pasju, S.Pt., M.M. dinas ini beralamatkan di Jalan Santoso, Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Tahun Berdiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang terbentuk sejak Kabupaten Kepahiang berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

Visi: “Mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.”

Misi:

1. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan yang bermutu.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan tenaga pendidik, pengawasan mutu pendidikan, serta pembangunan dan pemerataan infrastruktur pendidikan. Hingga tahun 2024, masih terdapat tantangan terkait ketimpangan fasilitas pendidikan antar wilayah, khususnya antara kecamatan pusat dan wilayah pinggiran. Dinas ini secara bertahap melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana melalui dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepahiang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan objek yang strategis untuk diteliti dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, pemerataan infrastruktur, peningkatan mutu, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Dalam konteks penelitian tentang *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang,”* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sentral sebagai perumus kebijakan teknis, pelaksana, serta pengendali kegiatan pembangunan pendidikan di daerah.

b. SMP Negeri 3 Kepahiang

SMP Negeri 3 Kepahiang merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Jalan Cinta Damai, Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Sekolah ini berstatus negeri, telah terakreditasi A, dan menerapkan Kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Saat ini, SMPN 3 Kepahiang dipimpin oleh Kepala Sekolah Syahril dengan Marcos Hardianto sebagai operator sekolah sekaligus kasubag

TU dan beberapa jajawan wakil kepala sekolah serta koordinator bidang dalam menjalankan tugas untuk membantu kinerja kepala sekolah dan sekolah SMPN 3 Kepahiang.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Kepahiang Tahun 2025.¹⁰⁷

No	Jabatan	Nama Lengkap
1	Kepala Sekolah	H. M. Syahril, S.Pd., M.M
2	Wakasek Kurikulum	Maryono, S.Pd.
3	Wakasek Kesiswaan	Kasmaldi, S.Pd.
4	Wakasek Sarana dan Prasarana	Dudi Haryono, S.Si
5	Wakasek Humas	Mursida, S.Pd.
6	Koordinator BK	Evi Sriyanti, S.Pd.I
7	Koordinator Perpustakaan	Rini Susianti, S.Pd.
8	Koordinator Lab. IPA	Susiana, M.Pd.Si
9	Koordinator Lab. Komputer	Enny Yunita, S.Hi
10	Koordinator UKS	Sahilin Harizona, S.Pd.
11	Tata Usaha (Administrasi)	Marcos Hardianto, S.Sos.
12	Ketua Komite Sekolah	Tagor Muda Siregar, S.I.P.

Sekolah ini memiliki 10 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 280 orang, terdiri atas 155 siswa laki-laki dan 125 siswa perempuan. Jumlah ini menunjukkan proporsi siswa yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan belajar. Keberadaan rombongan belajar yang cukup banyak menunjukkan bahwa sekolah ini memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung siswa dalam jumlah besar.

Dari sisi sarana dan prasarana, SMPN 3 Kepahiang memiliki 16 ruang kelas, 1 laboratorium, 1 perpustakaan, serta 17 unit sanitasi, dan seluruh ruang kelas dinyatakan layak digunakan. Luas lahan sekolah mencapai 7.786 m² dan telah menggunakan sumber listrik dari PLN. Namun, hingga kini sekolah belum

¹⁰⁷ SMP Negeri 3 Kepahiang. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Kepahiang Tahun 2025. Dokumentasi diambil pada tanggal 15 Mei 2025.

memiliki akses internet di ruang kelas; koneksi wifi hanya tersedia di kantor dan laboratorium komputer. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

Tabel 4.2 Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kepahiang Tahun 2025.¹⁰⁸

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah/Status	Keterangan
1	Luas Lahan	7.786 m ²	Milik sendiri
2	Ruang Kelas	15 ruang	3 ruang kelas VIII butuh rehabilitas atap, kursi kayu banyak yang rusak dan keadaan kelas kurang terawat/bersih
3	Laboratorium IPA	1 unit	Digunakan aktif, namun kelengkapan alat lab kurang
4	Laboratorium Komputer	1 unit	Digunakan aktif
5	Perpustakaan	1 unit	Lengkap buku teks & referensi
6	UKS (Unit Kesehatan Sekolah)	1 unit	Fasilitas dasar tersedia
7	Sarana Sanitasi (WC)	17 unit	WC Putra kurang layak untuk, Wc putri cukup layak (terpisah putra/putri)
8	Sumber Listrik	PLN	Aktif
9	Akses Internet	Tersedia	Untuk kantor dan Lab komputer untuk ruang siswa belum tersedia
10	Rombongan Belajar (Rombel)	10 rombel	Rata-rata 28 siswa per rombel (3 ruang kelas VII, 3 ruang kelas VIII, 4 ruang kelas IX)
11	Jumlah Siswa	280 siswa	155 laki-laki, 125 perempuan

Dalam hal prestasi, SMPN 3 Kepahiang memiliki rekam jejak yang membanggakan di tingkat kabupaten/kota, seperti Juara 1 catur putri (2015–2016), pantomim, seni tari kreasi, dan kriya anyaman, serta Juara 3 cabang olahraga renang putra. Guru-guru sekolah ini juga pernah meraih penghargaan Guru Berprestasi tingkat kabupaten dan Satya Lencana Karya Satya tingkat

¹⁰⁸ SMP Negeri 3 Kepahiang. Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kepahiang Tahun 2025. Dokumentasi diambil pada tanggal 15 mei 2025.

nasional. Dengan kondisi dan potensi tersebut, SMPN 3 Kepahiang menjadi representasi yang relevan dalam penelitian terkait pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah semi perkotaan. Di tengah fasilitas yang tergolong baik, ketimpangan seperti belum tersedianya akses internet mencerminkan tantangan nyata dalam upaya pemerataan sarana pendukung pendidikan di era digital. Oleh karena itu, sekolah ini sangat tepat dijadikan sebagai objek dalam studi implementasi kebijakan pendidikan dan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.

c. SMP Negeri 2 Tebat Karai

SMP Negeri 2 Tebat Karai merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 9.598 meter persegi yang berstatus milik sendiri, memberikan keleluasaan bagi pengembangan fisik dan kegiatan pembelajaran. SMPN 2 Tebat Karai memiliki NPSN 10702256 dan telah memperoleh akreditasi A berdasarkan SK BAN-S/M No. 1589/BAN-SM/SK/2022, yang menunjukkan bahwa sekolah ini telah memenuhi standar nasional pendidikan dalam aspek manajemen, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik. Secara struktural, sekolah ini dipimpin oleh Ahmad Muslim, M.Pd.Mat sebagai Kepala Sekolah. Struktur organisasi di sekolah ini juga telah mencakup Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang terdiri dari beberapa guru dan unsur komite sekolah, antara lain:

Tabel 4.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Tebat Karai Tahun 2025.¹⁰⁹

No	Jabatan	Nama Lengkap
1	Kepala Sekolah	Ahmad Muslim, M.Pd.Mat
2	Koordinator TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)	Hasrul
3	Anggota TPPK	Elva Aryani
4	Anggota TPPK	Ihzan Sapardi
5	Anggota TPPK	Subiyanto
6	Anggota TPPK (Komite Sekolah)	Sahril, S.Pd
7	Operator Sekolah	Subiyanto

Keberadaan tim ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dari sisi sumber daya manusia, SMPN 2 Tebat Karai memiliki 20 guru yang terdiri dari 5 laki-laki dan 15 perempuan, serta 4 tenaga kependidikan (3 laki-laki dan 1 perempuan). Sekolah ini juga dilengkapi dengan akses listrik dari PLN dan jaringan internet aktif dengan kecepatan hingga 100 Mbps, meskipun informasi rinci terkait jumlah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi belum sepenuhnya tersedia secara daring. Berdasarkan hasil observasi lapangan, beberapa ruang belajar masih memerlukan perbaikan minor pada bagian atap dan jendela. Namun, secara umum kondisi sarana yang ada cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Pihak sekolah juga secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas melalui proposal bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang.

¹⁰⁹ SMP Negeri 2 Tebat Karai. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Tebat Karai Tahun 2025. Dokumentasi diambil pada tanggal 27 mei 2025.

Tabel 4.4 Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Tebat Karai Tahun 2025.¹¹⁰

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah/Status	Keterangan
1	Luas Lahan	9.598 m ²	Milik sendiri
2	Akses Internet	Tersedia	Kecepatan hingga 100 Mbps
3	Sumber Listrik	PLN	Aktif dan stabil
4	Status Akreditasi	A	Berdasarkan SK BAN-S/M No. 1589/BAN-SM/SK/2022
5	Jumlah Siswa	276 siswa	150 laki-laki, 126 perempuan
6	Jumlah Guru	20 orang	5 laki-laki, 15 perempuan
7	Tenaga Kependidikan	4 orang	3 laki-laki, 1 perempuan
8	Ruang Kelas	12 ruang	9 terpakai, 3 tidak terpakai
9	Laboratorium	1 ruang	Layak pakai
10	Perpustakaan	1 ruang	Layak pakai
11	Sarana Sanitasi (WC)	10 ruang	Layak pakai 4, tidak layak pakai 6

Per 2025, sekolah ini memiliki 276 siswa, dengan komposisi 150 siswa laki-laki dan 126 perempuan. Jumlah ini tersebar dalam beberapa rombongan belajar yang berjalan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yakni Kurikulum 2013. Selain fokus pada penguatan akademik, SMP Negeri 2 Tebat Karai juga dikenal aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kepramukaan. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah diraihnya 16 piala dalam ajang Perkemahan HUT Gudep SMPN 2 Rejang Lebong, di mana sekolah ini dinobatkan sebagai Juara Umum II se-Provinsi Bengkulu pada tahun 2024.

Sebagai Sekolah Penggerak dan Sekolah Sehat, SMPN 2 Tebat Karai memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di wilayah semi-perdesaan Kabupaten Kepahiang. Sekolah ini menjadi

¹¹⁰ SMP Negeri 2 Tebat Karai. Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 2 Tebat Karai Tahun 2025. Dokumentasi diambil pada tanggal 28 mei 2025.

representasi yang tepat dalam konteks penelitian mengenai pemerataan infrastruktur pendidikan dan implementasi kebijakan daerah di bidang pendidikan, khususnya pada wilayah yang tidak tergolong urban namun memiliki potensi besar untuk berkembang.

d. SMP Negeri 2 Ujan Mas

SMP Negeri 2 Ujan Mas merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Desa Daspetah II, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan nomor pokok sekolah nasional (NPSN) 10702257. Sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama ibu Aneliarisa, M.Pd. Sekolah ini berstatus negeri dan telah terakreditasi A, menandakan bahwa secara administratif dan akademik telah memenuhi standar mutu nasional.

Tabel 4.5 Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Ujan Mas Tahun 2025.¹¹¹

No	Jabatan	Nama Lengkap
1	Kepala Sekolah	Aneliarisa, M.Pd
2	Wakil Kepala	Susmiasih, S.Pd
3	Staf TU	Dirgayusa
		Herman Sairi, A.Md. TP
		Erlenny Cornellya
4	Kurikulum	Desi Oktasari, S.Pd
		Susmiasuh, S.Pd
5	Kesiswaan	Rien Dioni Lestari, S.Pd
6	Sarana Prasarana	Herman sairi, A.Md. TP
7	Humas	Rika Cahyati, S.Pd.I

Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 9.800 m², sekolah ini memiliki fasilitas teknologi yang memadai, termasuk akses internet dengan kecepatan

¹¹¹ SMP Negeri 2 Ujan Mas. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Ujan Mas Tahun 2025. Dokumentasi diambil pada tanggal 29 juni 2025.

hingga 30 Mbps serta perangkat Chromebook untuk menunjang proses belajar, khususnya untuk pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK). Listrik di sekolah ini bersumber dari jaringan PLN. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian terbaru, sekitar 42,11% kondisi fisik bangunan sekolah mengalami kerusakan, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam hal pemeliharaan infrastruktur fisik

Sebagai sekolah yang berada di wilayah dengan akses yang sedikit jauh dari kecamatan induk, SMPN 2 Ujan Mas menghadapi tantangan tersendiri terutama pada minat sekolah khususnya masyarakat kecamatan ujan mas karena total siswa dan siswinya dari kelas 7, 8 dan 9 hanya sebanyak 160 orang. Kondisi infrastruktur sekolah masih harus mendapatkan perhatian khusus terutama pada perawatan toilet siswa dan lapangan sekolah bagian atas. Untuk ruangan kelas terdiri dari 11 ruangan namun yang terpakai hanya sebanyak 6 ruangan kelas karena muridnya sedikit, namun kondisi ruangan kelas cukup baik dan layak. Kondisi fasilitas sanitasi cenderung kurang perawatan namun ketersediaan air bersih cukup baik dan lancar karena sekolah menggunakan sumur bor dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana SMPN 2 Ujan Mas.¹¹²

No	Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi/Deskripsi
1	Luas Lahan	9.800 m ²
2	Akses Internet	Tersedia, kecepatan hingga 30 Mbps, menggunakan Wi-Fi sekolah
3	Perangkat Teknologi	Chromebook tersedia untuk pelaksanaan USBK
4	Sumber Listrik	PLN

¹¹² SMPN 2 Ujan Mas. Sarana dan Prasarana SMPN 2 Ujan Mas. Dokumentasi diambil pada tanggal 29 juni 2025.

No	Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi/Deskripsi
5	Kondisi Bangunan	Sekitar 42,11% mengalami kerusakan, butuh perhatian pemeliharaan
6	Jumlah Siswa	Total 160 siswa (kelas 7, 8, dan 9)
7	Ruang Kelas	11 ruangan, namun hanya 6 ruangan yang dipakai karena jumlah siswa sedikit
8	Kondisi Ruang Kelas	Baik dan layak digunakan
9	Toilet Siswa	Ada, namun perawatan kurang
10	Lapangan Sekolah	Perlu perhatian khusus, terutama bagian atas
11	Sanitasi	Perlu peningkatan perawatan
12	Air Bersih	Cukup baik dan lancar, menggunakan sumur bor
13	Laboratorium	Ada, dengan fasilitas lengkap dan mendukung proses pembelajaran
14	Lokasi Sekolah	Berada di wilayah semi-perdesaan, akses agak jauh dari kecamatan induk

Sekolah ini memiliki laboratorium yang bagus dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dalam memenuhi kebutuhan belajar mengajar di laboratorium serta memiliki koneksi internet yang baik dan stabil dengan mengandalkan wifi sekolah. Kombinasi antara ketersediaan teknologi pendidikan yang baik dan kondisi bangunan yang belum sepenuhnya optimal menjadikan SMP Negeri 2 Ujan Mas sebagai salah satu objek yang tepat untuk diteliti dalam konteks pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah semi-perdesaan Kabupaten Kepahiang. Sekolah ini mencerminkan realitas yang kompleks antara kemajuan fasilitas digital dan kebutuhan perbaikan fisik bangunan yang masih berlangsung.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang terdiri dari tiga orang pejabat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kebijakan pendidikan, khususnya terkait dengan infrastruktur dan pengembangan pendidikan dasar. Pertama, Kasubbag Perencanaan, Keuangan,

dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang Oktavina, SP, yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan DMB, memiliki tanggung jawab dalam perencanaan anggaran serta pengelolaan sumber daya pendidikan. Kedua, Bapak Agus Fernandes, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), berperan penting dalam pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan dasar, termasuk implementasi kebijakan di tingkat sekolah. Ketiga, Bapak Muharyadi menjabat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, yang fokus pada penyediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.

Dari SMP Negeri 3 Kepahiang, subjek penelitian terdiri atas dua tokoh penting yang memiliki peran sentral dalam manajemen sekolah. Bapak H. M. Syahril, S.Pd., MM bertindak sebagai kepala sekolah yang memimpin dan mengarahkan pelaksanaan seluruh program pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu, terdapat Bapak Pathur Rahman, M.Pd yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru, yang membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas manajerial serta pengawasan kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah.

Sementara itu, dari SMP Negeri 2 Tebat Karai, subjek penelitian terdiri atas tiga orang yang mencerminkan keberagaman fungsi dalam pengelolaan sekolah. Bapak Ahmad Muslim, M.Pd. Mat, merupakan kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian, Ibu Lesi Junita, S.Pd merupakan guru yang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki wawasan langsung

terhadap kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya, Bapak Ikhsan sebagai staf tata usaha (TU) memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi, termasuk pendataan aset dan fasilitas pendidikan.

Dari SMP Negeri 2 Ujan Mas, subjek penelitian terdiri dari tiga tokoh yang mewakili pihak manajemen, staf, dan unsur masyarakat. Ibu Aneliarisa, M.Pd merupakan kepala sekolah yang memimpin lembaga dan mengelola pelaksanaan pendidikan serta sarana prasarana yang tersedia. Bapak Dirga Yusa berperan sebagai staf tata usaha yang mengelola data administrasi dan logistik sekolah. Sementara itu, Bapak Rizal selaku komite sekolah mewakili suara masyarakat dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan terkait kebutuhan dan pengembangan infrastruktur pendidikan.

Tabel 4.7 Subjek Penelitian.¹¹³

No	Nama Lengkap	Jabatan/Posisi	Instansi/Sekolah
1	Siti Rauzah Oktavina, SP	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang
2	Agus Fernandes	Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang
3	Muharyadi	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang
4	H. M. Syahril, S.Pd., MM	Kepala Sekolah	SMPN 3 Kepahiang
5	Pathur Rahman, M.Pd	Wakil Kepala Sekolah dan Guru	SMPN 3 Kepahiang
6	Ahmad Muslim, M.Pd. Mat	Kepala Sekolah	SMPN 2 Tebat Karai
7	Lesi Junita, S.Pd	Guru	SMPN 2 Tebat Karai
8	Ikhsan	Staf Tata Usaha	SMPN 2 Tebat Karai
9	Aneliarisa, M.Pd	Kepala Sekolah	SMPN 2 Ujan Mas
10	Dirga Yusa	Staf Tata Usaha	SMPN 2 Ujan Mas

¹¹³ Dinas Pendidikan, SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas. Dokumentasi dibuat pada tanggal 30 mei 2025.

No	Nama Lengkap	Jabatan/Posisi	Instansi/Sekolah
11	Rizal	Komite Sekolah	SMPN 2 Ujan Mas

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Regulasi Pendidikan

Dalam penelitian ini, aspek regulasi mencakup tiga indikator utama: kesesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, kejelasan aturan teknis pelaksanaan kebijakan, serta konsistensi dan keberlanjutan regulasi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah di Kabupaten Kepahiang, diperoleh beberapa temuan penting.

Pertama, Kesesuaian Kebijakan Daerah dengan Kebijakan Nasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan daerah Kabupaten Kepahiang dinilai telah sejalan dengan kebijakan nasional, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan atau kendala di lapangan. Mayoritas informan, seperti Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid DikDas, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, menyatakan bahwa kesesuaian sudah terjadi, dengan istilah seperti “selaras”, “bersinergi”, dan “mengikuti kebijakan nasional”.¹¹⁴ Sementara itu, Bapak Syahrial memberikan pandangan kuantitatif dengan menyebutkan bahwa tingkat keselarasan mencapai 80%, menyiratkan

¹¹⁴ Wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, 21 mei dan 24 Juli 2025.

bahwa masih ada sebagian kebijakan pusat yang belum bisa sepenuhnya diimplementasikan di daerah.¹¹⁵

Tabel 4.8 Kebijakan dan Program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Terkait Infrastruktur Pendidikan.¹¹⁶

No	Kebijakan / Program	Keterangan Singkat	Tahun	Link Sumber
1	DAK Fisik Infrastruktur Pendidikan	Pengusulan Dana Alokasi Khusus untuk rehab gedung sekolah, ruang guru, perpustakaan, TIK, jamban. Alokasi meningkat dari Rp 5 miliar (2023) menjadi Rp 15 miliar (2024), meski belum mencakup sekolah dengan siswa <60 orang.	2024	[radarkepahiang, 19 Mei 2024] (radarkepahiang.bacakoran.co)
2	Verifikasi Kebutuhan Sarpras Sekolah	Kepala Dikbud menyatakan banyak sekolah (SD dan SMP) membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, ruang guru, UKS, laboratorium komputer, perpustakaan. Terkendala sertifikasi tanah hibah dan jumlah siswa.	Nov 2023 – Des 2023	[mediasinardunia, 15 Des 2023] (mediasinardunia.com)
3	Pendekatan Pemenuhan Syarat Usul DAK	Upaya fasilitasi pemenuhan jumlah siswa minimum dan legalitas lahan agar bisa mendapatkan bantuan DAK pusat.	2023–2024	[mediasinardunia, 15 Des 2023] (mediasinardunia.com , radarkepahiang.bacakoran.co)
4	Kajian Infrastruktur Bersama ITERA	Kerja sama dengan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) untuk pendampingan peningkatan infrastruktur dan data berbasis kebutuhan daerah.	2024	[ITERA news, Sept 2024] (itera.ac.id)
5	Regulasi Perbup tentang Dinas Pendidikan	Perbup No.23 Tahun 2022 mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawab Dinas	2022	[Perbup BPK, 2022] (peraturan.bpk.go.id)

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 26 Mei 2025.

¹¹⁶ Dokumentasi. Kebijakan dan Program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Terkait Infrastruktur Pendidikan. Diakses pada tanggal 5 agustus 2025.

No	Kebijakan / Program	Keterangan Singkat	Tahun	Link Sumber
		Pendidikan dan Kebudayaan (termasuk penyediaan sarpras).		

Dokumentasi mendukung pernyataan tersebut. Peraturan Bupati (Perbup) No. 23 Tahun 2022 dan Perbup No. 17 Tahun 2024 menjadi bukti legal formal bahwa Kabupaten Kepahiang memiliki regulasi yang mengatur penyediaan sarana prasarana pendidikan dan target peningkatan infrastruktur pendidikan usia dini dan dasar. Kebijakan DPRD dan Dinas Pendidikan juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, misalnya melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang diatur dalam Perbup No. 5 Tahun 2023. Selain itu, inisiatif konkret seperti verifikasi sarana prasarana sekolah, pengajuan DAK melalui Dapodik, dan digitalisasi pembelajaran (penyediaan 800 tablet Chromebook) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang aktif berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam langkah-langkah nyata di daerah.

Kedua, Kejelasan Aturan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan sepakat bahwa aturan teknis pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang jelas dan mudah dipahami. Hal ini diperkuat oleh dokumentasi berupa petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat, seperti:

- a. Perpres No. 57 Tahun 2024 dan Perpres No. 71 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan.¹¹⁷

¹¹⁷ Dokumentasi. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Diakses 5 Agustus 2025

- b. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 yang menjelaskan petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Pendidikan secara rinci, termasuk alokasi, menu kegiatan, dan format pelaporan.¹¹⁸

Tabel 4.9 Ringkasan Juknis DAK Fisik Pendidikan Kemdikbudristek.¹¹⁹

No	Komponen	Uraian
1	Landasan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Perpres No. 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Pendidikan 2024 b. Perpres No. 71 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perpres 57/2024 c. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 tentang Juknis DAK Fisik Pendidikan
2	Prinsip Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektif dan efisien b. Transparan dan akuntabel- Kearifan lokal c. Aksesibilitas dan keselamatan d. Kepatuhan terhadap peraturan
3	Sasaran Pendidikan	PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM, SKB (negeri/swasta)
4	Jenis Kegiatan (Menu DAK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi sarpras: ruang kelas, lab, perpustakaan, MCK, dll. b. Pembangunan baru: RKB, ruang guru, ruang inklusif, dll. c. Pengadaan sarana: TIK, buku, peralatan praktik, alat bantu belajar inklusif
5	Kriteria Sekolah Penerima	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki NPSN dan terdaftar di Dapodik b. Tanah milik sah (bersertifikat) c. Bangunan rusak ringan–sedang d. - Jumlah peserta didik: • PAUD 24 siswa • SD/SMP 60 siswa • PKBM/SKB 40 siswa
6	Sumber Data Utama	Dapodik (Data Pokok Pendidikan), hasil verifikasi Dinas Pendidikan & Dinas PUPR
7	Verifikasi Teknis	Penilaian kondisi bangunan menggunakan format Kementerian PU, dan hasilnya diverifikasi secara elektronik melalui portal Kemdikbudristek
8	Pelaksanaan Pengadaan	Melalui swakelola tipe I/III atau penyedia jasa, sesuai regulasi pengadaan pemerintah (Perpres 16/2018 dan turunannya)
9	Monitoring & Evaluasi	Dilakukan oleh pemerintah pusat (Kemendikbud, Kemenkeu, Bappenas), dan pemerintah daerah melalui laporan fisik dan keuangan serta pelaporan realisasi kegiatan

¹¹⁸ Dokumentasi. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 17 Tahun 2024 (dalam RKPD Kabupaten Kepahiang). Diakses 5 Agustus 2025

¹¹⁹ Dokumentasi. Ringkasan Juknis DAK Fisik Pendidikan dari Kemdikbudristek. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.

No	Komponen	Uraian
10	Dokumen Terkait	- Perpres 71 Tahun 2025 (portal.kincaimedia.net) - Permendikbudristek No. 3 Tahun 2022 (komunitasbelajar.id) - Dapodik Kemdikbud

Dokumen-dokumen tersebut berperan penting sebagai rujukan teknis yang dapat diakses secara terbuka dan dijadikan pedoman utama oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pendidikan. Keberadaan regulasi seperti Peraturan Presiden dan Permendikbudristek memberikan arahan yang sistematis dan terstandar mengenai alokasi anggaran, skema kegiatan, kriteria penerima bantuan, serta mekanisme pelaporan. Hal ini sangat membantu daerah dalam memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil berada dalam koridor hukum dan teknis yang tepat, sekaligus meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya panduan ini, implementasi program-program pendidikan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Ketiga, Konsistensi dan Keberlanjutan Regulasi Daerah. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa regulasi pendidikan daerah telah dijalankan secara konsisten, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kemampuan daerah. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan konsisten. Kasi Sarana dan Prasarana dan Kepala SMPN 3 Kepahiang menambahkan bahwa meskipun ada

dinamika dan perubahan, pelaksanaan kebijakan tetap mengikuti regulasi pendidikan daerah.¹²⁰

Hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan aturan teknis di satuan pendidikan. Di SMPN 3 Kepahiang, terdapat SOP dan juknis yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti SOP dana BOS. Namun, di SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas, tidak ditemukan SOP khusus yang dibuat oleh sekolah. Sekolah-sekolah ini cenderung langsung mengikuti kebijakan dan SOP yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, tanpa membuat turunan SOP internal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum konsisten, implementasi teknis di tingkat sekolah belum seragam, yang bisa memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang secara umum telah selaras dengan kebijakan nasional. Para informan dari Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah menyatakan bahwa kebijakan daerah mengikuti arah kebijakan nasional, meskipun terdapat beberapa penyesuaian sesuai dengan kemampuan dan konteks lokal. Kejelasan aturan teknis pelaksanaan kebijakan dinilai sudah baik dan mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Regulasi teknis seperti juknis dan SOP menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun keberadaannya di tingkat sekolah masih bervariasi. Secara umum, regulasi daerah menunjukkan

¹²⁰ Wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, 21 Mei, 26 Mei dan 29 Mei 2025.

konsistensi dan keberlanjutan, meskipun beberapa kebijakan mengalami perubahan seiring dinamika kebutuhan daerah. Temuan ini mencerminkan bahwa aspek regulasi telah mendukung implementasi kebijakan pendidikan, namun masih diperlukan penguatan pada konsistensi internal sekolah dan pelengkapan dokumen teknis di semua satuan pendidikan agar pelaksanaan kebijakan lebih optimal dan merata.

b. Aspek Anggaran Pendidikan

Aspek anggaran pendidikan dalam penelitian ini mencakup tiga indikator utama, yaitu proporsi alokasi APBD untuk pendidikan (20%), efisiensi dan ketepatan waktu serapan anggaran, serta fokus penggunaan anggaran terhadap infrastruktur pendidikan. Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang serta beberapa kepala sekolah menunjukkan gambaran yang relatif positif, meskipun ditemukan pula beberapa catatan penting dari hasil observasi lapangan.

Pertama, mengenai proporsi APBD untuk pendidikan, mayoritas informan menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kepahiang berkisar atau diupayakan sebesar 20% dari total APBD. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menegaskan bahwa pihak Dinas selalu mengupayakan agar alokasi mencapai 20%, sedangkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyatakan bahwa alokasi sudah sesuai dengan ketentuan minimal nasional. Namun, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang menyoroti

bahwa anggaran sekolah lebih banyak bersumber dari APBN melalui dana BOS, bukan sepenuhnya dari APBD, sementara Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas mengaku kurang memahami detail proporsionalitas anggaran tersebut.¹²¹

Kedua, serapan anggaran pendidikan dinilai efisien dan tepat waktu oleh seluruh informan. Mereka menilai bahwa pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik tanpa penundaan yang signifikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang secara spesifik menyebut bahwa anggaran digunakan dengan efisiensi, dan Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang serta Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyatakan bahwa proses penyerapan berlangsung lancar serta mendukung kegiatan pendidikan.¹²²

Ketiga, terkait fokus anggaran pada infrastruktur pendidikan, pendapat informan relatif bervariasi. Sebagian seperti Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyatakan bahwa alokasi untuk infrastruktur cukup besar, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas bahkan menyebut perhatian terhadap infrastruktur cukup penuh. Namun, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menganggap perhatian pemerintah terhadap infrastruktur masih sedang, dan Kepala Sekolah

¹²¹ Wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 28 Mei, 26 Mei dan 15 Mei 2025.

¹²² Wawancara dengan Kabid Dikdas, Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, 21 Mei dan 28 Mei 2025.

SMPN 3 Kepahiang secara tegas menyatakan bahwa anggaran untuk infrastruktur di sekolah tempatnya bertugas masih minim.¹²³

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, terutama pada aspek kebutuhan infrastruktur. Di SMPN 3 Kepahiang, ditemukan kebutuhan rehabilitasi tiga ruang belajar dan tiga WC untuk kelas 8 yang kondisinya rusak. Di SMPN 2 Tebat Karai, kondisi gedung masih menggunakan ruang kelas baru (RKB), namun mengalami kerusakan pada plafon, lantai, atap, dan jendela, serta tidak memiliki ruang khusus untuk guru dan tata usaha. Selain itu, perpustakaan masih menggunakan ruang keterampilan. Sementara itu, kondisi SMPN 2 Ujan Mas relatif lebih baik, karena sarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan WC telah direhabilitasi pada tahun 2022 sehingga kondisinya relatif lebih baik.¹²⁴

Secara keseluruhan, anggaran pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah dialokasikan dan diserap secara tepat waktu dan efisien. Namun, fokus terhadap pembangunan infrastruktur masih belum merata, dengan kondisi sekolah yang berbeda-beda, khususnya antara wilayah yang lebih maju dan yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas dasar pendidikan. Temuan ini menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih berbasis kebutuhan aktual lapangan dan berkeadilan antarsekolah.

¹²³ Wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, Kabid Dikdas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 28 Mei, 15 Mei dan 26 Mei 2025.

¹²⁴ Observasi lapangan SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, SMPN 2 Ujan Mas, 26 Mei, 28 Mei dan 29 Mei 2025.

c. Aspek Koordinasi Antar-Stakeholder

Aspek koordinasi antar-stakeholder dalam implementasi kebijakan pendidikan mencakup tiga indikator utama: tingkat partisipasi komite sekolah, masyarakat, dan sektor swasta; frekuensi dan efektivitas koordinasi antar lembaga serta keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Kepahiang, serta hasil observasi lapangan di tiga SMP negeri, diperoleh gambaran bahwa koordinasi secara umum berjalan cukup baik, meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaannya.

Pertama, terkait tingkat partisipasi stakeholder, sebagian besar informan menyebutkan bahwa pelibatan berbagai pihak dalam proses pendidikan sudah berjalan. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menyebutkan bahwa pengambilan kebijakan dilakukan dengan melibatkan Kepala Daerah, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), dan Kepala Dinas. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menambahkan bahwa stakeholder yang terlibat juga mencakup konsultan, PUPR, serta pihak pusat. Dari sisi sekolah, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menekankan pentingnya peran komite sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar dalam mendukung kegiatan pendidikan. Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan

didasarkan atas usulan dari satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.¹²⁵

Kedua, mengenai frekuensi dan efektivitas koordinasi antar lembaga, para narasumber umumnya sepakat bahwa koordinasi berlangsung sering dan cukup efektif. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menyatakan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin. Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang bahkan menyebutnya sangat efektif, sementara Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyebut koordinasi berjalan cukup sering dan tergolong efektif. Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas juga menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi berlangsung secara rutin.¹²⁶

Ketiga, terkait keterlibatan lintas sektor, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa sektor lain seperti PU, PUPR, konsultan, dan pemerintah pusat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas memberikan keterangan

¹²⁵ Wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 26 Mei, 28 Mei dan 15 Mei 2025.

¹²⁶ Wawancara dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 26 Mei, 15 Mei 2025

bahwa lintas sektor sering dilibatkan, baik secara formal maupun informal. Namun, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang menyampaikan bahwa keterlibatan lintas sektor di sekolah tempatnya bertugas masih belum tampak, mengindikasikan adanya disparitas dalam implementasi kebijakan antar sekolah.¹²⁷

Data observasi juga memperkuat hasil wawancara, khususnya dalam hal partisipasi wali murid. Di SMPN 3 Kepahiang, pertemuan dengan wali murid dilakukan rutin sekitar tiga kali setiap bulan, menyesuaikan kebutuhan. Di SMPN 2 Tebat Karai, pertemuan dilaksanakan setiap minggu sekali, menunjukkan tingginya interaksi antara sekolah dan orang tua. Sementara itu, SMPN 2 Ujan Mas mengadakan rapat wali murid satu kali dalam setahun atau saat diperlukan, menunjukkan koordinasi yang lebih fleksibel dan insidental, menunjukkan interaksi antara sekolah dengan orang tua murid lebih rendah dibandingkan dengan 2 sekolah lainnya.

Secara keseluruhan, koordinasi antar-stakeholder di Kabupaten Kepahiang tergolong cukup aktif dan efektif, terutama di tingkat Dinas dan sekolah-sekolah tertentu. Namun, variasi partisipasi dan keterlibatan antar sekolah menunjukkan perlunya standarisasi dan penguatan sistem koordinasi, agar kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan lebih merata dan inklusif di semua wilayah.

¹²⁷ Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 15 Mei dan 26 Mei 2025.

Tabel 4.10 Perbandingan rencana kebijakan dan hasil implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.¹²⁸

Aspek	Rencana Kebijakan	Hasil Implementasi	Keterangan
Regulasi Pendidikan	Menyusun dan menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional (Perbup No. 23/2022, Perbup No. 5/2023, Perbup No. 17/2024)	Sebagian besar kebijakan sudah selaras dengan kebijakan nasional; ada harmonisasi 80% tingkat keselarasan menurut salah satu informan	Perlu peningkatan agar mencapai 100% keselarasan
Aturan Teknis	Menyediakan juknis pelaksanaan kebijakan berbasis regulasi nasional (Perpres 57/2024, Perpres 71/2025, Permendikbudristek No. 3/2022)	Aturan teknis dinilai jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan	Pelaksanaan cukup efektif, namun belum seluruh sekolah memiliki SOP turunan
Konsistensi dan Keberlanjutan	Regulasi dijalankan secara berkelanjutan dan konsisten setiap tahun	Konsisten, tetapi terdapat dinamika tergantung pada ketersediaan anggaran	Perlu penguatan internal di tingkat satuan pendidikan
Anggaran Pendidikan	Alokasi 20% peningkatan DAK untuk infrastruktur, efisiensi anggaran	APBD, DAK meningkat dari Rp 5 miliar (2023) menjadi Rp 15 miliar (2024), serapan anggaran efisien dan tepat waktu	Infrastruktur belum merata antar sekolah; sekolah dengan siswa <60 belum dijangkau DAK
Fokus Infrastruktur	Pemenuhan sarpras seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, MCK melalui DAK dan verifikasi kebutuhan	SMPN 2 Ujan Mas telah direhabilitasi; SMPN 3 Kepahiang dan SMPN 2 Tebat Karai masih kekurangan ruang dan fasilitas	Perlu pemetaan prioritas pembangunan berbasis kondisi real di lapangan
Koordinasi Antar-Stakeholder	Meningkatkan kolaborasi dengan komite, masyarakat, PUPR, sektor swasta, dan konsultan	Koordinasi aktif, partisipasi komite dan masyarakat berjalan baik, tetapi berbeda-beda di setiap sekolah	Perlu standarisasi dan sistem koordinasi yang lebih menyeluruh di semua satuan pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang telah menunjukkan kemajuan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan infrastruktur pendidikan yang selaras dengan kebijakan nasional. Namun,

¹²⁸ Dokumentasi. Perbandingan rencana kebijakan dan hasil implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025

tantangan tetap ada dalam hal meratakan implementasi di seluruh sekolah, memperkuat SOP internal sekolah, serta memastikan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Koordinasi yang telah terjalin baik perlu diperluas dan ditingkatkan untuk menjangkau seluruh pihak terkait secara lebih inklusif dan konsisten.

2. Kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Implementasi Infrastruktur Pendidikan

Implementasi infrastruktur pendidikan mencerminkan sejauh mana kebijakan pembangunan fisik sekolah telah diterapkan di lapangan. Tiga indikator utama yang dianalisis adalah jumlah dan distribusi ruang kelas, ketersediaan fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik, internet), serta sebaran geografis bantuan infrastruktur pendidikan.

Pertama, Jumlah dan Distribusi Ruang Kelas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa jumlah dan distribusi ruang kelas di Kabupaten Kepahiang sudah relatif merata. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menyebutkan bahwa data terkait kondisi bangunan sekolah telah tercatat dalam sistem Dapodik, sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyatakan bahwa distribusi ruang kelas sudah cukup dan merata. Hal ini juga diperkuat oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang yang menyebutkan bahwa ruang kelas tertata baik dan memenuhi kebutuhan belajar. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan adanya

ketimpangan. Di SMPN 3 Kepahiang, dari 15 ruang kelas yang tersedia, hanya 10 yang digunakan, sementara sisanya dalam kondisi rusak parah, terutama pada bagian plafon dan atap. Kondisi ini kontras dengan SMPN 2 Tebat Karai yang memiliki 12 ruang kelas dengan kondisi cukup baik dan masih digunakan secara optimal. Adapun SMPN 2 Ujan Mas memiliki 11 ruang kelas, namun hanya 6 yang digunakan karena jumlah siswa yang terbatas. Data ini menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas secara umum mencukupi, namun kondisi fisiknya masih membutuhkan perhatian, khususnya untuk sekolah yang belum direhabilitasi dalam jangka waktu lama.¹²⁹

Kedua, Ketersediaan Fasilitas Dasar (Air, Sanitasi, Listrik, Internet) Ketersediaan fasilitas dasar di sekolah-sekolah di Kabupaten Kepahiang menunjukkan variasi antar satuan pendidikan. Informan seperti Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyatakan bahwa fasilitas dasar seperti toilet, listrik, dan air sudah cukup memadai, sementara Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menilai fasilitas tersebut belum sepenuhnya memadai. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang secara rinci menyebut bahwa toilet tersedia namun membutuhkan revitalisasi, air bersih belum merata, dan jaringan internet di beberapa sekolah masih lemah. Temuan ini sejalan dengan observasi di SMPN 3 Kepahiang, di mana air dan listrik tersedia namun jaringan internet kurang

¹²⁹ Wawancara dan Observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 15-29 Mei, 26 Mei 2025

stabil dan kondisi fisik bangunan seperti ruang guru juga rusak. Sebaliknya, SMPN 2 Tebat Karai telah memiliki laboratorium komputer dan UKS sejak 2004, meskipun belum ada pembaruan dalam beberapa tahun terakhir. Di SMPN 2 Ujan Mas, air bersih tersedia dari sumur bor bantuan dinas tahun 2019, listrik tersedia namun tidak stabil saat ujian, dan internet sudah dapat diakses dengan baik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas dasar secara umum telah tersedia, tetapi kualitas dan konsistensinya masih perlu ditingkatkan agar lebih merata antar sekolah.¹³⁰

Ketiga, Sebaran Geografis Bantuan Infrastruktur Pendidikan Sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa bantuan infrastruktur pendidikan sudah menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, dan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menyatakan bahwa penyaluran bantuan telah dilakukan secara geografis sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat pada SMPN 2 Ujan Mas yang telah mendapatkan bantuan sumur bor tahun 2019 dan rehabilitasi ruang kelas hingga tahun 2022. Namun demikian, terdapat pula narasumber seperti Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas yang mengaku kurang memahami distribusi bantuan tersebut, yang menunjukkan bahwa tidak semua pihak di satuan

¹³⁰ Wawancara dan Observasi. Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, 26 Mei, 27-28 Mei dan 21 Mei 2025.

pendidikan menerima informasi yang utuh mengenai penyaluran bantuan. Observasi juga menemukan bahwa meskipun SMPN 3 Kepahiang berada di pusat kabupaten, sekolah ini belum pernah direhabilitasi sejak 2004 dan kini mengalami kerusakan parah pada beberapa bagian bangunan. Hal ini mencerminkan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya mempertimbangkan urgensi kondisi fisik, dan masih terdapat sekolah-sekolah yang tertinggal dalam hal peningkatan infrastruktur dasar.¹³¹

Kesimpulan Umum. Implementasi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah memperlihatkan upaya distribusi ruang kelas dan penyaluran bantuan ke berbagai wilayah, termasuk sekolah-sekolah di daerah pinggiran. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait kualitas fisik bangunan yang belum direhabilitasi, keterbatasan akses air bersih, serta kestabilan akses internet dan listrik. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan tidak hanya pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan kelayakan infrastruktur pendidikan agar seluruh siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

b. Aspek Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan tolok ukur sejauh mana kebijakan pembangunan sarana prasarana pendidikan telah menjangkau seluruh wilayah, baik dari segi jumlah fasilitas, kualitas antarwilayah, maupun kepuasan pengguna. Aspek ini dianalisis berdasarkan tiga indikator: rasio

¹³¹ Wawancara dan Observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, SMPN 2 Ujan Mas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 15-28 Mei, 26 Mei 2025

fasilitas per kecamatan, mutu infrastruktur antar wilayah (desa vs kota), dan kepuasan terhadap sarana prasarana pendidikan.

Pertama, Rasio Fasilitas per Kecamatan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa rasio fasilitas pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Kepahiang sudah menunjukkan pemerataan yang cukup baik. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menjelaskan bahwa distribusi fasilitas pendidikan telah berjalan secara menyeluruh, meskipun di beberapa wilayah seperti Desa Air Punggur dan Desa Damar Kencana di Kecamatan Muara Kemumu masih menghadapi kendala geografis yang menyulitkan akses. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menilai bahwa distribusi fasilitas sudah diperhatikan dan terkelola, sementara Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menyebutkan distribusi telah merata antar kecamatan. Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas juga menyatakan bahwa rasio antar kecamatan cukup seimbang, meskipun Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang mengaku kurang mengetahui secara pasti. Secara umum, implementasi pemerataan fasilitas telah berjalan, namun tantangan geografis di wilayah-wilayah tertentu masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya secara menyeluruh.¹³²

¹³² Wawancara dan Observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 27-28 Mei, 15-28 Mei dan 26 Mei 2025.

Kedua, Mutu Infrastruktur antar Wilayah (Desa vs Kota). Dari hasil wawancara, seluruh informan secara konsisten menyatakan bahwa mutu infrastruktur pendidikan antara wilayah desa dan kota masih belum setara. Jawaban seperti “tidak” dan “tidak terlalu” dari informan mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup terasa dalam hal kualitas fasilitas pendidikan. Hal ini diperkuat dengan data observasi lapangan, di mana SMPN 3 Kepahiang yang berada di pusat kota justru menunjukkan kondisi infrastruktur yang kurang layak seperti ruang kelas dengan kursi kayu tua dan rusak, penggunaan kursi plastik, serta ketiadaan mushola. Sementara itu, SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas yang berada di wilayah desa memiliki sarana yang lebih terawat, meskipun juga memiliki kekurangan tertentu. Misalnya, SMPN 2 Ujan Mas memiliki laboratorium dan perpustakaan yang baik serta masjid bantuan DAK 2022, namun belum memiliki aula sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa mutu infrastruktur tidak selalu mengikuti lokasi geografis, tetapi dipengaruhi oleh pemeliharaan, dukungan program, dan pengelolaan di masing-masing satuan pendidikan.¹³³

Ketiga, Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan. Semua informan menyatakan bahwa mereka tidak puas terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan saat ini. Ketidakpuasan ini muncul dari kondisi fasilitas yang tidak merata dan belum sepenuhnya layak digunakan secara optimal. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan, seperti yang terlihat di SMPN 3

¹³³ Wawancara dan Observasi. Informan Dinas pendidikan dan kebudayaan, SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 28 Mei, 27-28 Mei, 25-28 Mei 2025

Kepahiang, di mana banyak perabot kelas yang sudah tidak layak pakai, dan fasilitas penting seperti mushola belum tersedia. Meskipun dua sekolah lain memiliki fasilitas yang relatif lebih baik, seperti laboratorium dan perpustakaan yang tertata rapi, namun penggunaan fasilitas seperti masjid belum optimal dan ada keterbatasan ruang pendukung seperti aula. Ketidakpuasan ini mengindikasikan perlunya langkah konkret untuk melakukan pemeliharaan, revitalisasi, dan pengadaan sarana prasarana secara adil dan berkualitas agar menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan dalam kegiatan belajar-mengajar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.¹³⁴

c. Aspek Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, diketahui bahwa secara umum jarak sekolah dari pemukiman siswa tergolong dekat dan tidak menjadi kendala utama. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menyatakan bahwa apabila siswa bersekolah sesuai dengan zonasi tempat tinggal, maka tidak akan ada hambatan berarti dalam hal jarak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai yang menyebutkan bahwa rata-rata jarak rumah siswa ke sekolah berada di bawah 1 hingga 3 kilometer. Namun demikian, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas

¹³⁴ Wawancara dan Observasi. SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, SMPN 2 Ujan Mas, 26 Mei, 27-28 Mei dan 15-28 Mei 2025

Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang memberikan catatan bahwa tidak semua siswa tinggal dalam radius dekat sekolah, sehingga kemungkinan masih terdapat sebagian kecil siswa yang harus menempuh jarak lebih jauh.¹³⁵

Dalam hal moda dan akses transportasi ke sekolah, siswa umumnya menggunakan jalan kaki, kendaraan roda dua seperti sepeda motor, atau transportasi umum. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa moda transportasi cukup memadai dan tersedia. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menggaris bawahi adanya hambatan khusus di daerah terpencil seperti Air Pungur dan Damar Kencana, terutama saat musim hujan. Akses jalan yang masih berupa tanah dan berlumpur menyebabkan kendaraan sulit melewati kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun moda transportasi tersedia, infrastruktur jalan yang belum layak masih menjadi tantangan di daerah tertentu.¹³⁶

Hasil observasi lapangan di tiga SMP juga memberikan gambaran aksesibilitas yang beragam. SMPN 3 Kepahiang berada di dalam gang sekitar 300 meter dari jalan utama. Meskipun kondisi jalan sudah berupa semen cor dan dapat dilalui kendaraan bermotor, siswa sebagian besar tetap berjalan kaki karena ada kebijakan dari Dinas Pendidikan yang melarang siswa membawa kendaraan pribadi. SMPN 2 Tebat Karai memiliki akses yang lebih dekat dengan jalan umum, sekitar 150 meter, dan jalan masuk dapat dilalui motor dan

¹³⁵ Wawancara dan Observasi Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Kabid Dikdas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, 21 Mei, 26 Mei, 29 Mei 2025.

¹³⁶ Wawancara, Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, 21 Mei 2025.

mobil, serta siswa umumnya menggunakan jalan kaki atau transportasi umum. Sementara itu, SMPN 2 Ujan Mas memiliki akses paling ideal karena letaknya tepat di pinggir jalan lintas Kepahiang – Curup, memudahkan siswa menjangkau sekolah baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki.¹³⁷

Tabel 4.11 Perbandingan Rencana dan Hasil Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang.¹³⁸

Aspek Pemerataan Infrastruktur	Rencana	Hasil	Keterangan
Jumlah dan Distribusi Ruang Kelas	Penyediaan ruang kelas merata sesuai jumlah siswa dan lokasi	Jumlah ruang kelas cukup, namun beberapa rusak dan tidak digunakan (contoh: SMPN 3 Kepahiang)	Pemerataan kuantitas tercapai, namun kualitas fisik masih menjadi masalah
Ketersediaan Fasilitas Dasar (air, sanitasi, listrik, internet)	Memenuhi standar layanan dasar pendidikan di seluruh sekolah	Sebagian besar sekolah memiliki fasilitas dasar, tapi kualitas dan stabilitas bervariasi	Air bersih belum merata, jaringan internet lemah di beberapa sekolah
Sebaran Bantuan Infrastruktur Secara Geografis	Penyaluran bantuan ke seluruh wilayah, termasuk terpencil	Bantuan menjangkau sebagian besar sekolah (contoh: SMPN 2 Ujan Mas), tapi ada yang belum tersentuh sejak 2004 (SMPN 3 Kepahiang)	Perlu pemerataan berbasis kondisi fisik aktual, bukan hanya zonasi
Rasio Fasilitas antar Kecamatan	Distribusi fasilitas merata ke seluruh kecamatan	Sebagian besar kecamatan sudah memiliki fasilitas yang seimbang, meski ada kendala geografis di daerah terpencil	Wilayah seperti Muara Kemumu masih mengalami hambatan akses
Mutu Infrastruktur antar Wilayah (desa vs kota)	Meningkatkan kesetaraan mutu infrastruktur antarwilayah	Mutu belum merata; beberapa sekolah desa lebih baik dari kota	Mutu dipengaruhi oleh pengelolaan dan program, bukan lokasi
Kepuasan terhadap Sarana Prasarana	Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap infrastruktur pendidikan	Umumnya belum puas; fasilitas seperti aula dan mushola belum tersedia di beberapa sekolah	Butuh revitalisasi, pengadaan fasilitas pendukung secara adil
Aksesibilitas Pendidikan	Memastikan semua siswa dapat menjangkau sekolah dengan mudah	Sebagian besar siswa memiliki akses yang mudah; wilayah terpencil terkendala saat musim hujan	Infrastruktur jalan perlu ditingkatkan untuk menunjang akses yang merata

¹³⁷ Observasi Lapangan. SMPN 3 Kepahiang , SMPN 2 Tebat Karai , SMPN 2 Ujan Mas, 26 Mei, 27 Mei dan 28 Mei 2025

¹³⁸ Dokumentasi. Perbandingan Rencana dan Hasil Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Diakses tanggal 6 Agustus 2025

Secara keseluruhan, aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Kepahiang dapat dikatakan cukup baik, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah strategis. Namun, masih terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan kondisi geografis yang menantang, yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan. Hal ini penting agar tidak ada kesenjangan akses pendidikan antara siswa yang tinggal di pusat kota dengan mereka yang berada di desa atau wilayah terpencil. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua anak memiliki akses fisik yang aman dan mudah menuju sekolah demi mendukung pemerataan pendidikan secara menyeluruh.

3. Implikasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Infrastruktur Pendukung

Ketersediaan listrik, air bersih, dan internet merupakan infrastruktur pendukung yang krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung proses pembelajaran, terutama di era digital saat ini. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyampaikan bahwa listrik di sekolah-sekolah di Kabupaten Kepahiang sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Hal ini ditegaskan oleh Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang yang menyatakan bahwa listrik sudah tersedia di seluruh sekolah. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai yang menyebutkan bahwa listrik tersedia dan berjalan lancar. Hanya Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kepahiang yang menilai bahwa ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik belum terlalu memadai, mengindikasikan adanya kemungkinan perbedaan kualitas atau kelancaran pasokan listrik antar sekolah. Dari hasil observasi di lapangan, ketiga sekolah yang diamati (SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, dan SMPN 2 Ujan Mas) secara umum memiliki instalasi listrik yang baik dan aman, bahkan beberapa sudah menggunakan mesin sanyo untuk membantu suplai listrik dan air.¹³⁹

Untuk akses air bersih, temuan lapangan menunjukkan adanya tantangan yang perlu diperhatikan. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang menjelaskan bahwa meskipun secara umum air tersedia, beberapa sekolah masih memerlukan perbaikan saluran atau pengadaan sumur bor. Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai juga menggarisbawahi bahwa air masih tersendat dan tidak selalu lancar, walau secara umum tersedia. Observasi di SMPN 2 Tebat Karai menguatkan hal tersebut: air di WC siswa ada yang tidak mengalir, sehingga menyulitkan penggunaannya. Sementara di SMPN 3 dan SMPN 2 Ujan Mas, air diperoleh melalui sumur bor dan mesin sanyo, namun kelancarannya tetap bergantung pada ketersediaan daya listrik dan sistem distribusi.¹⁴⁰

¹³⁹ Wawancara dan Observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, dan SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 27-28 Mei, 26 Mei, 15-28 Mei 2025

¹⁴⁰ Wawancara dan observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 27 Mei 28 Mei 2025.

Dalam hal akses internet, kondisi yang ditemukan cukup bervariasi antar sekolah. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang mengungkapkan bahwa masih ada sekolah yang belum terjangkau jaringan internet, dan ini dikonfirmasi melalui observasi di SMPN 3 Kepahiang, di mana akses internet sering bermasalah, terutama saat pelaksanaan ujian berbasis komputer. Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang juga menyatakan bahwa internet butuh penambahan daya untuk lebih optimal. Di sisi lain, SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas disebutkan telah menggunakan jaringan wifi sekolah yang cukup lancar, sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai. Artinya, meskipun sebagian sekolah telah memiliki jaringan internet yang baik, pemerataan akses dan kestabilan koneksi masih menjadi tantangan, khususnya bagi sekolah yang berada di wilayah yang sinyalnya lemah atau jauh dari infrastruktur jaringan.¹⁴¹

Kesimpulan Sementara. Secara umum, listrik di sekolah-sekolah Kabupaten Kepahiang telah tersedia dan berfungsi dengan baik, namun akses air bersih dan internet masih belum merata dan stabil, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Revitalisasi jaringan air dan penguatan sinyal internet perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur pendukung ke depan, guna menjamin kualitas proses pembelajaran yang lebih optimal di semua satuan pendidikan.

¹⁴¹ Wawancara dan observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 26 Mei, 27-28 Mei, 15-28 Mei 2025.

b. Aspek Peran Masyarakat dan Stakeholder

Peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan dinamika yang beragam antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Dari hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas . Mereka menyatakan bahwa masyarakat memiliki kontribusi dalam mendukung pengembangan infrastruktur sekolah, walaupun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Sebaliknya, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang menyatakan bahwa peran masyarakat atau lembaga non-pemerintah masih minim atau bahkan belum terlihat secara signifikan.¹⁴²

Data observasi di lapangan memberikan gambaran yang lebih konkret. Di SMPN 3 Kepahiang, keterlibatan wali murid cukup aktif dan rutin. Wali murid mengadakan pertemuan sekitar tiga kali dalam sebulan untuk membahas berbagai kebijakan sekolah, terutama yang menyangkut siswa dan siswi. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung kegiatan sekolah. Namun, kolaborasi dengan pihak di luar sekolah seperti

¹⁴² Wawancara dan Observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kabid Dikdas, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 15 Mei, 26 Mei 2025

lembaga non-pemerintah atau sektor swasta belum terlihat atau belum terbangun secara formal. Situasi serupa juga terlihat di SMPN 2 Tebat Karai, di mana koordinasi dengan wali murid berjalan dengan baik dan cukup intens, yaitu satu kali dalam sepekan. Namun, seperti halnya SMPN 3 Kepahiang, sekolah ini belum menjalin kolaborasi lebih luas dengan stakeholder eksternal di luar lingkungan sekolah. Kegiatan yang melibatkan lembaga non-pemerintah atau komunitas lokal masih belum dilakukan secara terstruktur. Padahal, potensi keterlibatan berbagai pihak seperti dunia usaha, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal dapat menjadi kekuatan kolektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Kurangnya inisiatif membangun jejaring lintas sektor ini menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Di SMPN 2 Ujan Mas, koordinasi dengan wali murid dilakukan dengan intensitas yang lebih rendah, sekitar satu kali dalam setahun atau tergantung pada kebutuhan sekolah seperti saat rapat komite. Meskipun demikian, sekolah ini pernah menerima kunjungan dari lembaga eksternal seperti Polri dan Kejaksaan yang melaksanakan sosialisasi ke sekolah. Walau bukan dalam konteks pembangunan fisik, kunjungan tersebut menunjukkan bentuk keterlibatan stakeholder non-pemerintah dalam mendukung fungsi edukatif sekolah.¹⁴³

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam bentuk keterlibatan wali murid sudah berjalan cukup baik, khususnya dalam hal musyawarah dan mendukung operasional sekolah. Namun, peran

¹⁴³ Observasi Lapangan, SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, SMPN 2 Ujan mas, 26 Mei, 27 Mei, 28 Mei 2025.

lembaga non-pemerintah dan stakeholder eksternal dalam pembangunan atau pengembangan infrastruktur pendidikan masih minim dan belum terstruktur, sehingga perlu upaya penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepahiang dapat lebih partisipatif dan berkelanjutan.

c. Aspek Efektivitas Penggunaan dan Dampak Infrastruktur Pendidikan

Hasil wawancara dengan para narasumber dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan oleh guru dan siswa telah berjalan dengan baik. Seluruh narasumber menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia telah digunakan secara rutin dalam proses pembelajaran. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas semuanya sepakat bahwa fasilitas yang ada seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat pembelajaran digunakan secara efektif oleh guru dan peserta didik. Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menambahkan bahwa guru menggunakan sarana prasarana yang tersedia dengan baik, dan penggunaan fasilitas ini turut meningkatkan kualitas pembelajaran.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Wawancara. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, 21 Mei, 26 Mei, 27 Mei dan 15 Mei 2025.

Lebih lanjut, para narasumber juga menyoroti dampak dari infrastruktur pendidikan terhadap kehadiran dan proses pembelajaran di sekolah. Semua informan menyatakan bahwa terdapat kehadiran siswa dan guru yang konsisten, dan infrastruktur yang memadai berkontribusi terhadap meningkatnya antusiasme serta kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM). Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai menilai bahwa kehadiran dan mutu pembelajaran mengalami peningkatan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas yang menyebut bahwa antusiasme guru dan siswa meningkat seiring dengan perbaikan sarana yang mendukung KBM.¹⁴⁵

Berdasarkan observasi di SMPN 3 Kepahiang, penggunaan sarana dan prasarana cukup optimal. Laboratorium dan perpustakaan menjadi bagian yang rutin dimanfaatkan dalam pembelajaran. Data absensi dan nilai raport siswa kelas 9 antara semester 1 dan semester 2 menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan adanya korelasi positif antara pemanfaatan sarana prasarana dengan hasil belajar siswa. Namun, kondisi yang berbeda ditemukan di SMPN 2 Tebat Karai. Meskipun ruang multimedia digunakan secara rutin oleh guru dan siswa, hasil observasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai ujian siswa antara tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan infrastruktur belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan hasil belajar, dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pedagogik atau manajemen pembelajaran. Sementara itu, di SMPN 2

¹⁴⁵ Wawancara. Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, 28 Mei dan 15 Mei 2025.

Ujan Mas, fasilitas seperti laboratorium IPA dan perpustakaan digunakan secara rutin dalam pembelajaran. Namun, fasilitas masjid sekolah hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan tertentu dan tidak setiap hari dimanfaatkan untuk ibadah siswa. Hasil ujian nasional tahun 2014/2015 dan 2016/2017 menunjukkan tidak adanya peningkatan signifikan dalam capaian akademik siswa, yang menandakan bahwa pemanfaatan infrastruktur berjalan baik namun belum berdampak secara nyata terhadap peningkatan hasil belajar secara agregat.¹⁴⁶

Tabel 4.12 Perbandingan Rencana dan Hasil Implikasi Kebijakan terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan.¹⁴⁷

Aspek	Rencana Kebijakan	Hasil Implementasi	Keterangan
Infrastruktur Pendukung (Listrik, Air Bersih, Internet)	Menyediakan dan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan internet di seluruh sekolah	Listrik sudah tersedia di hampir semua sekolah dan berfungsi baik; air bersih dan internet masih belum merata dan tidak selalu stabil	Pemerataan infrastruktur dasar belum optimal; air dan internet perlu peningkatan kualitas dan distribusi
Peran Masyarakat dan Stakeholder	Mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor non-pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan	Partisipasi wali murid cukup baik, terutama dalam forum internal; kolaborasi dengan stakeholder eksternal (LSM, dunia usaha) masih minim	Potensi kolaborasi lintas sektor belum dimanfaatkan secara optimal; perlu penguatan kemitraan
Efektivitas Penggunaan Sarpras	Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran	Penggunaan fasilitas berjalan baik di semua sekolah; namun dampaknya terhadap hasil belajar tidak merata	Pemanfaatan belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan akademik; perlu strategi pembelajaran dan manajemen mutu yang lebih baik

¹⁴⁶ Observasi Lapangan. SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, 26 Mei, 27 Mei dan 28 Mei 2025.

¹⁴⁷ Dokumentasi. Perbandingan Rencana dan Hasil Implikasi Kebijakan terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan. Diakses 6 Agustus 2025

Kebijakan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, namun efektivitas pemerataan dan dampaknya masih bervariasi. Ketersediaan infrastruktur pendukung dasar, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan sarana prasarana perlu ditingkatkan secara simultan melalui pendekatan kolaboratif, pembinaan berkelanjutan, serta pengelolaan berbasis mutu untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana prasarana di sekolah-sekolah yang diteliti sudah berjalan efektif, namun dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan hasil akademik masih bervariasi antar satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai perlu didukung oleh sistem pengelolaan, strategi pembelajaran, dan pengawasan mutu yang berkelanjutan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap prestasi peserta didik

C. Pembahasan

1. Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Regulasi Pendidikan

Aspek regulasi pendidikan memegang peranan penting dalam menjembatani arah kebijakan nasional dengan realitas dan kebutuhan di daerah. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kepahiang, ditemukan bahwa secara umum regulasi daerah dalam bidang pendidikan telah menunjukkan keselarasan dengan kebijakan nasional. Para informan dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menyatakan bahwa kebijakan daerah “mengikuti”, “bersinergi”, dan

“selaras” dengan regulasi pusat, sebagaimana diungkapkan oleh Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, dan lainnya. Namun, catatan dari Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang yang menyatakan bahwa tingkat keselarasan baru sekitar 80% menunjukkan masih adanya ruang harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah, baik dalam aspek substansi maupun teknis implementasi.

Temuan ini sejalan dengan teori kebijakan pendidikan nasional dan daerah yang menyebutkan pentingnya koherensi antara kebijakan pusat dan daerah (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).¹⁴⁸ Dalam pelaksanaannya, kebijakan nasional perlu dielaborasi di tingkat daerah melalui dokumen-dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan karakteristik lokal, selama tetap berada dalam kerangka regulasi nasional. Ketika sinkronisasi ini berjalan baik, maka program-program pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, dapat dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Terkait kejelasan aturan teknis pelaksanaan kebijakan, semua informan menyampaikan bahwa regulasi teknis seperti petunjuk teknis (juknis), standar operasional prosedur (SOP), dan dokumen pendukung lainnya cukup jelas dan dapat diimplementasikan di sekolah. Namun, dari hasil observasi lapangan ditemukan variasi dalam pemanfaatan dokumen teknis tersebut. SMPN 3

¹⁴⁸ Rolos et al., *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara*.

Kepahiang memiliki SOP yang lengkap, sementara SMPN 2 Tebat Karai tidak memiliki SOP internal, dan SMPN 2 Ujan Mas hanya mengandalkan juknis dari Dinas Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi teknis telah tersedia di tingkat kabupaten, penyebaran dan pemanfaatannya di tingkat satuan pendidikan belum seragam.

Kondisi ini memperkuat pentingnya kapasitas tata kelola daerah, sebagaimana dikemukakan dalam kajian kebijakan infrastruktur pendidikan oleh Bappenas (2021) dan RPJMN.¹⁴⁹ Pemerintah pusat memang bertindak sebagai penyedia kerangka kebijakan dan dana, seperti dalam program DAK Fisik, namun efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kelembagaan daerah. Ketimpangan kapasitas ini menjadi salah satu penyebab tidak meratanya implementasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal pemerataan infrastruktur pendidikan.

Dalam hal konsistensi dan keberlanjutan kebijakan, para informan pada umumnya menilai bahwa kebijakan pendidikan di daerah telah berjalan secara berkelanjutan. Namun, terdapat dinamika dan penyesuaian terhadap konteks lokal, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai. Artinya, kebijakan pendidikan tidak bersifat kaku, melainkan perlu adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, kondisi anggaran, dan prioritas pembangunan. Prinsip ini relevan dengan pendekatan *bottom-up planning*

¹⁴⁹ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

dalam pengelolaan kebijakan pendidikan, yang mengutamakan identifikasi kebutuhan riil dari bawah ke atas.

Lebih lanjut, dari perspektif teori pemerataan (Equity Theory) oleh Adams (1963), regulasi pendidikan di daerah harus mampu mewujudkan distribusi sumber daya secara adil, berdasarkan kebutuhan wilayah dan kemampuan sekolah.¹⁵⁰ Jika regulasi tidak konsisten atau tidak didukung dengan dokumen teknis yang kuat, maka risiko terjadinya ketimpangan implementasi menjadi lebih besar, terutama di wilayah-wilayah yang kurang memiliki kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan sistem regulasi teknis dan peningkatan kapasitas manajerial sekolah menjadi hal penting untuk mendorong pemerataan kebijakan pendidikan yang tidak hanya setara secara administratif, tetapi juga adil secara substantif.

Akhirnya, regulasi pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah menunjukkan kemajuan dalam sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan memiliki kejelasan aturan teknis. Namun, perbedaan kapasitas pelaksanaan di tingkat sekolah dan belum optimalnya penyebaran SOP atau juknis menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada konsistensi internal dan dukungan kelembagaan di satuan pendidikan. Ke depan, upaya memperkuat regulasi teknis secara merata dan memperluas pelatihan pemahaman kebijakan di seluruh sekolah perlu dilakukan agar implementasi kebijakan pendidikan benar-benar berjalan efektif, adaptif, dan merata di seluruh wilayah khusus wilayah kabupaten kepahiang yang terdiri dari delapan kecamatan.

¹⁵⁰ Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

b. Aspek Anggaran Pendidikan

Aspek anggaran merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, termasuk dalam upaya pemerataan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kepahiang, alokasi anggaran pendidikan menunjukkan kecenderungan yang positif dalam hal pemenuhan proporsi minimal 20% dari APBD sebagaimana diamanatkan secara nasional. Pernyataan dari Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan beberapa informan lainnya bahwa alokasi pendidikan telah mencapai atau mendekati 20% dari total APBD mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan fiskal yang memadai untuk sektor pendidikan. Namun, perlu dicermati bahwa sebagian besar dana operasional pendidikan di sekolah-sekolah masih berasal dari pusat melalui dana BOS, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pendidikan masih relatif terbatas.

Temuan ini sejalan dengan teori keuangan publik oleh Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa fungsi alokasi pemerintah mencakup penyediaan layanan publik secara efisien, termasuk pendidikan.¹⁵¹ Alokasi anggaran yang proporsional terhadap pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin akses pendidikan yang layak bagi seluruh warga. Akan tetapi, Musgrave juga menekankan bahwa efektivitas alokasi

¹⁵¹ Sengaji and Asyik, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa*.

anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya, tetapi oleh efisiensi dalam pengelolaan dan kesesuaian antara anggaran dan kebutuhan riil.

Hal tersebut tercermin dari indikator kedua, yaitu efisiensi dan ketepatan waktu serapan anggaran, yang menurut seluruh informan berjalan baik di Kabupaten Kepahiang. Pernyataan dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang dan Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai bahwa serapan anggaran dilakukan secara efisien dan tanpa penundaan berarti menunjukkan bahwa secara administratif pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai jadwal dan prosedur. Ini menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, efisiensi ini harus dibarengi dengan penetapan prioritas penggunaan anggaran yang tepat dan berbasis kebutuhan aktual di lapangan.

Indikator ketiga, yaitu fokus penggunaan anggaran terhadap infrastruktur pendidikan, menjadi sorotan penting dalam pembahasan ini. Meskipun beberapa informan menyatakan bahwa alokasi infrastruktur cukup diperhatikan, ditemukan juga perbedaan pandangan yang mencerminkan ketimpangan perhatian antar wilayah atau antar sekolah. Sebagai contoh, sekolah seperti SMPN 3 Kepahiang dan SMPN 2 Tebat Karai masih memiliki kebutuhan rehabilitasi ruang kelas, WC, dan ruang pendukung lainnya yang belum terpenuhi. Sementara itu, SMPN 2 Ujan Mas telah mendapatkan perhatian melalui rehabilitasi sarana pada tahun 2022. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan

faktual (evidence based budgeting), seperti yang ditekankan dalam teori manajemen keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran daerah secara mandiri, namun harus tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.¹⁵² Dalam konteks ini, perencanaan anggaran pendidikan seharusnya dilakukan melalui instrumen-instrumen seperti RKPD, Renstra Dinas Pendidikan, dan Musrenbang yang melibatkan sekolah secara partisipatif untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Jika proses ini belum optimal, maka hasilnya adalah alokasi anggaran yang belum merata antar sekolah, sebagaimana terlihat dalam hasil observasi lapangan.

Di sisi lain, mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan yang diberikan oleh pusat juga sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menyusun usulan, menyerap anggaran, dan melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai sasaran. Dalam konteks ini, SMPN 2 Ujan Mas yang telah direhabilitasi melalui dana DAK menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan anggaran pusat, namun sekolah lain belum mendapat perhatian serupa. Ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam kapasitas kelembagaan di tingkat sekolah maupun di level Dinas Pendidikan dalam mengelola dan mengakses anggaran pembangunan infrastruktur.

¹⁵² Azis, "Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, Dan Kendalanya."

Secara keseluruhan, meskipun alokasi dan penyerapan anggaran pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah menunjukkan indikator yang baik dari sisi administratif dan efisiensi, tantangan utama terletak pada perencanaan dan pemerataan penggunaannya, khususnya untuk pembangunan infrastruktur fisik sekolah. Berdasarkan teori anggaran dan manajemen keuangan daerah, diperlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan aktual lapangan dan memperkuat mekanisme koordinasi antara sekolah dan pemerintah daerah agar setiap satuan pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dan berkeadilan.¹⁵³ Upaya tersebut akan mendukung tercapainya pemerataan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh, dan pada akhirnya memperkuat kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.

c. Aspek Koordinasi Antar-Stakeholder

Koordinasi antar-stakeholder merupakan aspek strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah. Hasil penelitian di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, dan instansi lintas sektor telah berjalan cukup aktif dan efektif, meskipun terdapat variasi dalam intensitas dan pola pelaksanaannya.

Pada indikator pertama, yaitu tingkat partisipasi stakeholder, mayoritas informan menyatakan bahwa berbagai pihak telah dilibatkan dalam proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Mulai dari Kepala Daerah,

¹⁵³ ridha, *Desentralisasi Pendidikan (Sebagi Upaya Pemerataan Pendidikan)*.

Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan, hingga komite sekolah dan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori kolaborasi multipihak yang dikemukakan oleh Bryson dan Crosby (1992), yang menekankan bahwa pelibatan aktor lintas sektor akan meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan.¹⁵⁴ Kolaborasi yang inklusif memungkinkan kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan mempercepat pencapaian tujuan pemerataan pendidikan.

Dari sisi partisipasi masyarakat, temuan ini juga selaras dengan teori partisipasi menurut Bray (1999), yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan mencakup kontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, materi, dan ide.¹⁵⁵ Di sekolah-sekolah seperti SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 3 Kepahiang, kegiatan pertemuan wali murid yang dilakukan secara rutin menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang aktif antara sekolah dan orang tua. Praktik ini bukan hanya memperkuat transparansi dalam pengelolaan pendidikan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan komunitas, sebagaimana dikemukakan oleh Freire (1970) yang menekankan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan melalui pendidikan.¹⁵⁶ Namun, temuan juga menunjukkan adanya disparitas partisipasi antar sekolah. Di SMPN 2 Ujan

¹⁵⁴ Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*.

¹⁵⁵ Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato."

¹⁵⁶ Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato."

Mas, misalnya, koordinasi dengan wali murid hanya dilakukan secara insidental atau tahunan. Hal ini mencerminkan belum meratanya implementasi pendekatan partisipatif di semua satuan pendidikan, dan menunjukkan perlunya standarisasi mekanisme koordinasi di tingkat sekolah.

Pada indikator kedua, yaitu frekuensi dan efektivitas koordinasi antar lembaga, para informan menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin dan berjalan efektif. Hal ini penting dalam memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten. Koordinasi lintas lembaga seperti ini mencerminkan adanya mekanisme yang selaras dengan prinsip governance kolaboratif, yaitu pengelolaan kebijakan publik secara bersama-sama oleh berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Sementara itu, indikator ketiga menyangkut keterlibatan lintas sektor, yang juga menunjukkan hasil cukup baik. Keterlibatan dinas teknis seperti PU, PUPR, dan konsultan dalam mendukung kebijakan infrastruktur pendidikan menjadi bukti bahwa pendekatan lintas sektor telah diterapkan, meskipun tidak merata di semua sekolah. Sebagian sekolah, seperti tempat Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang bertugas, belum merasakan langsung dukungan dari sektor-sektor tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka koordinasi sudah terbentuk, pelaksanaannya masih menghadapi kendala distribusi informasi dan pemahaman lintas sektor.

Lebih lanjut, pelibatan sektor swasta dalam pendidikan sebagai bagian dari Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah-swasta seperti yang diutarakan oleh LaRocque (2008) belum tampak signifikan dalam temuan

ini.¹⁵⁷ Padahal, sektor swasta berpotensi besar dalam mendukung pembangunan pendidikan, terutama melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya mulai membangun kerangka kerja kemitraan strategis dengan perusahaan atau dunia usaha lokal, khususnya untuk mendukung infrastruktur pendidikan di wilayah yang masih kekurangan.

Secara umum, koordinasi antar-stakeholder di Kabupaten Kepahiang telah mencerminkan prinsip-prinsip kolaborasi yang baik, khususnya di tingkat dinas dan sekolah tertentu. Namun demikian, masih diperlukan penguatan terhadap tiga hal utama: (1) pemerataan partisipasi masyarakat dan komite sekolah di seluruh satuan pendidikan, (2) peningkatan keterlibatan sektor swasta dan dinas lintas sektor secara sistematis, serta (3) pembakuan model koordinasi yang efektif dan terstruktur dari tingkat kabupaten hingga sekolah. Upaya ini sejalan dengan kajian teori kolaborasi dan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat dan sektor non-pemerintah sebagai mitra penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata.

d. Kesimpulan dengan Pendekatan Teori Mazmanian dan Sabatier

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan terkait pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya progres yang signifikan namun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Berdasarkan pendekatan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan

¹⁵⁷ Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato."

Sabatier, yang mencakup variabel perumusan kebijakan, kondisi implementasi, dan faktor eksternal, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di Kabupaten Kepahiang sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, anggaran, dan koordinasi antar-stakeholder.¹⁵⁸

Dari sisi regulasi pendidikan, pemerintah daerah telah menunjukkan upaya menyelaraskan kebijakan dengan regulasi nasional. Hal ini mencerminkan faktor “clear and consistent objectives” sebagaimana dimaksud dalam teori Mazmanian dan Sabatier. Namun, ditemukan bahwa regulasi teknis seperti SOP dan juknis belum tersebar secara merata ke seluruh satuan pendidikan. Beberapa sekolah telah memiliki dokumen lengkap, sedangkan yang lain masih bergantung pada panduan dari Dinas Pendidikan tanpa pengembangan internal. Hal ini mengindikasikan keterbatasan dalam variabel “implementing agency commitment and skill”, yang menjadi salah satu determinan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier.¹⁵⁹

Pada aspek anggaran pendidikan, kebijakan telah berjalan dengan dukungan fiskal yang cukup baik, di mana proporsi alokasi anggaran mencapai atau mendekati 20% dari APBD, sesuai amanat nasional. Namun, implementasi di tingkat sekolah masih menunjukkan ketimpangan, baik dalam jumlah maupun jenis infrastruktur yang dibangun. Kesenjangan ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan nyata (evidence-based planning) dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam mengakses program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam kerangka teori Mazmanian dan Sabatier, hal ini

¹⁵⁸ Mubarok et al., “Policy Implementation Analysis.”

¹⁵⁹ Mubarok et al., “Policy Implementation Analysis.”

mencerminkan lemahnya variabel “adequate resources” dan “decision rules”, yang membuat implementasi tidak merata meskipun tujuan kebijakan telah jelas.¹⁶⁰

Sementara itu, dalam aspek koordinasi antar-stakeholder, pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan, sekolah, komite sekolah, hingga instansi lintas sektor. Koordinasi ini mencerminkan variabel “non-statutory variables of support”, yaitu dukungan dari lingkungan sosial dan politik yang turut menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Namun, variasi dalam intensitas dan efektivitas partisipasi antar sekolah dan wilayah menunjukkan bahwa model koordinasi yang digunakan masih belum sepenuhnya terstruktur dan terstandarisasi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta masih sangat minim, padahal potensi kolaborasi melalui skema CSR bisa menjadi tambahan sumber daya yang berharga untuk pemerataan infrastruktur.¹⁶¹

Secara keseluruhan, pendekatan Mazmanian dan Sabatier memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Kepahiang. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan arah nasional, menyediakan anggaran yang sesuai, dan menjalin koordinasi lintas sektor. Namun, kelemahan pada tataran teknis, kapasitas pelaksana, serta konsistensi partisipasi masyarakat dan stakeholder menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek implementasi praktis. Pemerataan infrastruktur pendidikan akan tercapai jika semua variabel

¹⁶⁰ Mubarok et al., “Policy Implementation Analysis.”

¹⁶¹ Mubarok et al., “Policy Implementation Analysis.”

pendukung dalam teori Mazmanian dan Sabatier dipenuhi secara konsisten, khususnya dalam meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana, memperkuat perangkat regulasi teknis di seluruh sekolah, dan membangun kemitraan lintas sektor yang berkelanjutan.¹⁶²

2. Kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Implementasi Infrastruktur Pendidikan

Implementasi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang mencerminkan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan telah dijalankan secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, aspek ini dianalisis melalui tiga indikator utama: jumlah dan distribusi ruang kelas, ketersediaan fasilitas dasar, serta sebaran geografis bantuan infrastruktur. Ketiganya menunjukkan adanya kemajuan namun juga masih menyisakan tantangan serius terkait kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah.

Jumlah dan Distribusi Ruang Kelas. Sebagian besar informan menyatakan bahwa jumlah ruang kelas sudah mencukupi dan merata. Pernyataan ini tampaknya selaras dengan data administratif seperti Dapodik, namun observasi lapangan justru memperlihatkan adanya ketimpangan kualitas fisik bangunan antar sekolah. Di SMPN 3 Kepahiang, misalnya, hanya 10 dari 15 ruang kelas yang layak digunakan karena kerusakan parah, sedangkan SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas memiliki kondisi yang lebih baik atau cukup terawat.

¹⁶² Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan persepsi antara data formal dan realitas fisik di lapangan, serta menyoroti bahwa pemerataan tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari kualitas dan kelayakan fasilitas pendidikan, sebagaimana ditegaskan oleh UNESCO (2011) dan Kemendikbud (2020).¹⁶³ Dalam konteks Teori Pemerataan oleh Adams (1963), distribusi ruang kelas seharusnya mengutamakan kebutuhan aktual sekolah yang bangunannya rusak berat harus diprioritaskan dalam program rehabilitasi, meskipun jumlah ruang kelasnya mungkin telah memenuhi standar.¹⁶⁴

Ketersediaan fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik, internet) Penelitian menemukan bahwa sebagian besar sekolah telah memiliki fasilitas dasar, namun kualitas dan konsistensinya masih bervariasi. Di beberapa sekolah, air bersih dan internet belum stabil; listrik juga mengalami gangguan, terutama saat ujian. Keberadaan toilet diakui tersedia, namun revitalisasi tetap dibutuhkan. Variasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap fasilitas dasar belum sepenuhnya merata secara kualitas, meskipun sudah tersedia secara kuantitas. Padahal, seperti ditegaskan oleh UNESCO (2015) dan Tilaar (2003), infrastruktur dasar seperti toilet yang layak, air bersih, dan akses internet merupakan faktor penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung capaian pembelajaran.¹⁶⁵

Ketimpangan fasilitas antar sekolah ini mencerminkan tantangan klasik dalam pembangunan pendidikan di daerah, yaitu perbedaan akses akibat lokasi

¹⁶³ Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

¹⁶⁴ Zafitri Et Al., *Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan*.

¹⁶⁵ Zafitri Et Al., *Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan*. "Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan."

geografis, kapasitas fiskal daerah, dan prioritas penganggaran. Hal ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan riil (equity-based), bukan semata berdasarkan jumlah siswa atau letak administratif, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Pemerataan (Equity Theory).¹⁶⁶ Sebaran geografis bantuan infrastruktur pendidikan. Sebaran bantuan infrastruktur dinilai telah menyentuh daerah-daerah yang membutuhkan, seperti di SMPN 2 Ujan Mas yang telah menerima bantuan sejak 2019. Namun, temuan seperti di SMPN 3 Kepahiang yang tidak mendapat rehabilitasi sejak 2004 menunjukkan ketidakkonsistenan dalam prioritas distribusi bantuan, bahkan di sekolah yang berada di pusat kabupaten.

Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip pemerataan geografis yang digariskan oleh Bappenas (2021) dan Tilak (2002), bahwa distribusi infrastruktur pendidikan harus proporsional, adil, dan berdasarkan kondisi objektif sekolah, bukan hanya berdasarkan status administratif atau kedekatan akses.¹⁶⁷ Pemerataan infrastruktur dalam konteks ini bukan berarti semua sekolah mendapatkan bantuan yang sama, tetapi bantuan diberikan berdasarkan urgensi dan tingkat kebutuhan, agar tidak memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya komitmen dalam penyediaan fasilitas dasar dan ruang belajar yang merata secara jumlah. Namun, ketimpangan kualitas fisik

¹⁶⁶ Ridha, *Desentralisasi Pendidikan (Sebagi Upaya Pemerataan Pendidikan)*.

¹⁶⁷ Zafitri Et Al., *Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan*.

bangunan, akses terhadap air bersih, internet, serta penyaluran bantuan menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai.

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan tidak cukup dilihat dari angka statistik atau data agregat semata, tetapi harus memperhatikan kondisi nyata sekolah dan kebutuhan spesifik tiap wilayah. Temuan ini sejalan dengan Teori Pemerataan (Adams, 1963), yang menekankan pentingnya distribusi berbasis kebutuhan, bukan sekadar kesamaan kuantitas.¹⁶⁸ Dalam konteks strategi pembangunan inklusif menurut Bappenas (2021) dan Tilaar (2003), pemerintah daerah harus mengedepankan intervensi infrastruktur yang adil secara spasial dan sosial, dengan memperkuat validitas data kebutuhan sekolah, membangun mekanisme pengawasan berbasis komunitas, dan mengutamakan sekolah-sekolah yang selama ini tertinggal dalam distribusi infrastruktur pendidikan.¹⁶⁹

Dengan demikian, upaya pemerataan infrastruktur pendidikan akan lebih berdampak jika kebijakan disusun tidak hanya berorientasi pada penyediaan jumlah fasilitas, tetapi juga memperhatikan kelayakan, urgensi, dan kualitas infrastruktur secara menyeluruh.

b. Aspek Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang merupakan cerminan dari sejauh mana keadilan dalam akses pendidikan diwujudkan melalui distribusi sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁶⁸ Mubarak, "Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog."

¹⁶⁹ Ridha, *Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)*.

kebijakan pemerataan sudah menunjukkan arah yang progresif dalam hal penyebaran fasilitas, tetapi masih menghadapi tantangan nyata dalam aspek kualitas antarwilayah dan kepuasan pengguna. Tiga indikator utama rasio fasilitas per kecamatan, mutu infrastruktur antarwilayah, dan kepuasan pengguna dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan Teori Keadilan Sosial oleh John Rawls (1971).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio fasilitas pendidikan per kecamatan di Kabupaten Kepahiang pada dasarnya telah terdistribusi secara cukup merata menurut para informan, namun masih menghadapi kendala geografis, khususnya di wilayah seperti Desa Air Punggur dan Damar Kencana. Meskipun secara administratif distribusi terlihat seimbang, kondisi geografis yang sulit diakses menjadi hambatan nyata bagi beberapa wilayah untuk memperoleh fasilitas pendidikan secara optimal. Dalam perspektif teori keadilan sosial Rawls (1971), kondisi ini menuntut intervensi afirmatif yang lebih besar di wilayah-wilayah sulit jangkauan tersebut.¹⁷⁰ Rawls menekankan bahwa distribusi sumber daya harus menguntungkan pihak yang paling tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil bukan hanya persoalan logistik, melainkan bagian dari upaya memperbaiki ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok atau wilayah yang paling tidak beruntung.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa mutu infrastruktur pendidikan tidak selalu linear dengan letak geografis. Sekolah di wilayah kota

¹⁷⁰ Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

seperti SMPN 3 Kepahiang justru mengalami kondisi fisik yang lebih buruk dibandingkan beberapa sekolah di wilayah desa seperti SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas. Ini menunjukkan bahwa mutu infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh lokasi, tetapi juga oleh pengelolaan, pemeliharaan, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dalam kerangka keadilan sosial Rawls, ketimpangan ini mencerminkan pentingnya kebijakan infrastruktur yang berbasis pada kebutuhan riil, bukan sekadar status geografis.¹⁷¹ Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan yang lebih tajam terhadap kualitas fasilitas, agar bantuan dan rehabilitasi diarahkan kepada sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan perbaikan, bukan hanya berdasarkan klasifikasi administratif kota atau desa

Seluruh informan dalam penelitian menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh ketimpangan antarwilayah serta kualitas fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan belajar-mengajar secara optimal. Temuan lapangan, seperti buruknya kondisi ruang kelas dan ketiadaan fasilitas ibadah di SMPN 3 Kepahiang, memperkuat persepsi ini. Dalam teori keadilan sosial, ketimpangan persepsi dan pengalaman atas kualitas pendidikan merupakan indikator kegagalan distribusi sumber daya yang adil. Rawls menyatakan bahwa kesenjangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar kepada pihak yang paling kurang beruntung. Ketika ketidakpuasan meluas dan terjadi

¹⁷¹ Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*. , “Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional.”

pada wilayah yang semestinya mendapat perhatian lebih, maka kebijakan infrastruktur telah gagal memenuhi prinsip keadilan struktural dan moral dalam pendidikan.

Hasil penelitian mengindikasikan perlunya upaya konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi infrastruktur pendidikan secara menyeluruh dan berbasis pendekatan keadilan distributif. Tidak cukup hanya memperbanyak jumlah fasilitas; kualitas, keberfungsian, dan keberlanjutan pemeliharaan juga harus menjadi perhatian utama. Dalam konteks pendidikan sebagai hak sosial, pembangunan sarana pendidikan bukan hanya upaya administratif, tetapi juga kewajiban moral negara dalam menjamin hak setiap anak untuk belajar dalam lingkungan yang layak dan aman. Jika infrastruktur yang tidak merata terus dipertahankan, maka kesenjangan hasil pendidikan akan terus melebar, menciptakan ketimpangan sosial jangka panjang, seperti yang telah diperingatkan oleh UNESCO (2015) dan Tilaar (2003) dalam studi-studi pemerataan pendidikan.¹⁷²

Dalam kerangka keadilan sosial ala Rawls, pembangunan infrastruktur pendidikan harus dipandang sebagai tanggung jawab etis dan moral dari negara dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Keadilan bukan berarti memberikan hal yang sama kepada semua pihak, melainkan memberikan yang lebih kepada mereka yang tertinggal agar memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Oleh karena itu, kebijakan infrastruktur pendidikan harus

¹⁷² Hakim, *PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*.

diprioritaskan untuk wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan mutu fasilitas, terlepas dari lokasi kota atau desa. Prinsip ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata. Pemerintah daerah harus menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan infrastruktur pendidikan agar kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi dan kualitas pendidikan dapat dirasakan merata oleh seluruh peserta didik.

c. Aspek Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Penelitian di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa secara umum akses fisik menuju sekolah sudah cukup baik, tetapi masih ditemukan tantangan pada wilayah tertentu dengan kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang kurang mendukung. Pembahasan ini akan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan kajian teori tentang pemerataan pendidikan yang dijelaskan oleh Kemendikbud, Tilaar, Tilak, dan Teori Pemerataan (Equity Theory) oleh Adams (1963).

Jarak Tempuh dan Zona Sekolah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas siswa tinggal dalam radius 1–3 kilometer dari sekolah, yang tergolong dekat dan sesuai prinsip zonasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan zonasi telah membantu mendekatkan layanan pendidikan kepada peserta didik, sesuai dengan indikator Kemendikbud (2020) bahwa *jarak*

tempuh siswa ke sekolah adalah salah satu parameter utama dalam pemerataan pendidikan.¹⁷³

Namun, masih terdapat sebagian kecil siswa yang menempuh jarak lebih jauh karena keterbatasan jumlah sekolah di wilayah tertentu. Dalam konteks Teori Pemerataan oleh Adams (1963), ini menandakan bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada individu yang harus mengeluarkan usaha lebih besar untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara.¹⁷⁴ Prinsip equity mengharuskan distribusi sumber daya (dalam hal ini lokasi sekolah) didasarkan pada kebutuhan masing-masing wilayah, terutama daerah yang terpencil atau sulit dijangkau.

Ketersediaan dan Kualitas Transportasi. Moda transportasi yang digunakan siswa relatif bervariasi dan cukup memadai, mulai dari berjalan kaki, sepeda motor, hingga angkutan umum. Namun, hambatan muncul di daerah seperti Air Pungur dan Damar Kencana di mana akses jalan belum layak, terutama saat musim hujan. Jalan berlumpur dan belum beraspal menyulitkan kendaraan untuk lewat dan dapat menjadi faktor penghambat kehadiran siswa di sekolah.

Menurut Tilaar (2003), pemerataan pendidikan tidak hanya menyangkut distribusi fisik sekolah, tetapi juga mencakup aksesibilitas layanan pendidikan secara nyata, termasuk ketersediaan jalan yang layak dan transportasi yang aman.¹⁷⁵ Ketika infrastruktur jalan masih buruk, maka keadilan akses belum sepenuhnya terwujud. Ini sejalan dengan pernyataan Tilak (2002) yang

¹⁷³ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

¹⁷⁴ Mubarak, "Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog."

¹⁷⁵ Ridha, *Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)*.

menekankan bahwa *akses* mencakup sarana pendukung seperti transportasi dan kondisi geografis yang mempengaruhi kesempatan siswa untuk bersekolah.¹⁷⁶

Kondisi Akses di Sekolah-Sekolah Sampel. SMPN 3 Kepahiang, meski berada di tengah kota, terletak di dalam gang sejauh 300 meter. Jalan sudah dicor dan dilalui kendaraan, tetapi kebijakan sekolah melarang siswa membawa kendaraan pribadi, sehingga sebagian besar berjalan kaki, SMPN 2 Tebat Karai memiliki akses yang cukup ideal, dengan jalan masuk lebar dan bisa dilalui motor dan mobil. Moda transportasi umum pun tersedia dan SMPN 2 Ujan Mas bahkan berada tepat di pinggir jalan lintas besar, menjadikannya sekolah dengan akses terbaik di antara ketiganya. Temuan ini menunjukkan variasi kondisi akses antar sekolah, bahkan di dalam satu kabupaten. Meski secara umum kondisinya baik, masih ada sekolah yang membutuhkan peningkatan akses fisik dan infrastruktur pendukung, terutama di wilayah dengan kepadatan rendah atau kondisi geografis sulit.

Kesenjangan Akses dan Prinsip Pemerataan. Meskipun rata-rata akses pendidikan dinilai “cukup baik”, adanya disparitas geografis masih menimbulkan ketimpangan terselubung. Ini penting untuk diperhatikan, karena pemerataan bukan sekadar soal kuantitas atau jarak rata-rata, tetapi keberpihakan terhadap kelompok yang paling sulit mengakses layanan. Menurut Teori Keadilan Distribusi oleh Adams (1963) dan konsep keadilan sosial dalam pendidikan, daerah-daerah yang menghadapi hambatan akses fisik

¹⁷⁶ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

perlu mendapatkan prioritas dalam intervensi pembangunan.¹⁷⁷ Dengan kata lain, prinsip keadilan menuntut agar sekolah di daerah sulit akses mendapatkan dukungan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi sekolah, sehingga siswa tidak tertinggal hanya karena faktor lokasi tempat tinggal.

Temuan pada aspek aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan kondisi sebagai berikut. Mayoritas siswa memiliki akses dekat ke sekolah, tetapi sebagian kecil masih menghadapi kendala jarak dan infrastruktur, Moda transportasi umumnya tersedia, tetapi akses jalan masih menjadi hambatan di wilayah tertentu, terutama saat musim hujan dan Tingkat akses antar sekolah beragam, menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis lokasi. Jika dikaitkan dengan indikator Kemendikbud (2020) dan teori pemerataan pendidikan, maka upaya pemerataan akses sudah dilakukan namun belum optimal.¹⁷⁸ Pemerintah daerah perlu mengambil langkah afirmatif terhadap sekolah-sekolah dan wilayah yang memiliki akses buruk agar prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil pendidikan dapat dicapai.

d. Kesimpulan dengan Pendekatan Teori Mazmanian dan Sabatier

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah menunjukkan komitmen awal dari pemerintah daerah melalui penyediaan ruang kelas dan fasilitas dasar pendidikan yang relatif mencukupi secara jumlah. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa kualitas infrastruktur, distribusi

¹⁷⁷ Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

¹⁷⁸ Alfariq Ramadani and Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam."

geografis bantuan, serta keberlanjutan fasilitas masih belum merata. Dalam konteks teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kejelasan tujuan kebijakan dan dukungan formal, variabel penting seperti sumber daya pelaksana dan kondisi sosial ekonomi belum cukup mendukung efektivitas implementasi.¹⁷⁹

Pemerataan infrastruktur pendidikan juga masih menghadapi hambatan dalam aspek keadilan akses dan mutu antarwilayah. Beberapa sekolah di wilayah kota justru memiliki kondisi infrastruktur lebih buruk dibandingkan dengan sekolah di daerah pinggiran, sementara akses jalan dan transportasi di wilayah terpencil masih menjadi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa strategi implementasi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan objektif, sebagaimana disarankan dalam kerangka Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya kondisi non-statutory seperti dukungan lingkungan sosial, kapasitas birokrasi, serta stabilitas politik dan ekonomi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁸⁰

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang belum tercapai secara menyeluruh. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada pemetaan kebutuhan yang lebih akurat, peningkatan kualitas pelaksanaan di tingkat lapangan, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Jika variabel-variabel strategis dalam teori Mazmanian dan Sabatier dapat diperkuat, maka

¹⁷⁹ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

¹⁸⁰ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

implementasi kebijakan akan lebih efektif dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁸¹

3. Implikasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Infrastruktur Pendukung

Aspek infrastruktur pendukung listrik, air bersih, dan internet merupakan elemen vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan adaptif terhadap tuntutan zaman, khususnya dalam menghadapi pembelajaran berbasis teknologi. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kepahiang, terdapat kemajuan dalam penyediaan listrik, namun masih ada kesenjangan dalam akses air bersih dan jaringan internet yang stabil. Hasil ini memiliki relevansi langsung dengan teori pemerataan infrastruktur pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO, Tilaar, dan Bappenas.

Listrik: Akses Merata, namun Butuh Jaminan Kualitas dan Keberlanjutan. Hampir seluruh informan menyampaikan bahwa listrik telah tersedia di semua sekolah di Kabupaten Kepahiang. Temuan ini didukung oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah telah menggunakan instalasi listrik yang aman, bahkan sebagian menggunakan alat bantu seperti mesin sanyo untuk menjaga suplai daya dan air. Menurut UNESCO, listrik adalah bagian dari infrastruktur pendidikan yang esensial karena mendukung penyediaan cahaya, operasional perangkat TIK, serta sistem manajemen

¹⁸¹ Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis."

sekolah.¹⁸² Ketersediaan listrik yang merata di Kabupaten Kepahiang menunjukkan kemajuan dalam pemerataan layanan dasar. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, kualitas dan kestabilannya belum sepenuhnya seragam. Ini menandakan perlunya intervensi lanjutan guna memastikan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga keandalan dan kontinuitas layanan listrik sesuai dengan prinsip pemerataan oleh Tilaar.¹⁸³

Air Bersih: Tersedia, tapi Belum Konsisten dan Layak di Semua Sekolah. Air bersih ditemukan tersedia di sebagian besar sekolah, tetapi distribusi dan kelancarannya masih menjadi persoalan, terutama di fasilitas WC siswa dan saluran air. Di beberapa sekolah seperti SMPN 2 Tebat Karai, air tidak mengalir dengan lancar, dan sekolah-sekolah masih mengandalkan sumur bor yang bergantung pada pasokan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun air secara teknis tersedia, layanan air bersih belum stabil dan belum menjamin kenyamanan siswa, khususnya untuk keperluan sanitasi. Menurut UNESCO dan Bappenas, air bersih merupakan faktor penting dalam menjamin lingkungan belajar yang sehat dan bermartabat¹⁸⁴. Ketimpangan ini juga memperkuat argumen Tilaar bahwa kesenjangan dalam infrastruktur dasar memperbesar ketimpangan mutu pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.¹⁸⁵

¹⁸² Fauzi and Setiawati, Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran.

¹⁸³ Ridha, Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan).

¹⁸⁴ Fauzi And Setiawati, Ketimpangan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dasar Di Daerah Terpencil: Analisis Aps, Apk, Dan Apm Terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, Dan Reformasi Pengajaran.

¹⁸⁵ Hakim, Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekolah yang tidak memiliki akses air bersih yang layak cenderung mengalami penurunan kualitas kebersihan dan kesehatan peserta didik.

Akses Internet: Tertinggal di Sekolah-Sekolah Tertentu. Aspek yang paling bervariasi dari hasil temuan adalah akses terhadap internet. Sementara beberapa sekolah seperti SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas telah memiliki jaringan wifi yang cukup stabil, sekolah lain seperti SMPN 3 Kepahiang masih mengalami gangguan koneksi, bahkan saat pelaksanaan ujian daring. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan belum berjalan secara merata. Padahal, dalam era pembelajaran digital dan asesmen berbasis komputer, akses internet yang kuat dan stabil merupakan kebutuhan pokok. Sesuai dengan UNESCO dan Bappenas, infrastruktur digital seperti jaringan internet adalah instrumen kunci dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat pengembangan sumber daya manusia.¹⁸⁶

Kesenjangan akses ini juga berisiko memperdalam *digital divide* (kesenjangan digital), di mana siswa di daerah dengan akses terbatas akan tertinggal dalam kemampuan literasi teknologi dibandingkan siswa di wilayah yang lebih maju. Dalam konteks pemerataan pendidikan, internet bukan hanya alat bantu, melainkan penentu utama dalam pemerolehan pengetahuan modern dan kesetaraan akses informasi.

¹⁸⁶ Fauzi and Setiawati, Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran.

Kaitan dengan Teori Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Dari sisi teori, UNESCO menekankan bahwa pemerataan infrastruktur bukan sekadar distribusi fisik, tetapi juga mencakup kualitas, fungsi, dan keberlanjutan fasilitas.¹⁸⁷ Bappenas menyebut bahwa strategi pembangunan inklusif mensyaratkan kehadiran fasilitas seperti listrik, air, dan internet yang tidak hanya tersedia di pusat kota, tetapi harus menjangkau wilayah terpencil secara adil dan proporsional.¹⁸⁸ Tilaar bahkan lebih tegas menyatakan bahwa ketimpangan dalam infrastruktur memperparah kesenjangan hasil pendidikan.¹⁸⁹ Oleh sebab itu, keberadaan listrik yang belum sepenuhnya stabil, air yang tidak selalu mengalir lancar, serta internet yang belum merata, merupakan indikator bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan di Kepahiang masih memerlukan perhatian serius, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur pendukung.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang telah berhasil dalam memastikan ketersediaan listrik di semua sekolah, namun masih menghadapi tantangan dalam hal akses air bersih dan jaringan internet. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung belum sepenuhnya merata, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau kondisi geografis sulit.

Rekomendasi Kebijakan. Penguatan jaringan air bersih, melalui pembangunan sumur bor baru, revitalisasi saluran air, dan sistem penyimpanan

¹⁸⁷ Ridha, *Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)*.

¹⁸⁸ Zafitri Et Al., *Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan*.

¹⁸⁹ Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

air di sekolah, Perluasan jaringan internet sekolah, khususnya di sekolah dengan akses lemah, melalui kerja sama dengan penyedia layanan dan optimalisasi program digitalisasi pendidikan, Monitoring kualitas layanan listrik, terutama di sekolah yang mengalami gangguan, agar pembelajaran berbasis TIK dapat berjalan tanpa hambatan dan Penyusunan peta kebutuhan infrastruktur pendukung secara spasial agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan adil. Dengan demikian, pemerataan infrastruktur pendukung sebagai komponen strategis dalam pendidikan harus menjadi prioritas utama kebijakan daerah, agar setiap peserta didik di Kepahiang dapat memperoleh pengalaman belajar yang setara, layak, dan berdaya saing di era digital.

b. Aspek Peran Masyarakat dan Stakeholder

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terutama wali murid dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepahiang cukup aktif, khususnya dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan dan kegiatan sekolah. Namun, peran stakeholder eksternal seperti lembaga non-pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan *infrastruktur fisik* sekolah masih tergolong minim. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Temuan ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori kolaborasi dan partisipasi masyarakat dari Bryson & Crosby, Bray, Freire, dan konsep Public-Private Partnership (PPP) oleh LaRocque.

Peran Masyarakat: Bentuk Partisipasi yang Berlangsung Aktif tetapi Terbatas. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa wali murid di sekolah-sekolah seperti SMPN 3 Kepahiang dan SMPN 2 Tebat Karai cukup

aktif dalam kegiatan musyawarah dan konsultasi, bahkan melaksanakan pertemuan rutin. Hal ini sesuai dengan pandangan Bray bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat mencakup dukungan moral, tenaga, ide, dan dana yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kualitas pendidikan.¹⁹⁰ Namun, bentuk partisipasi yang dominan masih bersifat konsultatif dan administratif, seperti menghadiri rapat sekolah atau mendukung pelaksanaan kegiatan. Partisipasi yang lebih substantif, seperti kontribusi dalam pembangunan fisik atau pengadaan fasilitas, belum banyak ditemukan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum dimobilisasi secara optimal untuk menjawab tantangan infrastruktur yang masih ada.

Keterlibatan Stakeholder Eksternal: Masih Minim dan Tidak Terstruktur. Meskipun ada beberapa interaksi dengan lembaga eksternal seperti Polri dan Kejaksaan (sebagaimana terjadi di SMPN 2 Ujan Mas), keterlibatan tersebut lebih berorientasi pada fungsi edukatif dan penyuluhan sosial, bukan pada pembangunan infrastruktur fisik atau penyediaan sumber daya pendidikan. Dalam konteks multi-stakeholder collaboration menurut Bryson dan Crosby, pelibatan berbagai aktor pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM akan meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan publik, termasuk pembangunan pendidikan.¹⁹¹ Kurangnya kolaborasi formal dan berkelanjutan dengan sektor swasta atau LSM menunjukkan bahwa potensi kontribusi non-

¹⁹⁰ Hudodo and Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*.

¹⁹¹ Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

pemerintah belum dioptimalkan, terutama dalam hal penguatan sumber daya infrastruktur seperti ruang kelas, toilet, jaringan internet, atau laboratorium.

Relevansi dengan Teori Pemberdayaan Komunitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Freire, pendidikan yang memberdayakan harus melibatkan masyarakat sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.¹⁹² Temuan di lapangan menunjukkan bahwa komunitas sekolah (wali murid) sudah memiliki kesadaran dan niat untuk terlibat, namun belum difasilitasi melalui mekanisme pemberdayaan yang sistematis, seperti pelatihan komite sekolah, kelompok kerja pembangunan sekolah, atau forum musrenbang sektoral. Ketiadaan pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan fisik juga mengindikasikan lemahnya pemberdayaan struktural, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam demokratisasi pendidikan.

Belum Optimalnya Kemitraan dengan Dunia Usaha (PPP). Konsep public-private partnership (PPP) menurut LaRocque menggaris bawahi pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan pendidikan, terutama melalui program CSR (corporate social responsibility) seperti penyediaan gedung, beasiswa, alat bantu pembelajaran, hingga infrastruktur TIK.¹⁹³ Namun, hasil penelitian menunjukkan belum adanya kemitraan formal antara sekolah dan sektor swasta di Kabupaten Kepahiang. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh

¹⁹² Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato."

¹⁹³ Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. "Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato."

pihak sekolah dan pemerintah daerah. Jika PPP dapat dijalankan secara efektif, kekurangan anggaran dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah dapat diatasi dengan bantuan dan inovasi dari sektor swasta.

Implikasi Kebijakan dan Strategi Kolaboratif ke Depan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan partisipasi masyarakat, tetapi defisit kolaborasi lintas sektor. Untuk menjawab tantangan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang secara menyeluruh, diperlukan upaya konkrit, Penguatan kapasitas komite sekolah untuk berperan lebih aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan fisik sekolah, Fasilitasi kemitraan strategis dengan LSM dan dunia usaha melalui platform kemitraan publik-swasta berbasis CSR pendidikan dan Mendorong forum komunikasi antarpemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, agar terbentuk kolaborasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Secara umum, peran masyarakat dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah berjalan dalam bentuk dukungan wali murid dan partisipasi administratif. Namun, peran stakeholder eksternal seperti sektor swasta dan LSM dalam pembangunan infrastruktur masih sangat terbatas. Berdasarkan teori kolaborasi multipihak, partisipasi masyarakat, dan kemitraan publik-swasta, pembangunan pendidikan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi antarpihak yang terstruktur dan strategis. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memfasilitasi ruang dan mekanisme kolaborasi formal, agar pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi hasil dari partisipasi luas masyarakat dan mitra eksternal. Dengan demikian, pemerataan pendidikan yang

berbasis komunitas dan kolaboratif dapat terwujud secara lebih cepat dan merata.

c. Aspek Efektivitas Penggunaan dan Dampak Infrastruktur Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah dimanfaatkan secara efektif oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinas Pendidikan dan sekolah, diketahui bahwa fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat pembelajaran digunakan secara rutin dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Pernyataan ini dikuatkan oleh informan seperti Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas yang menilai bahwa keberadaan sarana prasarana telah dimaksimalkan dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai bahkan menegaskan bahwa penggunaan infrastruktur yang tersedia turut meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan sudah cukup baik. Dari hasil observasi di SMPN 3 Kepahiang, laboratorium dan perpustakaan menjadi fasilitas yang secara rutin digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Data absensi dan nilai raport siswa kelas 9 juga memperlihatkan peningkatan dari semester 1 ke

semester 2, yang secara tidak langsung mengindikasikan adanya hubungan positif antara pemanfaatan fasilitas dengan hasil belajar siswa. Namun demikian, efektivitas infrastruktur tidak selalu linier terhadap capaian akademik. Di SMPN 2 Tebat Karai, meskipun ruang multimedia dan fasilitas lain dimanfaatkan dengan baik, data menunjukkan adanya penurunan hasil ujian siswa dari tahun ajaran 2022/2023 ke 2023/2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik tidak otomatis menghasilkan peningkatan hasil belajar jika tidak didukung oleh kualitas pengajaran, manajemen kelas, atau pendekatan pembelajaran yang efektif.

Situasi serupa juga ditemukan di SMPN 2 Ujan Mas. Laboratorium IPA dan perpustakaan dimanfaatkan secara optimal, tetapi hasil Ujian Nasional antara tahun 2014/2015 dan 2016/2017 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi indikator bahwa keberadaan dan pemanfaatan infrastruktur perlu diikuti dengan strategi pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan peserta didik. Fenomena ini sejalan dengan kajian teori yang menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan merupakan salah satu input penting dalam sistem pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *input-output*.¹⁹⁴ Dalam perspektif ini, infrastruktur yang memadai menjadi landasan penting bagi proses pembelajaran yang efektif. Namun, kualitas output atau hasil belajar

¹⁹⁴ Patar Simatupang and Haedar Akib, "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>.

peserta didik tetap ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk metode pengajaran, kualitas guru, dukungan keluarga, dan motivasi siswa itu sendiri.

Selain itu, teori tentang dampak ketimpangan infrastruktur juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan dalam ketersediaan fasilitas fisik dapat memperparah kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.¹⁹⁵ Sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur lengkap dan dikelola dengan baik cenderung memiliki proses pembelajaran yang lebih kondusif, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas dasar. Akan tetapi, ketika pemanfaatan infrastruktur tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas pedagogik dan manajemen mutu, maka dampaknya terhadap hasil akademik bisa terbatas. Pembangunan dan penyediaan fasilitas harus dilanjutkan dengan penguatan sistem pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada hasil, pelatihan guru, serta evaluasi berkala atas capaian peserta didik. Pemerataan pembangunan infrastruktur saja tidak cukup; perlu adanya pendekatan integratif yang menyinergikan fasilitas fisik dengan strategi pembelajaran, kebijakan mutu, dan keterlibatan semua pihak dalam dunia pendidikan.

d. Kesimpulan dengan Pendekatan Teori Mazmanian dan Sabatier

Hasil analisis terhadap implikasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, pemerataan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan

¹⁹⁵ Alfariq Ramadani and Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam."

implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan aktor eksternal, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aspek utama yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu infrastruktur pendukung, peran masyarakat dan stakeholder, serta efektivitas penggunaan infrastruktur, memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam praktiknya, terutama dalam hal kesetaraan akses dan efisiensi pelaksanaan.¹⁹⁶

Pada aspek infrastruktur pendukung, ketersediaan listrik di semua sekolah merupakan pencapaian positif. Namun, ketimpangan masih terjadi dalam hal akses air bersih dan konektivitas internet, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran yang optimal. Dalam teori Mazmanian dan Sabatier, variabel lingkungan sosial seperti kondisi geografis dan distribusi sumber daya merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Sementara itu, pada aspek peran masyarakat dan stakeholder, partisipasi yang ada lebih bersifat administratif, belum berkembang ke arah kontribusi substansial dalam pengembangan infrastruktur. Dukungan dari dunia usaha, LSM, dan tokoh masyarakat juga masih minim, sehingga kebijakan lebih banyak bergantung pada sumber daya pemerintah daerah.¹⁹⁷

Efektivitas penggunaan infrastruktur juga belum sepenuhnya tercapai. Fasilitas yang telah dibangun memang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, namun dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan

¹⁹⁶ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

¹⁹⁷ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup tanpa didukung oleh kualitas tenaga pendidik, manajemen sekolah yang efektif, serta kurikulum yang relevan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan infrastruktur pendidikan yang ideal, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Implementasi kebijakan ke depan perlu menekankan pada penguatan kapasitas pelaksana di tingkat daerah, pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian mengenai pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun belum sepenuhnya merata dan berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan 3 aspek yang diteliti, yaitu Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, Kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah menunjukkan perkembangan positif, namun belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Dari aspek regulasi, kebijakan daerah telah selaras dengan regulasi nasional dan memiliki dasar hukum yang jelas, meskipun masih terdapat variasi dalam penerapan dokumen teknis seperti SOP dan juknis di tingkat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas, tetapi kapasitas pelaksana di lapangan belum merata. Dari aspek anggaran, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana pendidikan mendekati 20 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan secara nasional. Namun, ketimpangan masih terlihat pada pemanfaatannya, di mana beberapa sekolah mendapat prioritas rehabilitasi infrastruktur sementara sekolah lain masih mengalami keterbatasan sarana

dasar. Efisiensi serapan anggaran sudah berjalan baik, tetapi perencanaan berbasis kebutuhan riil belum sepenuhnya optimal sehingga pemerataan infrastruktur belum tercapai secara adil. Dari aspek koordinasi antar-stakeholder, telah terjalin hubungan kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, komite sekolah, dan instansi terkait, namun keterlibatan masyarakat dan sektor swasta masih terbatas. Variasi intensitas partisipasi antar sekolah menunjukkan perlunya model koordinasi yang lebih terstruktur dan merata. Dengan menggunakan kerangka teori Mazmanian dan Sabatier, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sudah memiliki tujuan yang jelas dan dukungan fiskal yang cukup, tetapi kelemahan pada kapasitas teknis, perencanaan berbasis kebutuhan, dan keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.¹⁹⁹

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah mengalami kemajuan dari sisi kuantitas ruang kelas dan ketersediaan fasilitas dasar, namun pemerataannya masih menghadapi tantangan serius. Data administrasi menunjukkan jumlah ruang kelas relatif mencukupi, tetapi observasi lapangan memperlihatkan ketimpangan kualitas antar sekolah. Sebagian besar sekolah telah memiliki fasilitas dasar seperti air, listrik, sanitasi, dan internet, namun keberfungsian dan kualitasnya masih belum merata, terutama di daerah dengan kondisi geografis sulit. Sebaran bantuan infrastruktur juga belum konsisten, di mana ada sekolah di pusat kabupaten

¹⁹⁹ Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

yang belum tersentuh rehabilitasi sejak lama, sementara sekolah di wilayah pinggiran justru lebih mendapat perhatian. Pada aspek pemerataan, rasio fasilitas antar kecamatan terdistribusi cukup seimbang, tetapi hambatan geografis dan keterbatasan akses transportasi masih menciptakan kesenjangan terselubung. Mutu infrastruktur antarwilayah juga belum konsisten, di mana sekolah di pusat kota justru ada yang memiliki kondisi fisik lebih buruk dibanding sekolah di wilayah pedesaan. Tingkat kepuasan pengguna (guru dan siswa) juga masih rendah karena sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah, melainkan harus mencakup aspek kualitas, keberfungsian, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Dari sisi aksesibilitas, mayoritas siswa sudah memiliki jarak tempuh yang sesuai prinsip zonasi (1–3 km), namun sebagian kecil masih terkendala jarak dan kondisi jalan yang buruk, terutama saat musim hujan. Moda transportasi tersedia, tetapi tidak semua wilayah memiliki akses jalan yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas geografis yang memerlukan kebijakan afirmatif berbasis kebutuhan riil. Dalam kerangka teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, kebijakan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang sudah memiliki tujuan jelas dan dukungan formal, tetapi keberhasilan implementasi terhambat oleh keterbatasan sumber daya, ketidakmerataan dukungan sosial-ekonomi, serta lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan aktual. Oleh karena itu, keberhasilan pemerataan hanya dapat dicapai melalui perbaikan kualitas implementasi, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta

penegakan prinsip keadilan distributif dalam setiap kebijakan pembangunan pendidikan.²⁰⁰

3. Kesimpulan dari penelitian mengenai implikasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan hasil positif, terutama dalam aspek ketersediaan listrik yang sudah merata di semua sekolah. Namun, tantangan masih terlihat pada akses air bersih dan jaringan internet yang belum stabil dan merata, khususnya di sekolah yang berada di wilayah terpencil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan infrastruktur pendukung belum sepenuhnya tercapai sehingga masih diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan layanan dasar pendidikan. Partisipasi masyarakat, terutama wali murid, sudah berjalan aktif meski terbatas pada kegiatan administratif, sementara keterlibatan stakeholder eksternal seperti LSM dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan masih minim. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor yang lebih strategis melalui pola kemitraan publik-swasta, sehingga pengembangan pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Dalam konteks teori Mazmanian dan Sabatier, minimnya dukungan aktor eksternal dan lemahnya mekanisme pemberdayaan masyarakat menjadi hambatan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pemanfaatan infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah telah berlangsung efektif, namun dampaknya terhadap mutu pendidikan

²⁰⁰ Mubarak, "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG."

belum merata. Fasilitas yang ada memang digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi hasil akademik belum sepenuhnya meningkat karena faktor kualitas guru, manajemen sekolah, dan pendekatan pembelajaran yang juga berperan besar. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang memerlukan strategi komprehensif yang menekankan kejelasan tujuan, penguatan kapasitas pelaksana, keterlibatan multipihak, serta evaluasi berkelanjutan agar dapat mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil, merata, dan berdaya saing.²⁰¹

Secara keseluruhan, upaya pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang sudah berada pada arah yang tepat, namun masih memerlukan peningkatan kualitas, keterjangkauan akses, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerataan bukan hanya soal kuantitas dan distribusi, tetapi juga menyangkut kualitas, partisipasi, serta efektivitas pemanfaatan fasilitas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mengacu pada berbagai teori seperti keadilan sosial, pemerataan pendidikan, kolaborasi multipihak, dan teori input-output pendidikan, maka keberhasilan pembangunan pendidikan hanya dapat dicapai jika pendekatan fisik dipadukan dengan strategi manajerial, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat pendidikan di seluruh wilayah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji secara komprehensif, terlihat bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek ketersediaan

²⁰¹ Simatupang and Akib, "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN."

sarana pendukung, aksesibilitas, maupun partisipasi masyarakat dan efektivitas penggunaannya. Ketimpangan yang terjadi antara wilayah kota dan desa, serta antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lain, menunjukkan bahwa upaya pemerataan belum sepenuhnya optimal. Temuan ini memiliki berbagai konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut dan mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas, berikut disampaikan beberapa implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat relevansi teori keadilan sosial dalam pendidikan (John Rawls), teori pemerataan pendidikan (Tilaar, Tilak), teori kolaborasi multipihak (Bryson & Crosby), serta teori input-output pendidikan. Hasil temuan lapangan menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fisik infrastruktur, tetapi juga oleh pengelolaan, partisipasi, serta keterhubungan antar komponen sistem pendidikan. Penelitian ini memperkaya kajian teori dengan memberikan bukti empiris bahwa ketimpangan infrastruktur berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan keadilan akses pendidikan.

2. Implikasi Praktis bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu menindaklanjuti temuan ketimpangan infrastruktur dengan kebijakan afirmatif yang lebih terarah. Wilayah dengan kondisi geografis sulit dan keterbatasan sarana dasar (listrik, air bersih, internet) harus diprioritaskan dalam pembangunan dan revitalisasi

infrastruktur pendidikan. Hal ini akan membantu mempercepat tercapainya target pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Implikasi bagi Satuan Pendidikan

Sekolah sebagai pelaksana teknis kebijakan pendidikan perlu meningkatkan manajemen pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Efektivitas infrastruktur tidak hanya bergantung pada kelengkapan fisik, tetapi juga pada inovasi pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, dan pelibatan aktif guru dalam memaksimalkan penggunaannya. Sekolah juga perlu menjalin komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder agar tercipta kemitraan strategis dalam pembangunan pendidikan.

4. Implikasi bagi Masyarakat dan Stakeholder

Temuan ini mengindikasikan bahwa peran masyarakat dalam mendukung pendidikan masih cenderung terbatas pada keterlibatan komite dan wali murid. Oleh karena itu, masyarakat dan sektor swasta diharapkan dapat lebih terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bantuan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan kegiatan edukatif lainnya. Keterlibatan aktif stakeholder akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

5. Implikasi Kebijakan Nasional

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah pusat agar memperkuat sinergi antara dana pembangunan infrastruktur pendidikan (seperti DAK fisik) dengan kebijakan pemerataan berbasis zonasi dan data spasial. Pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa intervensi kebijakan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi nyata tiap daerah.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih tepat sasaran.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa upaya pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek mutu antarwilayah, aksesibilitas, infrastruktur pendukung, serta keterlibatan stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif guna mendorong tercapainya pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.

1. Peningkatan Infrastruktur di Wilayah Tertinggal

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah dengan kendala geografis dan akses terbatas. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah yang paling tertinggal.

2. Penguatan Infrastruktur Pendukung

Penyediaan akses air bersih dan internet yang stabil harus menjadi fokus program pembangunan ke depan. Pemerintah daerah dapat menggandeng penyedia layanan internet dan perusahaan air untuk membangun sistem jaringan yang menjangkau sekolah-sekolah di daerah sulit.

3. Optimalisasi Peran Stakeholder

Diperlukan penguatan kolaborasi dengan stakeholder eksternal seperti dunia usaha, LSM, dan tokoh masyarakat melalui program kemitraan (PPP/CSR) yang terstruktur. Pemerintah dapat memfasilitasi forum lintas sektor untuk merumuskan program bersama dalam mendukung pembangunan pendidikan.

4. Pendekatan Integratif dalam Pemanfaatan Infrastruktur

Sarana prasarana pendidikan harus disertai dengan strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Pelatihan guru, penguatan manajemen sekolah, dan supervisi berkelanjutan perlu dilakukan agar pemanfaatan infrastruktur benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap prestasi peserta didik.

5. Evaluasi dan Monitoring Rutin

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dan kondisi infrastruktur pendidikan. Dengan data yang akurat dan terbaru, kebijakan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari upaya menjaga objektivitas dan keilmiahan hasil penelitian.

1. Pertama, keterbatasan dalam cakupan wilayah studi, di mana penelitian ini hanya dilakukan pada tiga satuan pendidikan menengah pertama (SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, dan SMPN 2 Ujan Mas), sehingga belum mencerminkan kondisi seluruh sekolah di Kabupaten Kepahiang secara menyeluruh. Temuan yang dihasilkan bersifat representatif secara terbatas dan tidak dapat digeneralisasikan ke semua wilayah atau jenjang pendidikan.

2. Kedua, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang bersifat kualitatif, sehingga hasil analisis bergantung pada persepsi dan pengalaman subjektif dari informan. Hal ini memungkinkan adanya bias persepsi, terutama dalam menilai efektivitas penggunaan infrastruktur dan kepuasan terhadap kondisi sarana prasarana.
3. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam aspek pendanaan dan kebijakan anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan oleh pemerintah daerah, yang sejatinya dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang faktor-faktor struktural yang memengaruhi pemerataan infrastruktur pendidikan.
4. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi faktor pembatas dalam melakukan pemantauan longitudinal terhadap dampak penggunaan infrastruktur terhadap capaian akademik peserta didik. Oleh karena itu, hasil temuan bersifat deskriptif dan tidak bersifat kausal secara statistik.

Dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan campuran (mix-method), serta menggali dimensi kebijakan dan keuangan secara lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- , Safrida, Nila Safrida, And Muhammad Muhammad. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Aceh Barat.” *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, No. 2 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6027>.
- Agusta, Oleh Ivanovich. *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. N.D.
- Alfariq Ramadani, And Roha Purnama Putri. “Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3t Pemerintah Kota Batam.” *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 10, No. 1 (2024): 40–49. <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.13523>.
- Alifa, Naila Najma. “Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 38, No. 1 (2024).
- Amin Abdullah. *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektiv Dalam Kajian Pendidikan Islam*. Edited By H. Maragustam. Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga, 2014.
- Azis, H.Sulaiman L. “Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, Dan Kendalanya.” *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 10, No. 2 (2019): 167. <https://doi.org/10.46339/foramadiahi.v10i2.121>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*. N.D.
- Darling-Hammond, Linda. *Teacher Quality And Student Achievement: A Review Of State Policy Evidence*. N.D.
- Edi, Syamsul. *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan*. N.D.
- Erdayani, Rizki, Muslim Afandi, And Syed Agung Afandi. “Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia.” *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5, No. 3 (2023): 55–68. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265>.
- Fatimatuzzahrah Fatimatuzzahrah, Lulu Sakinah, And Siti Alikha Alyasari. “Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan.” *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2, No. 1 (2023): 43–53. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2339>.

- Fauzi, Wildan Nuril Ahmad, And Yuli Setiawati. *Ketimpangan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dasar Di Daerah Terpencil: Analisis Aps, Apk, Dan Apm Terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, Dan Reformasi Pengajaran*. 2024.
- Gaol, Rehabeam Lumban. “Pendekatan Strategis Dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Muna.” *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, No. 2 (2025): 1194–206. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V7i2.1317>.
- Hakim, Lukman. *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2, No. 1 (2016).
- Hakim, Lukman Nul. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. 4 (2013).
- Harahap, Emmi Kholilah. “Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia.” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 1, No. 02 (2016): 137. <https://doi.org/10.32332/Riayah.V1i02.104>.
- Harahap, Emmi Kholilah, And Sumarto Sumarto. “Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Upaya Benchmarking.” *Jurnal Literasiologi* 3, No. 3 (2020). <https://doi.org/10.47783/Literasiologi.V3i3.108>.
- Hasanah, Risqiatul, Muhammad Iqbal, And Irfan Noor. *Komersialisasi Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Dakwah Di Era Teknologi*. 8, No. 2 (2024).
- Hudodo, Saiful, And Fory Armin Naway. *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. 2022.
- Irawan, M. Ferry, Sinta Bella, And Alia Latifah. “Teachers And Parents Perceptions Of The 9-Year Compulsory Education Policy In Indonesia.” *Journal Of Insan Mulia Education* 2, No. 2 (2024): 81–87. <https://doi.org/10.59923/Joinme.V2i2.207>.
- Klees, Steven J., Joel Samoff, And Nelly P. Stromquist. *The World Bank And Education: Critiques And Alternatives*. Comparative And International Education, A Diversity Of Voices 14. Sensepublishers, 2012. <https://doi.org/10.1007/978-94-6091-903-9>.
- Lase, Delipiter, Eliyunus Waruwu, Helmin Parida Zebua, And Ayler Beniah Ndraha. “Peran Inovasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan Menuju Visi Indonesia Maju 2045.” *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 2 (2024): 114–29. <https://doi.org/10.62138/Tuhenori.V2i2.18>.

- Maharani, Chika, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, And Arif Fadilla. “Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif.” *Journal Of Macroeconomics And Social Development* 1, No. zzzzzzzzzx3 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>.
- Maisaroh, Anisa Amalia, And Sri Untari. “Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, June 30, 2024, 18–30. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4347>.
- Marzuki, Ismail, And Lukmanul Hakim. “Evaluasi Pendidikan Islam.” *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 1, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.31000/jkip.v1i1.1498>.
- Mubarak, Fadhil. “Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog: Meta Analisis Pendekatan Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, Dan Ibnu Khaldun.” *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, No. 1 (2023): 11–33. <https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.19869>.
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, And Suryadi Suryadi. “Policy Implementation Analysis: Exploration Of George Edward Iii, Marilee S Grindle, And Mazmanian And Sabatier Theories In The Policy Analysis Triangle Framework.” *Journal Of Public Administration Studies* 005, No. 01 (2020): 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>.
- Muhaemin, Nina Minawati. “Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?” *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2021): 201–22. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>.
- Mustanir, Ahmad. *Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*. N.D.
- Nanggala, Agil. *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia*. 8, No. 2 (2020).
- Nani, Yacob Noho. “Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan Secara Merata (Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo).” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, No. 3 (2021): 231. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>.
- Nugroho, Tri Cahyo. *Implementasi Kebijakan Program Gerakan “Mappadeceng” Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Soppeng*. 2021.

- Object, Object. *Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk) Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur*. N.D. Accessed April 18, 2025. <https://Core.Ac.Uk/Reader/287347140>.
- Pattilouw, Djufri Rays. "Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Buru Selatan." *Jurnal Cita Ekonomika* 12, No. 1 (2018): 13–26. <https://doi.org/10.51125/Citaekonomika.V12i1.2224>.
- Purwanto, Toto, Utang Suwaryo, And Rahman Mulyawan. "Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3, No. 1 (2020): 58. <https://doi.org/10.24198/Jmpp.V3i1.26379>.
- Raniyah, Qaulan. *Peran Teknologi Dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. 3 (2024).
- Ridha, Arif. *Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)*. N.D.
- Rolos, Meysi Christi, Johny H Posumah, And Very Y Londa. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. No. 113 (Forthcoming).
- Safitri, Kinanti Indah, Amir Syamsuadi, Bela Putri Anjani, And Wahyudi Rambe. "Formulasi Kebijakan Lingkungan Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Program Riau Hijau." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 8, No. 01 (2025): 238–63. <https://doi.org/10.36341/Jdp.V8i01.5598>.
- Sarnita, Sarnita, And Eka Titi Andaryani. "Pertimbangan Multikultural Dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, No. 11 (2023): 1183–93. <https://doi.org/10.59141/Japendi.V4i11.2233>.
- Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy, Evis Satispi, And Azhari Aziz Samudra. *Public Private Partnership Dalam Pendidikan Vokasi: Peran Ketua Rukun Tetangga Pada Ppdb Smk Swasta Jalur Domisili Di Perumnas Klender*. 1, No. 3 (2023).
- Sengaji, Intan, And Nur Fadjrih Asyik. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa*. 7 (2018).

- Simatupang, Patar, And Haedar Akib. “Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 2, No. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.26858/Jiap.V2i1.871>.
- Sinta, Dewi, And Fadillah Zulfa Naftali. *Optimalisasi Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Program 4 P Guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang*. No. 2 (2024).
- Soedarto, Jl H, And Kode Pos. *Tiara Hasna Raharja**, *Puji Astuti***, *Lusia Astrika***) *Email: Tiarahasna12@gmail.com*. N.D.
- Subair, Ahmad. *Sejarah Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi*. No. 5 (2024).
- Subhaktiyasa, Putu Gede. “Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, No. 4 (2024): 2721–31. <https://doi.org/10.29303/Jipp.V9i4.2657>.
- Sumarto, Sumarto, And Emmi Kholilah Harahap. “Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren.” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4, No. 01 (2019): 21. <https://doi.org/10.32332/Riayah.V4i01.1488>.
- Sumarto, Sumarto, Emmi Kholilah Harahap, And Kasman Kasman. “Manajemen Mutu Sekolah Melalui Pelaksanaan Dan Pengawasan Program Kerja.” *Jurnal Literasiologi* 2, No. 2 (2019): 13. <https://doi.org/10.47783/Literasiologi.V2i2.48>.
- Suprasetya, Gatot. *Optimalisasi Tata Kelola Pembangunan Di Daerah Otonomi Baru (Dob) Papua Guna Menjaga Keutuhan Nkri*. N.D.
- Tashakkori, Abbas, And Charles Teddlie. *Sage Handbook Of Mixed Methods In Social & Behavioral Research (2nd Edition)*. N.D.
- Waluya, Bagja. “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Masyarakat Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran.” *Jurnal Geografi Gea* 9, No. 1 (2016). <https://doi.org/10.17509/Gea.V9i1.1683>.
- Yanti, Annisa Darma, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, And Elly Marlina. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Keadilan Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. N.D.
- Yurika, Tince Ajeng, Iis Sugianti, Irwan Fathurrochman, And Lukman Asha. “Peran Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah Dalam

- Pengembangan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang.” . . .
September, No. 1 (Forthcoming).
- Zafitri, Elfira, Wahida Asni, And Rizki Ananda. *Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan*. 09 (2024).
- Tri Cahyo Nugroho, “Implementasi Kebijakan Program Gerakan ‘Mappadeceng’ Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Soppeng,” 2021
- Meysi Christi Rolos, Johny H Posumah, And Very Y Londa, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara.,” No. 113 (N.D.).
- Kusuwa Wijayanto. 2023. Transformasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia. Disertasi. Iain Surakarta. ([https://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id](https://eprints.iain-surakarta.ac.id))
- Bps Kepahiang. Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2025. [https://Kepahiangkab.Bps.Go.Id/Id](https://kepahiangkab.bps.go.id/id) (Diakses 17 Maret 2025).
- Pemkab Kepahiang. Jumlah Sekolah Dan Kondisi Infrastruktur Di Kabupaten Kepahiang. 2024. [https://Kepahiangkab.Go.Id/](https://kepahiangkab.go.id/) (Diakses 25 Maret 2025)
- Pemkab Kepahiang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kabupaten Kepahiang. 2023. [https://Kepahiangkab.Go.Id/](https://kepahiangkab.go.id/) (Diakses 25 Maret 2025)
- Pemkab Kepahiang. Rkpd Kabupaten Kepahiang 2023. 2025. [https://Kepahiangkab.Go.Id/](https://kepahiangkab.go.id/) (Diakses 25 Maret 2025)
- Bps Kepahiang. Hasil Kebijakan Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang 2019-2023. 2025. [https://Kepahiangkab.Bps.Go.Id/Id](https://kepahiangkab.bps.go.id/id) (Diakses 17 Maret 2025).
- Daftas Sekolah.Net. Daftar Sekolah Smp Di Kabupatenkepahiang Bengkulu Tahun 2025, 2025 [https://Daftarsekolah.Net/](https://daftarsekolah.net/) (Diakses Tanggal 17 Maret 2025)
- Kemendikbud. Kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan indonesia. 2025. <https://www.kemdikbud.go.id/>. (dikases 18 april 2025)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.(diakses 18 april 2025)
- Wawancara dan Observasi. Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan DMB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Kasi Kelembagaan Sarana dan

Prasarana, Kepala Sekolah SMPN 2 Tebat Karai, Kepala Sekolah SMPN 2 Ujan Mas, Kepala Sekolah SMPN 3 Kepahiang, 21 Mei, 27-28 Mei, 15-28 Mei dan 26 Mei 2025.

https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/5889/dak-khusus-infrastruktur-pendidikan-di-kepahiang-ta-2024-meningkat-rp-10-miliar#goog_rewarded

<file:///C:/Users/user/Downloads/permendikbudristek-no-22-tahun-2023.pdf>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372 Website: www.dprmtsp.kepahiangkab.go.id
IZIN PENELITIAN Nomor : 500.16.7/066/I-Pen/DPMPTSP/IV/2025	
DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 257/In.34/PCS/PP.00.9/04/2025 Tanggal 28 April 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.	
DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :	
Nama	: TERE ADEREMPAS
NPM	: 23861015
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian	: 28 April 2025 s.d. 28 September 2025
Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal	: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian. 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
Dikeluarkan di : Kepahiang Pada Tanggal : 9 Mei 2025	
	 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS, ELVA MARDIANA, S.JP., M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19690526 199003 2 005
Tembusan disampaikan Kepada yth: 1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan) 2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang 4. Camat Wilayah Tempat Penelitian	

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Yth,
Kepala Dinas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepahiang.

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Tere Aderempas
NPM : 23861015
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (S2) IAIN Curup
Semester : 6 (enam)
Judul Proposal: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ibu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengambil data penelitian, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Tentang Pendidikan
2. RKA (Rencana Kerja Dan Anggaran) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Data Bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Pendidikan
4. Laporan Evaluasi Program Pendidikan
5. Brosure Program Infrastruktur Sekolah

Demikian permohonan ini saya buat, atas bantuan Ibu Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang saya ucapkan terima kasih.

Kepahiang, 3 juni 2025

Hormat saya,



Tere Aderempas
NPM 23861015

Lampiran 3 Hasil Wawancara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang ibu/bapak.
Perkenalkan saya Tere Ade Rempas mahasiswa pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup semester akhir.

Dalam rangka menuntaskan tugas akhir TESIS saya, yang berjudul Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di kabupaten kepahiang

Mohon izin kepada bapak/ibu Kepala sekolah untuk saya melaksanakan penelitian di sekolah tempat ibu dan bapak pimpinan, selanjutnya mohon kesediannya untuk mengisi google form yang telah saya sediakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Nama *
Siti rauhah oktavina

Jabatan/Peran *
Kasubbag perencanaan, keuangan, dan BMD

Instansi/Asal Sekolah *
Dinas Pendidikan Kab. Kepahiang

Lama Bekerja/terlibat dalam pendidikan *
18 tahun

Tanggal wawancara/mengisi koesioner *
20 mei 2025

Tema 1 : Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan koordinasi antar stakeholder yang menentukan efektivitas pelaksanaannya

Bagaimana Anda menilai keselarasan kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional? *

Kebijakan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional, namun juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik daerah. Dinas Pendidikan Kab. Kepahiang sudah melaksanakan kebijakan nasional sesuai kemampuan kabupaten kepahiang

Apakah aturan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah ini sudah jelas dan mudah dipahami? *

Jelas dan dapat dipahami

Apakah regulasi pendidikan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan setiap tahun? *

Diupayakan untuk memenuhi kebijakan dengan anggaran yang ada

Bagaimana proporsi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD daerah Anda? *

Diupayakan diberikan 20% dari dana daerah

Apakah anggaran pendidikan dapat diserap tepat waktu dan digunakan secara efisien? *

Iya

Seberapa besar perhatian anggaran daerah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan? *

Cukup mendapatkan perhatian

Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan? *

Kepala Daerah, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), kepala Dinas

Seberapa sering dan seberapa efektif koordinasi antar lembaga dilakukan? *

Sangat efektif

Apakah sektor non-pendidikan (seperti PU, PLN, Telkom) dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur sekolah? *

Iya

Bagaimana sebaran pembangunan ruang kelas di wilayah ini? *

Sudah terdata di dapodik kab. Kepahiang untuk kondisi bangunan satuan pendidikan

Apakah fasilitas seperti toilet, listrik, air bersih, dan internet tersedia secara memadai di sekolah-sekolah? *

Toilet, Tersedia tetapi perlu perhatian kembali untuk revitalisasi
Air bersih masih perlu difasilitasi
Jaringan internet : masih ada yang belum terdapat sinyal

Apakah sekolah di wilayah terpencil mendapatkan alokasi bantuan yang proporsional? *

Iya

Bagaimana distribusi fasilitas pendidikan antar kecamatan di wilayah ini? *

Berjalan baik, hanya saja untuk beberapa sekolah sulit dijangkau untuk daerah Desa Air punggur dan Desa Damar Kencana kecamatan Muara Kemumu

Apakah terdapat perbedaan mencolok antara mutu infrastruktur pendidikan antar sekolah? *

Tidak

Bagaimana tanggapan guru, siswa, dan masyarakat terhadap kondisi fasilitas sekolah saat ini? *

Masih ada beberapa bangunan yang perlu menjadi perhatian khusus untuk dilakukan revitalisasi

Tema 2 : Pemerataan infrastruktur pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Berapa jarak rata-rata siswa dari rumah ke sekolah? Apakah ada kesulitan transportasi? *

Jika siswa bersekolah sesuai dengan zona daerah tempat tinggal sesyau domisili, ctentunya tidak ada kendala

Moda transportasi apa yang digunakan siswa? Apakah ada hambatan tertentu? *

Jalan kaki atau kendaraan roda dua
Untuk daerah air punggur dan damar kencana, jika cuaca hujan. Tidak dapat dilewati, masih kondisi jalan tanah dan berlumpur

Bagaimana kondisi akses listrik, air bersih, dan internet di sekolah? *

Listrik di sekolah2 sudah tersedia
Air bersih : masih perlu perbaikan saluran air bersih, atau pengadaan sumur bor untuk beberapa sekolah
Internet : masih ada sekolah yang belum terjangkau jaringan internet

Apakah ada dukungan masyarakat atau lembaga lain dalam pembangunan infrastruktur? *

Ada, dari Dana desa, dari kemendikdasmen

Apakah fasilitas baru digunakan secara maksimal oleh guru dan siswa? *

Iya

Apakah ada perubahan dalam kehadiran dan kualitas pembelajaran setelah peningkatan fasilitas? *

Ada

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Lama Bekerja/terlibat dalam pendidikan? *

15 tahun

Tanggal wawancara/mengisi koesioner? *

4 Juni

Tema 1 : Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan koordinasi antar stakeholder yang menentukan efektivitas pelaksanaannya

Bagaimana Anda menilai keselarasan kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional? *

Selaras sesuai kebijakan nasional

Apakah aturan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah ini sudah jelas dan mudah dipahami? *

Jelas

Apakah regulasi pendidikan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan setiap tahun? *

Konsisten

Bagaimana proporsi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD daerah Anda? *

Sesuai

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPAHANG

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang ibu/bapak.

Perkenalkan saya Tere Ade Rempas mahasiswa pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup semester akhir..

Dalam rangka menuntaskan tugas akhir TESIS saya, yang berjudul Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di kabupaten kepahang

Mohon izin kepada bapak/ibu Kepala sekolah untuk saya melaksanakan penelitian di sekolah tempat ibu dan bapak pimpinan, selanjutnya mohon kesediannya untuk mengisi google form yang telah saya sediakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Nama *

Agus Fernandes

Jabatan/Peran *

Kabid dikdas

Instansi/Asal Sekolah *

Dinas dikbud

Apakah anggaran pendidikan dapat diserap tepat waktu dan digunakan secara efisien? *

Digunakan secara efisien

Seberapa besar perhatian anggaran daerah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan? *

Cukup besar

Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan? *

Stok holder terkait

Seberapa sering dan seberapa efektif koordinasi antar lembaga dilakukan? *

Sering dan efektif

Apakah sektor non-pendidikan (seperti PU, PLN, Telkom) dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur sekolah? *

Iya

Bagaimana sebaran pembangunan ruang kelas di wilayah ini? *

Cukup

Apakah fasilitas seperti toilet, listrik, air bersih, dan internet tersedia secara memadai di sekolah-sekolah? *

Tersedia

Apakah sekolah di wilayah terencil mendapatkan alokasi bantuan yang proporsional? *

Mendapatkan

Bagaimana distribusi fasilitas pendidikan antar kecamatan di wilayah ini? *

Baik

Apakah terdapat perbedaan mencolok antara mutu infrastruktur pendidikan antar sekolah? *

Tidak

Bagaimana tanggapan guru, siswa, dan masyarakat terhadap kondisi fasilitas sekolah saat ini? *

Baik

Tema 2 : Pemerataan infrastruktur pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, terutama di daerah terencil dan tertinggal.

Berapa jarak rata-rata siswa dari rumah ke sekolah? Apakah ada kesulitan transportasi? *

Relatif dekat

Moda transportasi apa yang digunakan siswa? Apakah ada hambatan tertentu? *

Kendaraan umum

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPAHANG

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang ibu/bapak.

Perkenalkan saya Tere Ade Rempas mahasiswa pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Curup semester akhir..

Dalam rangka menuntaskan tugas akhir TESIS saya, yang berjudul Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di kabupaten kepahang

Mohon izin kepada bapak/ibu Kepala sekolah untuk saya melaksanakan penelitian di sekolah tempat ibu dan bapak pimpinan, selanjutnya mohon kesediannya untuk mengisi google form yang telah saya sediakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Nama *

Muharyadi

Jabatan/Peran *

Kasi kelembagaan sarana dan prasarana

Instansi/Asal Sekolah *

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagaimana kondisi akses listrik, air bersih, dan internet di sekolah? *

Cukup

Apakah ada dukungan masyarakat atau lembaga lain dalam pembangunan infrastruktur? *

Ada

Apakah fasilitas baru digunakan secara maksimal oleh guru dan siswa? *

Iya

Apakah ada perubahan dalam kehadiran dan kualitas pembelajaran setelah peningkatan fasilitas? *

Ada

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Lama Bekerja/terlibat dalam pendidikan *

14 tahun

Tanggal wawancara/mengisi koesioner *

22 mei 2025

Tema 1 : Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan koordinasi antar stakeholder yang menentukan efektivitas pelaksanaannya

Bagaimana Anda menilai keselarasan kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional? *

Sudah selaras dan berjalan

Apakah aturan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah ini sudah jelas dan mudah dipahami? *

Mudah dipahami

Apakah regulasi pendidikan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan setiap tahun? *

Sudah berjalan dengan konsisten

Bagaimana proporsi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD daerah Anda? *

Sudah mencukupi

Apakah anggaran pendidikan dapat diserap tepat waktu dan digunakan secara efisien? *

Sudah tepat waktu dan digunakan secara efisien

Seberapa besar perhatian anggaran daerah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan? *

Sedang

Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan? *

Konsultan, PUPR dan Pusat

Seberapa sering dan seberapa efektif koordinasi antar lembaga dilakukan? *

Sering

Apakah sektor non-pendidikan (seperti PU, PLN, Telkom) dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur sekolah? *

Ya

Bagaimana sebaran pembangunan ruang kelas di wilayah ini? *

Sudah merata

Apakah fasilitas seperti toilet, listrik, air bersih, dan internet tersedia secara memadai di sekolah-sekolah? *

Belum terlalu memadai

Apakah sekolah di wilayah terpencil mendapatkan alokasi bantuan yang proporsional? *

Sudah

Bagaimana distribusi fasilitas pendidikan antar kecamatan di wilayah ini? *

Sudah diperhatikan

Apakah terdapat perbedaan mencolok antara mutu infrastruktur pendidikan antar sekolah? *

Tidak terlalu

Bagaimana tanggapan guru, siswa, dan masyarakat terhadap kondisi fasilitas sekolah saat ini? *

Cukup baik

Tema 2 : Pemerataan infrastruktur pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Berapa jarak rata-rata siswa dari rumah ke sekolah? Apakah ada kesulitan transportasi? *

Tidak

Moda transportasi apa yang digunakan siswa? Apakah ada hambatan tertentu? *

Angkot, tidak

Bagaimana kondisi akses listrik, air bersih, dan internet di sekolah? *

Listrik sudah merata, untuk air bersih dan internet ada beberapa sekolah yg belum

Apakah ada dukungan masyarakat atau lembaga lain dalam pembangunan infrastruktur? *

Belum

Apakah fasilitas baru digunakan secara maksimal oleh guru dan siswa? *

Sudah

Apakah ada perubahan dalam kehadiran dan kualitas pembelajaran setelah peningkatan fasilitas? *

Ada

Lampiran 4 Hasil Wawancara dan Observasi SMPN 3 Kepahiang Hasil Wawancara

... kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan ... stakeholder yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan.

Informasi:
 Nama: H. H. Syahid, S.Pd, M.Pd
 Kepala Sekolah
 SMP Negeri 3 Kepahiang
 Tanggal wawancara: 26 Mei 2025

A. Panduan Wawancara Penelitian

No	Aspek Teoritis	Indikator Penelitian	Pertanyaan Kunci	Citation lapangan
1	Regulasi Pendidikan	Kesesuaian kebijakan daerah dengan kebijakan nasional Kejelasan standar teknis pelaksanaan kebijakan Konsistensi dan keberlanjutan regulasi daerah	Bagaimana Anda melihat kesesuaian kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional? Apakah standar pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah ini sudah jelas dan mudah dijabarkan? Apakah regulasi pendidikan daerah sejalan dengan kebijakan dan peraturan nasional?	Jika diperbolehkan tingkat kesesuaian maka bisa saja karena ada beberapa kebijakan yang ada akan tetapi belum semua Jelas dan Mudah dipahami Diperlukan konsistensi karena sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir
2	Anggaran Pendidikan	Proporsi APBD untuk pendidikan (>20%) Serapan anggaran secara efisien dan tepat waktu Fokus anggaran pada infrastruktur pendidikan	Bagaimana proporsi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD daerah Anda? Apakah anggaran pendidikan dapat diserap tepat waktu dan digunakan secara efisien? Seberapa besar perhatian anggaran daerah diarahkan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan?	Anggaran Sekolah berdasarkan APBD yang terdapat dalam RAB BOS Ya tepat waktu Anggaran besar untuk infrastruktur khususnya untuk perbaikan jalan
3	Koordinasi Antar-Stakeholder	Tingkat partisipasi komite sekolah, masyarakat, sektor swasta Efektivitas koordinasi antar lembaga	Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan? Seberapa sering dan seberapa efektif koordinasi antar lembaga dilakukan?	Komite Sekolah Warga Masyarakat Semua warga Sekolah Terkadang efektif

	Ketersediaan lahan	Apakah ketersediaan lahan pendidikan (sekolah, PLN, Puskesmas) diarahkan dalam pengembangan infrastruktur sekolah?	Tidak	
4	Implementasi Infrastruktur	Jumlah dan distribusi ruang kelas Ketersediaan fasilitas dasar Sebaran geografis layanan infrastruktur	Bagaimana sistem pemantauan ruang kelas di wilayah ini? Apakah layanan seperti listrik, air bersih dan internet sudah merata secara merata di seluruh sekolah? Apakah sekolah di wilayah tersebut menyediakan layanan yang memadai?	Ruang kelas di titik titik dan merata sebagian
5	Pemertan Infrastruktur Pendidikan	Rasio fasilitas per kecamatan Nilai infrastruktur Ketersediaan sarana prasarana	Bagaimana distribusi fasilitas pendidikan antara kecamatan di wilayah ini? Apakah terdapat perbedaan prioritas antara nilai infrastruktur pendidikan antar sekolah? Bagaimana ketersediaan sarana prasarana di wilayah ini?	Tidak Perlu perbaikan

... infrastruktur pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh ... di daerah tersebut dan terjamin.

Informasi:
 Nama: H. H. Syahid, S.Pd, M.Pd
 Kepala Sekolah
 SMP Negeri 3 Kepahiang
 Tanggal wawancara: 26 Mei 2025

A. Instrumen Wawancara - Pemertan Infrastruktur Pendidikan

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan Kunci	Narasumber
1	Aksesibilitas Fasilitas	Jarak sekolah dari pemukiman	Berapa jarak rata-rata siswa dari rumah ke sekolah?	Curu, Kepala Sekolah Siswa
2	Akses Transportasi	Moda dan akses ke sekolah	Apakah ada moda transportasi yang disediakan siswa?	Curu, Siswa
3	Infrastruktur Pendukung	Akses listrik, air, dan internet	Bagaimana ketersediaan akses listrik, air bersih, dan internet di sekolah?	Kepala Sekolah
4	Keterlibatan Stakeholder	Peran masyarakat & lembaga	Apakah ada dukungan masyarakat atau lembaga lain dalam pemertan infrastruktur?	Komite Sekolah, Kepala Sekolah
5	Efektivitas Penggunaan Sarana Prasarana	Penggunaan sarana prasarana	Apakah fasilitas yang disediakan secara maksimal oleh guru dan siswa?	Curu, Siswa
6	Dampak Infrastruktur	Kelahiran dan pembelajaran	Apakah ada perubahan dalam kelahiran dan kualitas pembelajaran setelah peningkatan fasilitas?	Curu, Kepala Sekolah

Hasil:

No	Indikator	Citation lapangan
1		Rafael Pijuwah KKM
2		Rafael, sebelum Sipan Motor
3		Bagus untuk listrik dan internet sudah dimanfaatkan juga
4		Tidak

		Rafael
		Rafael, Alfa

Hasil Observasi

T.1 GATA 3 km

Observasi - Perneratan Infrastruktur Pendidikan			
No Teori	Indikator Penelitian	Item yang Diobservasi	Catatan observasi
1	Regulasi Pendidikan	Kelengkapan dan penerapan aturan	Dokumen SOP atau pedoman pelaksanaan (kegiatan di sekolah) → Lembar observasi
2	Anggaran Pendidikan	Fokus penggunaan anggaran	Dokl (baik hasil pendanaan (gabung, uang kelas, sinitas)) → Rencanakan dengan besar kelas 8 (C. Bina) → WC kelas 7.8 (Bawahan)
3	Kemampuan Antar-Sakabeker	Dokl partisipasi masyarakat	Notulensi rapat, pence inferensi, dokumentasi kegiatan kolaborasi → pertemuan dengan wali murid 3/16/2020
4	Implementasi Infrastruktur	Kondisi dan distribusi ruang kelas	Jumlah dan kondisi ruang kelas, catatan rehabilitasi/baru → 7 (C. Bina) → 8 (C. Bina) → Cendrung → 9 (C. Bina) → anggaran pengumpul → kelas/kelas → kelas/kelas 15 Bina
		Fasilitas dasar pendidikan	Toilet, air bersih, listrik, internet, ruang guru → air bersih → listrik kelas → internet ada for belajar kelas → ruang guru → kelas/kelas
5	Perneratan Infrastruktur Pendidikan	Fasilitas antar wilayah	Perbandingan mutu titik antar sekolah → Perbandingan antara kelas → Kelas/kelas ya kelas/kelas → kelas/kelas ya kelas/kelas → kelas/kelas
		Kepuasan pengguna	Respon informal dari siswa dan guru terhadap kondisi fasilitas → guru → Fasilitas kurang memadai → kelas/kelas ya kelas/kelas → kelas/kelas ya kelas/kelas
		Tingkat pemanfaatan	Penggunaan aktif ruang laboratorium, perpustakaan, dan sarana lain oleh siswa dan guru → labo → Sempat digunakan → kelas/kelas ya kelas/kelas → kelas/kelas ya kelas/kelas

T.2

Observasi - Perneratan Infrastruktur Pendidikan			
No	Indikator	Fokus Observasi	Instrumen
1	Kondisi ruang kelas, lab, toilet	Kelengkapan, kebersihan, ventilasi, pencahayaan, kelengkapan fasilitas	Lembar cek observasi
2	Ketersediaan air, listrik, internet	Fasilitas pendukung	Lembar cek observasi
3	Pernyediaan sarana	Apakah fasilitas beres-beres digunakan oleh siswa/guru dalam KBM	Catatan lapangan, lembar observasi
4	Aksesibilitas terhadap jalan umum	Apakah sekolah mudah dijangkau kendaraan massal jalan kaki?	Lembar pengamatan kelas

Hasil:

No	Indikator	Catatan lapangan
1		→ kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2		→ kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
3		→ kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
4		→ kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Lampiran 5 Hasil Dokumentasi dan Dokumen SMPN 3 Kepahiang

Ruang kelas



Perpustakaan



Laboratorium



Toilet dan Air Bersih



Fasilitas Tambahan : Aula sekolah



Lampiran 6 Hasil Wawancara dan Observasi SMPN 2 Tebat Karai

Hasil Wawancara

TEMA 1 - Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan koordinasi antar stakeholder yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.

Identitas Informan:
 Nama: *Ahmad Muliati, N.P. dan Kepala Sekolah*
 Jabatan/Peran: *Kepala Sekolah*
 Lokasi bekerja/berlibat dalam pendidikan: *SMPN 02 Tebat Karai*
 Tanggal wawancara: *22 Januari 2021*

A. Panduan Wawancara Penelitian

No	Aspek Tematis	Indikator Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Catatan lapangan
1	Regulasi Pendidikan	Kemampuan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional?	Bagaimana anda menilai kualitas kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional?	<i>'Kebijakan Pendidikan Daerah Berbasis dan mengaitkan Kebijakan Nasional'</i>
		Ketepatan aturan dalam pelaksanaan kebijakan?	Apakah aturan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah itu sudah jelas dan mudah dipahami?	<i>Ahorum pelaksanaan Kebijakan Daerah Jelas dan mudah dipahami</i>
		Konsistensi dan keberlanjutan regulasi daerah?	Apakah regulasi pendidikan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan dengan regulasi nasional?	<i>Secara umum berjalan konsisten walaupun ada perubahan 2 dalam perjalanannya</i>
2	Anggaran Pendidikan	Proses APBD untuk pendidikan (2,3%)?	Bagaimana persentase alokasi anggaran pendidikan di APBD daerah/Ases?	<i>Sehingga Kebijakan Pusat anggaran Pendidikan Daerah > 20%</i>
		Sesuai anggaran secara efisien dan tepat waktu?	Apakah anggaran pendidikan daerah tersebut tepat waktu dan digunakan secara efisien?	<i>Anggaran Pendidikan dapat diwrap dan cukup efisien penggunaannya</i>
		Fokus anggaran pada infrastruktur pendidikan?	Seberapa besar perhatian anggaran daerah diberikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan?	<i>Cukup Besar</i>
3	Koordinasi Antar Stakeholder	Tingkat partisipasi komite sekolah, masyarakat, sektor swasta?	Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan?	<i>Komite Sekolah, Warga Sekolah, dan masyarakat sekitar</i>
		Efektivitas koordinasi antar lembaga?	Seberapa sering dan secara efektif koordinasi antar lembaga dilakukan?	<i>Cukup sering dan cukup efektif</i>

	Keterlibatan stakeholder	Apakah sektor non-pendidikan seperti P5, P4M, (GKBM) dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur sekolah?	<i>Dilibatkan</i>	
4	Implementasi Infrastruktur	Jumlah dan distribusi ruang kelas	Bagaimana sebaran pembangunan ruang kelas di wilayah ini?	<i>Murah</i>
		Ketersediaan fasilitas dasar	Apakah fasilitas seperti toilet, listrik, air bersih, dan internet tersedia secara memadai di sekolah/sekolah?	<i>Cukup memadai</i>
		Selaras geografis bantuan infrastruktur	Apakah sekolah di wilayah terpendek mendapatkan alokasi bantuan yang proporsional?	<i>Mendapat</i>
5	Pemertaan Infrastruktur Pendidikan	Rasio fasilitas per kecamatan	Bagaimana distribusi fasilitas pendidikan antar kecamatan di wilayah ini?	<i>Berimbang merata antar kecamatan</i>
		Mutu infrastruktur	Apakah terdapat perbedaan mutu infrastruktur pendidikan antar sekolah?	<i>Tidak</i>
		Kepuasan terhadap kondisi sarana prasarana	Bagaimana tanggapan guru, siswa, dan masyarakat terhadap kondisi fasilitas sekolah saat ini?	<i>Masih perlu dan nyaman terhadap kondisi fasilitas sekolah</i>

TEMA 2 - Pemertaan infrastruktur pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa didik, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Identitas Informan:
 Nama: *Ahmad Muliati, N.P. dan Kepala Sekolah*
 Jabatan/Peran: *Kepala Sekolah*
 Lokasi bekerja/berlibat dalam pendidikan: *SMPN 02 Tebat Karai*
 Tanggal wawancara: *22 Januari 2021*

A. Instrumen Wawancara - Pemertaan Infrastruktur Pendidikan

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan Kunci	Saran/tema
1	Aksesibilitas Fasilitas	Jarak sekolah dari pemukiman	Seberapa jauh rata-rata siswa dari rumah ke sekolah? Apakah ada kesulitan transportasi?	Guru, Kepala Sekolah, Siswa
2	Akses Transportasi	Moda dan akses ke sekolah	Moda transportasi apa yang digunakan siswa? Apakah ada hambatan tertentu?	Guru, Siswa
3	Infrastruktur Pendidikan	Akses listrik, air, dan internet	Bagaimana kondisi akses listrik, air bersih, dan internet di sekolah?	Kepala Sekolah
4	Keterlibatan Stakeholder	Peran masyarakat & lembaga	Apakah ada dukungan masyarakat atau lembaga lain dalam pembangunan infrastruktur?	Komite Sekolah, Kepala Sekolah
5	Efektivitas Penggunaan	Penggunaan sarana prasarana	Apakah fasilitas baru digunakan secara maksimal oleh guru dan siswa?	Guru, Siswa
6	Dampak Infrastruktur	Kehadiran dan pembelajaran	Apakah ada perubahan dalam kehadiran dan kualitas pembelajaran setelah peningkatan fasilitas?	Guru, Kepala Sekolah

Hasil :

No	Indikator	Catatan lapangan
1	Jarak Sekolah dan Pemukiman	<i>Jarak rata-rata siswa dari Rumah ke Sekolah ± 1 km. Tidak ada kesulitan transportasi</i>
2	Moda dan Akses ke Sekolah	<i>Kendaraan umum dan jalan kel.</i>
3	Listrik, Air dan Internet	<i>Listrik tersedia dan lancar. Internet ... dan lancar. Air tersedia Kurang lancar.</i>
4	Peran Masyarakat	<i>Cukup mendukung terhadap pengembangan infrastruktur Sekolah.</i>
5	Sarana	<i>Guru masyarakat Fasilitas / Sarana yg ada dengan Baik</i>
6	Kehadiran dan Pembelajaran	<i>Ada perubahan dan kehadiran dan kualitas proses pembelajaran yg Dilakukan oleh Guru.</i>

Lampiran 7 Hasil Dokumentasi dan Dokumen SMPN 2 Tebat Karai

Ruang kelas



Perpustakaan



Laboratorium



Toilet dan Air Bersih



Fasilitas Tambahan



Lampiran 8 Hasil Wawancara dan Observasi SMPN 2 Ujan Mas

Hasil Wawancara

<p>9/13/25, 9:44 AM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN...</p> <h3>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPAHANG</h3> <p>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu/bapak... Perkenalkan saya Tere Ade Rempas mahasiswa pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Duriup semester akhir.</p> <p>Delama rangka menuntaskan tugas akhir TESIS saya, yang berjudul Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di kabupaten kepahang.</p> <p>Mohon izin kepada bapak/ibu kepala sekolah untuk saya melaksanakan penelitian di sekolah tempat ibu dan bapak pimpinan, selanjutnya mohon kesediannya untuk mengisi google form yang telah saya sediakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.</p> <p>Nama * Anelienra, M. Pri</p> <p>Jabatan/Peran * Kesek</p> <p>Instansi/Asal Sekolah * SMPN 2 UJAN MAS</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/2Lz9PzDnCErL0R8EA-7CR8ZV24hVY4FXPuqV30e88/responses 1/40</p>	<p>9/13/25, 9:44 AM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN...</p> <p>Lama Bekerja/terlibat dalam pendidikan * 30 tahun</p> <p>Tanggal wawancara/mengisi koesioner * 16 Mei 2025</p> <p>Tema 1 : Implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran dan koordinasi antar stakeholder yang menentukan efektivitas pelaksanaannya</p> <p>Bagaimana Anda menilai keselarasan kebijakan pendidikan daerah dengan kebijakan nasional? * Bersinergi</p> <p>Apakah aturan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah ini sudah jelas dan mudah dipahami? * Iya</p> <p>Apakah regulasi pendidikan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan setiap tahun? * Iya</p> <p>Bagaimana proporsi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD daerah Anda? * Kurang paham</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/2Lz9PzDnCErL0R8EA-7CR8ZV24hVY4FXPuqV30e88/responses 2/40</p>
<p>9/13/25, 9:44 AM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN...</p> <p>Apakah anggaran pendidikan dapat diserap tepat waktu dan digunakan secara efisien? * Iya</p> <p>Seberapa besar perhatian anggaran daerah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan? * Penuh perhatian</p> <p>Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan? * Dinas Dikbud, atas usulan satuan Pendidikan</p> <p>Seberapa sering dan seberapa efektif koordinasi antar lembaga dilakukan? * Sering</p> <p>Apakah sektor non-pendidikan (seperti PU, PLN, Telkom) dilibatkan dalam pengembangan infrastruktur sekolah? * Ada, PU</p> <p>Bagaimana sebaran pembangunan ruang kelas di wilayah ini? * Kurang paham</p> <p>Apakah fasilitas seperti toilet, listrik, air bersih, dan internet tersedia secara memadai di sekolah-sekolah? * Kurang paham untuk sekolah lain. Kalau di sekolah tempat saya mengajar ada.</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/2Lz9PzDnCErL0R8EA-7CR8ZV24hVY4FXPuqV30e88/responses 3/40</p>	<p>9/13/25, 9:44 AM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERATAAN...</p> <p>Apakah sekolah di wilayah terencil mendapatkan alokasi bantuan yang proporsional? * Kurang paham</p> <p>Bagaimana distribusi fasilitas pendidikan antar kecamatan di wilayah ini? * Seimbang</p> <p>Apakah terdapat perbedaan mencolok antara mutu infrastruktur pendidikan antar sekolah? * Tidak</p> <p>Bagaimana tanggapan guru, siswa, dan masyarakat terhadap kondisi fasilitas sekolah saat ini? * Alhamdulillah positif</p> <p>Tema 2 : Pemerataan infrastruktur pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, terutama di daerah terencil dan tertinggal.</p> <p>Berapa jarak rata-rata siswa dari rumah ke sekolah? Apakah ada kesulitan transportasi? * Kurang lebih 1-3 km. Tidak ada</p> <p>Moda transportasi apa yang digunakan siswa? Apakah ada hambatan tertentu? * Transportasi umum, tidak</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/2Lz9PzDnCErL0R8EA-7CR8ZV24hVY4FXPuqV30e88/responses 4/40</p>

Bagaimana kondisi akses listrik, air bersih, dan internet di sekolah? *

Lancar

Apakah ada dukungan masyarakat atau lembaga lain dalam pembangunan infrastruktur? *

Ada,

Apakah fasilitas baru digunakan secara maksimal oleh guru dan siswa? *

Iya

Apakah ada perubahan dalam kehadiran dan kualitas pembelajaran setelah peningkatan fasilitas? *

Iya, antusiasme murid dan guru dalam kbm meningkat.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir

Hasil Observasi

Yoga Yulita 2021

SMPN 2 Uluwu

No	Aspek Teoritis	Indikator Penelitian	Item yang Diobservasi	Catatan Lapangan
1	Reputasi Pendidikan	Kejelasan dan penerapan aturan	Dokumen SOP atau juknis pelaksanaan kebijakan di sekolah	→ Saat wawancara kelas ada dan catatan, wawancara di kelas
2	Anggaran Pendidikan	Fokus penggunaan anggaran	Bukti fisik hasil pembangunan (gedung, ruang kelas, sanitasi)	→ Ruang kelas } Pemas dan disipasi Luar } Pemas 2022 WC
3	Koordinasi Antar-Stakeholder	Bukti partisipasi masyarakat	Notulensi rapat, papan informasi, dokumentasi kegiatan kolaboratif	→ Foto wali murid 1 rumah yang memperhatikan dan keamanannya. → Kunjungan dari guru, kegiatan
4	Implementasi Infrastruktur	Kondisi dan distribusi ruang kelas	Jumlah dan kondisi ruang kelas, catatan rehabilitasi/baru	→ Ruang 11 dengan 6 (taman) (6). → Ruang kelas layak → Pemas kembali 2022 karena secara berangsur (taman)
		Fasilitas dasar pendidikan	Toilet, air bersih, listrik, internet, ruang guru	→ Toilet masih layak pakai → Air bersih (2014) lancar, banyak dan enak → Listrik lancar (masih ada) karena → internet lancar (wifi)
5	Pemerataan Infrastruktur Pendidikan	Fasilitas antar wilayah	Perbandingan mutu fisik antar sekolah	
		Kepuasan pengguna	Respons informal dari siswa dan guru terhadap kondisi fasilitas	→ Cukup puas dengan wawancara
		Tingkat pemanfaatan	Penggunaan aktif ruang laboratorium, perpustakaan, dan sarana lain oleh siswa dan guru	→ labortori guru dipakai → Perpus (taman) (masih ada) → Sarana lain → Pemas kembali (masih ada)

Hasil Observasi - Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Dimensi	Indikator	Fokus Observasi	Instrumen	
1	Sarana Dasar	Kondisi ruang kelas, lab, toilet	Kebersihan, kelayakan, ventilasi, pencahayaan, kelengkapan fasilitas	Lembar cek observasi
2	Infrastruktur Pendukung	Ketersediaan air, listrik, internet	Fisik instalasi, fungsionalitas fasilitas, alat-alat pendukung	Lembar cek observasi
3	Efektivitas Penggunaan	Pemanfaatan sarana	Apakah fasilitas benar-benar digunakan oleh siswa/guru dalam KBM	Catatan lapangan, lembar observasi
4	Aksesibilitas	Lokasi sekolah terhadap jalan umum	Apakah sekolah mudah dijangkau kendaraan atau jalan kaki?	Lembar pengamatan lokasi

fasil :

No	Indikator	Catatan lapangan
1		→ Kondisi lingkungan kelas bersih dan cukup red. → Layak sangat bersih dan nyaman bagi kenyamanan fokus pengajaran dan kelengkapan sarana → toilet kembali bersih dan nyaman kembali
2		→ instalasi listrik dan air → Sarana olahraga, biologi, kesenia cukup ada ada.
3		→ Fasilitas digunakan dengan baik
4		→ jalan umum dan jalan kaki

Lampiran 9 Hasil Dokumentasi dan Dokumen SMPN 2 Ujan Mas

Ruang kelas



Perpustakaan



Laboratorium



Toilet dan Air Bersih



Fasilitas Tambahan



BIOGRAFI PENULIS



Tere Aderempas, S.E., M.Pd adalah Nama penulis Tesis ini. Penulis lahir dari orang tua, Bapak Sidik Adim dan Ibu Megawati sebagai anak ke-empat dari 4 bersaudara dan memiliki istri bernama Dwi Ulva Agustina. Penulis dilahirkan di Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Bengkulu pada tanggal 26 Agustus 1996. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 2 Kepahiang (*lulus tahun 2009*), melanjutkan ke SMPN 3 Kepahiang (*lulus tahun 2013*) serta menamatkan pendidikan menengah di SMAN 1 Kepahiang (*lulus tahun 2015*). Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu (*lulus tahun 2022*). Selanjutnya Penulis menempuh masa kuliah S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup (*lulus tahun 2025*).

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif sebagai Presiden Mahasiswa BEM KBM UNIB tahun 2021-2022. Sementara pengalaman organisasi penulis dapatkan dari Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), Human Initiative Volunter Energy (HIVE) dan Komunitas Muslim Kepahiang (KoMiK).

Saat ini, penulis aktif menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan kepemimpinan di organisasi daerah maupun perguruan tinggi. Selain itu, penulis juga berkiprah sebagai pendidik sekaligus menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP IT Cahaya Robbani Kepahiang untuk periode 2025–2027.

Berkat ketekunan serta dorongan motivasi untuk senantiasa belajar dan berusaha, penulis berhasil menuntaskan penyusunan tesis ini. Diharapkan hasil karya akhir ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang”**.